



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029**



H. Herman Deru
Gubernur Sumatera selatan

H. Cik Ujang
Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-NYA, Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 telah disusun dalam bentuk dokumen. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjadi dokumen acuan dalam meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja yang tinggi sebagaimana yang digariskan pada indikator kinerja yang ditetapkan.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan setiap unit kerja atau Biro yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karenanya kami sangat mengharapkan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut, besar harapan Sekretariat Daerah untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja khususnya kepada publik dan pembangunan nasional pada umumnya.

Palembang, 2025

SEKRETARIS DAERAH,

EDWARD CANDRA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL.....iv

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 4

1.3 Maksud dan Tujuan..... 6

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH10

2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan..... 10

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 94

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....104

3.1 Tujuan Renstra Sekretariat Daerah 104

3.2 Sasaran Renstra Sekretariat Daerah..... 105

3.3 Strategi Sekretariat Daerah 109

3.4 Penahapan Pembangunan 112

3.5 Penyajian Lokus 118

3.6 Arah Kebijakan Sekretariat Daerah 118

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN122

4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat Daerah..... 122

4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah 156

4.3 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah..... 160

4.4 Indiktor Kinerja Kunci Sekretariat Daerah..... 163

BAB V PENUTUP.....165

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 80

Tabel 2.2 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah 86

Tabel 2.3 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Sekretariat Daerah 99

Tabel 3.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah..... 108

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Sekretariat Daerah 112

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah 120

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Sekretariat Daerah 124

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan... 140

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 158

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah 162

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah 164

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 55) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memegang peran strategis sebagai unsur pembantu pimpinan Kepala Daerah. Fungsi utama Sekretariat Daerah adalah sebagai koordinasi, fasilitasi serta administrasi pemerintahan yang menjembatani hubungan antara Kepala Daerah, perangkat daerah, legislatif, dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan manajerial Sekretariat Daerah menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 disusun sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan, Pemberdayaan dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui Penyelenggaraan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Sebagaimana yang diamanatkan RPJPD dan RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu penyusunan RPJPD wajib selaras dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2045 (Pasal 10 Ayat 2) dengan mengusung Visi Indonesia Emas 2045, Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, dimana terdapat 5 sasaran visi Indonesia Emas 2045 yang menjadi 5 sasaran Visi Daerah. Selanjutnya terdapat 8 Misi Pembangunan RPJPN 2025-2045 yang akan menjadi misi daerah beserta Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana dengan 45 Indikator Utama Pembangunan menjadi Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok di Daerah.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntabel, dan transparan, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memegang peran strategis sebagai unsur pembantu pimpinan Kepala Daerah. Fungsi utama Sekretariat Daerah adalah sebagai motor penggerak koordinasi, fasilitasi, serta administrasi pemerintahan, yang menjembatani hubungan antara Kepala Daerah, perangkat daerah, legislatif, dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan manajerial Sekretariat Daerah menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 didasari kebutuhan untuk menghadirkan arah kebijakan yang terukur, terarah, dan sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Renstra ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang akan menjadi landasan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien, serta berorientasi pada hasil (outcome).

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat Renstra Sekretariat Daerah adalah dokumen perencanaan Sekretariat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan dengan perkara menjadi pedoman kepala sekretariat daerah dalam menyusun renja sekretariat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Renstra Sekretariat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap sekretariat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029. Renstra Sekretariat Daerah, penyusunan diawali dengan Tahap Persiapan (pembentukan tim penyusun renstra, penyusunan agenda kerja tim Renstra, pengumpulan data dan informasi), orientasi Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra K/L dan Kabupaten/Kota, perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum sekretariat daerah/lintas sekretariat daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra, pengesahan Renstra dan penetapan Renstra oleh Kepala Daerah.

Dokumen Renstra ini disusun sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus sebagai penjabaran visi, misi, dan

program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yaitu **“Sumsel Maju Terus Untuk Semua”**.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa Kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur kedudukan, kewenangan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta desa adat;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tanggung jawab Kepala Daerah (Setiap Daerah wajib menetapkan Renstra dalam jangka waktu 1 bulan setelah Kepala Daerah dilantik);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

9. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025-2029);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman untuk Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 55) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016

Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan pedoman bagi seluruh Biro Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (Lima) Tahun. Oleh karena itu, Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan untuk :

- a. Sebagai pedoman perencanaan jangka menengah sistematis, terukur, dan terarah bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan serta sebagai instrumen evaluasi kinerja organisasi dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 serta mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan terpilih.
- c. Untuk menyelaraskan peran strategis Sekretariat Daerah sebagai koordinat administratif pemerintahan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, serta mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
- d. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan ukuran pencapaian rencana kinerja 5 (lima) tahun kedepan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan teratur.

- f. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu Tahun 2025-2029.
- g. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasarannya untuk kurun waktu sampai Tahun 2029.
- h. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Merumuskan arah kebijakan dan prioritas program/kegiatan Sekretariat Daerah secara terstruktur dan logis dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah
- b. Memberikan kerangka strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unit koordinatif, administratif, dan fasilitatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis kinerja.
- d. Menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kinerja organisasi, baik internal maupun eksternal, secara periodik.
- e. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan yang selaras dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- f. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun dokumen rencana kerja (Renja) atau Rencana Kerja Tahunan

(RKT) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kurun waktu tahun 2025-2029.

- g. Menentukan strategis untuk pengelolaan keberhasilan dan penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan disusun melalui sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 2.1.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 2.1.5 Mitra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemberian Pelayanan
 - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja
 - 2.1.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah
Dan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan

3.1.1 Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan

3.1.2 Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

3.2.1 Strategi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan

3.2.2 Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

4.2 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1. Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi

2.1.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya untuk mengatur tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi ;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi;
4. Pelayanan administrasi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara ;
5. Penyelenggaraan pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana;
6. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur, Keuangan Prasarana dan Sarana Pemerintah Provinsi; dan
7. Pelaksanaan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga asisten yaitu :

- a. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari :
 1. Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
 2. Biro Hukum Dan Hak Asasi Manusia
 3. Biro Kesejahteraan Rakyat

- b. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang terdiri dari :
 - 1. Biro Perekonomian
 - 2. Biro Administrasi Pembangunan
 - 3. Biro Pengadaan Barang/Jasa
- c. Asisten Administrasi Dan Umum yang terdiri dari :
 - 1. Biro Organisasi
 - 2. Biro Umum Dan Perlengkapan
 - 3. Biro Humas dan Protokol

Biro-Biro di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tersebut memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyelenggarakan pelayanan administratif, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan dan otonomi daerah. Biro Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah.
 - b. Penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang pemerintahan dan otonomi daerah ;
 - c. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang administrasi;
 - d. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
 - e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- 2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyelenggarakan pelayanan administratif, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas monitoring dan evaluasi program

kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi dan sumber daya di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota. Biro hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota;
 - b. Penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota;
 - c. Penyelenggaraan pembinaan administrasi dan sumber daya aparatur di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan kabupaten/kota
 - d. Pelaksana koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis di bidang produk hukum penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
3. Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, memberikan pelayanan administratif, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan administrasi dan sumber daya di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga. Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, pemuda dan olahraga ;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - d. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - e. Penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
4. Biro Perekonomian mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan. Biro Perekonomian mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan;
 - b. Penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan

- pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan;
- c. Penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan gubernur sumatera selatan sesuai arahan dengan tugas dan fungsinya.
5. Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Provinsi dan menyiapkan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan, penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di bidang administrasi pembangunan. Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
 - b. Pengendalian pelaksanaan pembangunan provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
 - c. Pengevaluasian bahan hasil pelaksanaan pembangunan provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
 - d. Pengkoordinasain bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
 - e. Pelaporan bahan pelaksanaan pembangunan provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya; dan

- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
6. Biro Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan pembangunan dalam penyiapan Perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Biro Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - b. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 - c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan berkaitan dengan tugasnya.
7. Biro Organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi, sumber daya manusia dan fasilitasi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, administrasi pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur. Biro Organisasi mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan penyiapan perumusan kebijakan di

- bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur ;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, penyusunan program kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur;
 - c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemerintahan Provinsi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur;
 - d. Penyelenggaraan pembinaan teknis, administratif dan sumber daya Perangkat Daerah di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya manusia di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah. Biro Umum Dan Perlengkapan mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan penyusunan rumusan di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis kebijakan di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Setda;

- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah, dan;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

9. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas, keprotokolan, pelayanan tamu pimpinan dan informasi publik.

Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan hubungan masyarakat, keprotokolan, pelayanan tamu dan informasi publik;
- b. Penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi Perangkat Daerah di bidang hubungan masyarakat, protokol pelayanan tamu pimpinan dan informasi publik;
- c. Penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Perangkat Daerah di bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan, pelayanan tamu pimpinan dan informasi publik
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

Adapun Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Struktur Organisasi dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH

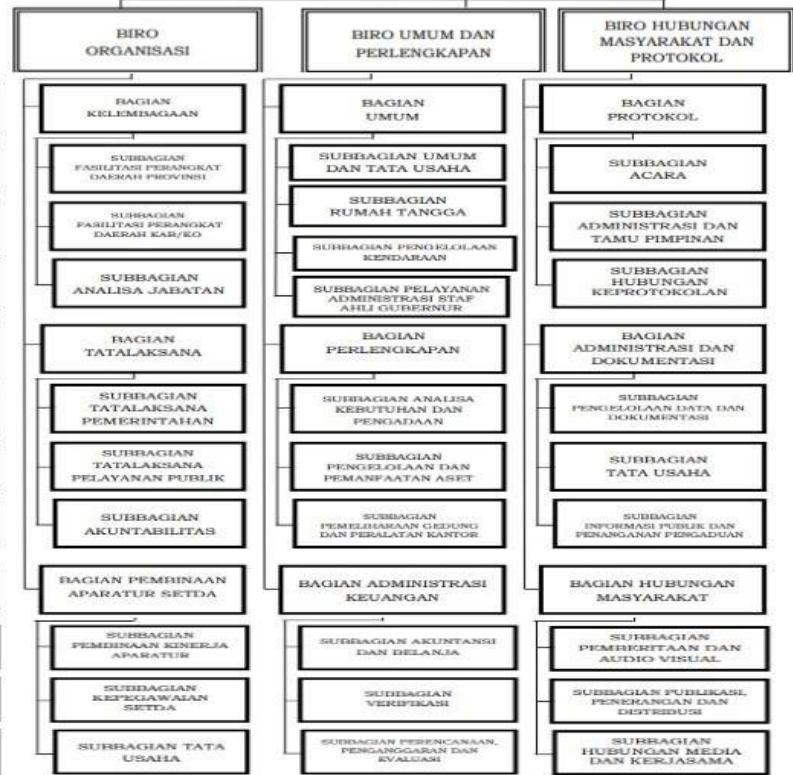
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



ASISTEN EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM



2.1.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Sumber Daya Manusia yang merupakan aparatur yang ada di Biro-Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebagai berikut :

Susunan Kepegawaian Biro-Biro Setda
Provinsi Sumatera Selatan

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN			PENDIDIKAN			JENIS KELAMIN
1	2	3			4			5
1	Kepala Biro	Pembha Utama Muda (IV/c)	= 1	Orang	S.3	= 1	Orang	Perempuan
2	Kepala Bagian	Pembha Tingkat I (IV/b)	= 1	Orang	S.2	= 1	Orang	LakiLaki
3			= 1	Orang	S.2	= 1	Orang	LakiLaki
4	Kepala Sub Bagian	Pembha Tingkat I (IV/b)	= 1	Orang	S.2	= 1	Orang	LakiLaki
5		Pembha (IV/a)	= 1	Orang	S.2	= 1	Orang	LakiLaki
6				= 1	Orang	S.2	= 1	Orang
7		Penata Tingkat I (III/d)	= 4	Orang	S.1	= 4	Orang	LakiLaki
8			= 1	Orang	S.1	= 1	Orang	Perempuan
9		Penata (III/c)	= 1	Orang	S.1	= 1	Orang	LakiLaki
10	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	Penata Tingkat I (III/d)	= 1	Orang	S.2	= 1	Orang	LakiLaki
11			= 3	Orang	S.2	= 3	Orang	Perempuan
12		Penata Muda Tngkat I (III/b)	= 1	Orang	S.2	= 1	Orang	LakiLaki
13			= 2	Orang	S.1	= 2	Orang	LakiLaki
14			= 1	Orang	D.3	= 1	Orang	LakiLaki
15			= 1	Orang	D.3	= 1	Orang	Perempuan
16			= 1	Orang	SMU	= 1	Orang	LakiLaki
17		Penata Muda (III/a)	= 2	Orang	S.1	= 2	Orang	LakiLaki
18			= 1	Orang	S.1	= 1	Orang	Perempuan
19		Pengatur (II/c)	= 1	Orang	SMU	= 1	Orang	LakiLaki
20			= 1	Orang	SMU	= 1	Orang	Perempuan
Jumlah			27	Orang		27	Orang	
21	PPPK Tahap I	Golongan IX	= 8	Orang	S.1	= 8	Orang	LakiLaki
22			= 6	Orang	S.1	= 6	Orang	Perempuan
23		Golongan VII	= 1	Orang	D.3	= 1	Orang	Perempuan
24		Golongan V	= 3	Orang	SMU	= 3	Orang	LakiLaki
25			= 3	Orang	SMU	= 3	Orang	Perempuan
Jumlah			21	Orang		21	Orang	
26	PPPK Tahap II	Golongan IX	= 1	Orang	S.1	= 1	Orang	LakiLaki
27			= 1	Orang	S.1	= 1	Orang	Perempuan
28		Golongan V	= 1	Orang	SMU	= 1	Orang	Perempuan
Jumlah			3	Orang		3	Orang	
29	PPPK Tahap II Optimalisasi BKN		= 2	Orang	SMU	= 2	Orang	Perempuan
Jumlah			2	Orang		2	Orang	
30	PPK Paruh Waktu (Tidak Lulus Tahap I)	Golongan V	= 1	Orang	SMU	= 1	Orang	LakiLaki
Jumlah			1	Orang		1	Orang	
31	NON ASN		= 1	Orang	S.1	= 1	Orang	LakiLaki
			= 2	Orang	S.1	= 2	Orang	Perempuan
Jumlah			3	Orang		3	Orang	

2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN			PENDIDIKAN			JENIS KELAMIN			
1	2	3			4			5			
1	Kepala Biro	Pembina Tk.I (IV/b)	=	1	Orang	S.2	=	1	Orang	LakiLaki : 1	Orang
2	Kepala Bagian	Pembina Tingkat I (IV/b)	=	1	Orang	S.2	=	2	Orang	LakiLaki : 2	Orang
		Jaksa Utama Pratama(IV/b)	=	1	Orang	S.1	=	1	Orang	Perempuan : 1	Orang
3		Pembina (IV/a)	=	1	Orang						
4	Kepala Sub Bagian	Pembina (IV/a)	=	2	Orang	S.2	=	6	Orang	LakiLaki : 1	Orang
5		Penata Tk.I (III/d)	=	4	Orang	S.1	=	3	Orang	Perempuan : 8	Orang
6		Penata (III/c)	=	2	Orang						
7		Penata Muda Tk.I (III/b)	=	1	Orang						
10	Staff	Pembina (IV/a)	=	1	Orang	S.2	=	4	Orang	LakiLaki : 4	Orang
11		Penata Tk.I (III/d)	=	1	Orang	S.1	=	4	Orang	Perempuan : 7	Orang
12		Penata (III/c)	=	3	Orang	SMA	=	3	Orang		
13		Penata Muda Tk.I (III/b)	=	4	Orang						
14		Penata Muda (III/a)	=	1	Orang						
15		Pengatur Tk.I (II/d)	=	1	Orang						
Jumlah				24	Orang			24	Orang		
21	PPPK Tahap I	Golongan IX	=	6	Orang	S.1	=	6	Orang	LakiLaki : 4	Orang
23		Golongan VII	=	1	Orang	D.3	=	1	Orang	Perempuan : 6	Orang
24		Golongan V	=	3	Orang	SMA	=	3	Orang		
Jumlah				10	Orang			10	Orang		
26	PPPK Tahap II Optimalisasi BKN	Golongan V	=	2	Orang	SMA	=	2	Orang	Perempuan : 1	Orang
Jumlah				2	Orang			2	Orang		
30	Menunggu pengumuman Tampungan BKN		=	1	Orang	D.3	=	1	Orang	LakiLaki : 1	Orang
Jumlah				1	Orang			1	Orang		
31	PPPK Paruh Waktu (Tidak Lulus Tahap I dan Tahap II)	PPPK Tahap I	=	10	Orang	S.1	=	14	Orang	LakiLaki : 3	Orang
		PPPK Tahap II	=	4	Orang					Perempuan : 11	Orang
Jumlah				14	Orang			14	Orang		
32	NON ASN		=	3	Orang	S.1	=	3	Orang	Perempuan : 3	Orang
Jumlah				3	Orang			3	Orang		

3. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN			PENDIDIKAN			JENIS KELAMIN		
1	2	3			4			5		
1	Kepala Biro	Pembina Utama Muda (IV/c)	=	1	Orang	S.3	=	1	Orang	Laki-Laki : 1 Orang
2	Kepala Bagian	Pembina Tingkat I (IV/b)	=	3	Orang	S.2	=	3	Orang	Laki-Laki : 3 Orang
		Pembina Tingkat I (IV/b)	=							
3		Pembina Tingkat I (IV/b)	=							
4	Kepala Sub Bagian	Pembina (IV/a)	=	5	Orang	S.2	=	5	Orang	Laki-laki : 4 Orang
5		Penata Tk.I (III/d)	=	3	Orang	S.1	=	3	Orang	Perempuan : 4 Orang
6		Penata (III/c)	=		Orang					
7		Penata Muda Tk.I (III/b)	=		Orang					
10	Staff	Pembina (IV/a)	=	1	Orang	S.2	=	5	Orang	Laki-Laki : 10 Orang
11		Penata Tk.I (III/d)	=	12	Orang	S.1	=	11	Orang	Perempuan : 10 Orang
12		Penata (III/c)	=	4	Orang	D3	=	1	Orang	
13		Penata Muda Tk.I (III/b)	=	-	-	SMA	=	3	Orang	
14		Penata Muda (III/a)	=	-	-					
		Pengatur Tk.I (II/d)	=	1	Orang					
15		Pengatur Muda Tk.I (II/b)	=	2	Orang					
Jumlah				32	Orang			32	Orang	
21	PPPK Tahap I	Golongan IX	=	10	Orang	S.1	=	10	Orang	Laki-Laki : 8 Orang
23		Golongan VII	=	2	Orang	D.3	=	2	Orang	Perempuan : 6 Orang
24		Golongan V	=	2	Orang	SMA	=	2	Orang	
Jumlah				14	Orang			14	Orang	
26	PPPK Tahap II Optimalisasi BKN	Golongan IX	=	10	Orang	S.I	=	10	Orang	Laki-Laki : 3 Orang
		Golongan VII	=	1	Orang	D.3	=	1	Orang	Perempuan : 8 Orang
Jumlah				11	Orang			11	Orang	
30	Menunggu pengumuman Tampungan BKN		=	-	-	-	=	-	Orang	- - Orang
Jumlah				-	Orang			-	Orang	
31	PPPK Paruh Waktu (Tidak Lulus Tahap I dan Tahap II)	PPPK Tahap I	=	1	Orang	SMA	=	-	Orang	Laki-Laki : 1 Orang
		PPPK Tahap II	=	-	-					Perempuan : - -
Jumlah				1	Orang			-	Orang	
32	NON ASN		=	-	-	S.1	=	-	-	Perempuan : - -
Jumlah				0	Orang			0	Orang	

4. Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN			PENDIDIKAN			JENIS KELAMIN
1	2	3			4			5
1	Kepala Biro	Pembina Utama Muda (IV/c)	= 1	Orang	S.2 = 1	Orang	LakiLaki	
		Pembina Tingkat I (IV/b)	= 1	Orang	S.2 = 1	Orang	LakiLaki	
			= 1	Orang	S.2 = 1	Orang	Perempuan	
2	Kepala Bagian	Penata Tingkat I (III/d)	= 1	Orang	S.1 = 1	Orang	Perempuan	
4	Kepala Sub Bagian	Pembina (IV/a)	= 4	Orang	S.2 = 1	Orang	LakiLaki	
					= 3	Orang	Perempuan	
5		Penata Tingkat I (III/d)	= 4	Orang	S.2 = 1	Orang	LakiLaki	
6			=		S.1 = 3	Orang	Perempuan	
7		Penata (III/c)	= 1	Orang	S.1 = 1	Orang	Perempuan	
8		Penata Tingkat I (III/d)	= 1	Orang	S.2 = 1	Orang	LakiLaki	
9			= 3	Orang	S.2 = 3	Orang	LakiLaki	
13	STAFF	Pembina (IV/a)	= 2	Orang	S.2 = 1	Orang	LakiLaki	
14					= 1	Orang	Perempuan	
		Penata Tingkat I (III/d)	= 7	Orang	S.1 = 5	Orang	Perempuan	
					1	Orang	LakiLaki	
					S.2 = 1	Orang	LakiLaki	
15		Penata (III/c)	= 2	Orang	S.1 = 2	Orang	Perempuan	
17		Penata Muda Tingkat I (III/b)	= 4	Orang	S.1 = 2	Orang	Perempuan	
					S.1 = 1	Orang	Perempuan	
					SMU = 1	Orang	Perempuan	
18		Penata Muda (III/a)	= 1	Orang	SMU = 1	Orang	Perempuan	
	JUMLAH		= 33	Orang	= 33	Orang		
21	PPPK Tahap I	Golongan IX	= 3	Orang	S.1 = 3	Orang	Perempuan	
22		Golongan VII	= 2	Orang	D.3 = 1	Orang	Perempuan	
23			=		1	Orang	LakiLaki	
24	JUMLAH		5	Orang	5	Orang		
27	PPPK Tahap II	Golongan IX	= 2	Orang	S.1 = 1	Orang	Perempuan	
28					1	Orang	LakiLaki	
		Golongan VII	= 1	Orang	D.3 = 1	Orang	LakiLaki	
		Golongan V	= 2	Orang	SMU = 1	Orang	LakiLaki	
					1	Orang	Perempuan	
	JUMLAH		5	Orang	5	Orang		
29	PPPK Tahap II Optimalisasi BKN	Golongan V	= 23	Orang	SMU = 20	Orang	LakiLaki	
					3	Orang	Perempuan	
	JUMLAH		23	Orang	23	Orang		
30	NON ASN		= 2	Orang	S.1 = 2	Orang	LakiLaki	
31	JUMLAH		2	Orang	2	Orang		

5. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN			PENDIDIKAN			JENIS KELAMIN
1	2	3			4			5
1	Kepala Biro	Pembina Tingkat I (IV/b)	= 1	Orang	S.2	= 1	Orang	Laki-Laki
2	Kepala Bagian	Pembina Tingkat I (IV/b)	= 1	Orang	S.2	= 1	Orang	Laki-Laki
3			= 1	Orang	S.2	= 1	Orang	Perempuan
4	Kepala Sub Bagian	Pembina (IV/a)	= 5	Orang	S.2	= 5	Orang	Perempuan
6		Penata Tingkat I (III/d)	= 1	Orang	S.1	= 1	Orang	Perempuan
7			= 1	Orang	D.3	= 1	Orang	Laki-Laki
8	Staf	Penata Tingkat I (III/d)	= 1	Orang	S.1	= 1	Orang	Perempuan
9			= 2	Orang	S.1	= 2	Orang	Laki-Laki
10		Pengatur (II/d)	= 1	Orang	SMU	= 1	Orang	Laki-Laki
Jumlah			14	Orang		14	Orang	
11	PPPK Tahap I	Golongan IX	= 2	Orang	S.1	= 2	Orang	Laki-Laki
12			= 1	Orang	S.1	= 1	Orang	Perempuan
13		Golongan VII	= 1	Orang	D.3	= 1	Orang	Perempuan
14		Golongan V	= 1	Orang	SMU	= 1	Orang	Perempuan
Jumlah			5	Orang		5	Orang	
15	PPPK Tahap II	Golongan VII	= 1	Orang	D.3	= 1	Orang	Perempuan
Jumlah			1	Orang		1	Orang	
16	PPPK Paruh Waktu (Tidak Lulus Tahap I)	Golongan IX	= 1	Orang	S.1	= 1	Orang	Perempuan
Jumlah			1	Orang		1	Orang	
17	PPPK Paruh Waktu (Tidak Lulus Tahap II)	Golongan IX	= 2	Orang	S.1	= 2	Orang	Perempuan
		Golongan IX	= 1	Orang	S.1	= 1	Orang	Laki-Laki
Jumlah			3	Orang		3	Orang	
18	NON ASN		= 1	Orang	D.3	= 1	Orang	Perempuan
Jumlah			1	Orang		1	Orang	

6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN		PENDIDIKAN		JENIS KELAMIN
1	2	3		4		5
1	Kepala Biro	Pembina Utama Muda(IV/c)	= 1 Orang	S.3 = 1	Orang	Perempuan
2	Kepala Bagian	Pembina Tingkat I (IV/b)	= 1 Orang	S.2 = 1	Orang	Laki-Laki
3			= 1 Orang	S.2 = 1	Orang	Laki-Laki
4	Kepala Sub Bagian	Pembina Tingkat I (IV/b)	= 1 Orang	S.2 = 1	Orang	Laki-Laki
5		Pembina (IV/a)	= 1 Orang	S.2 = 1	Orang	Laki-Laki
6			= 1	S.2 = 1	Orang	Perempuan
7		PenataTingkat I (III/d)	= 4	S.1 = 4	Orang	Laki-Laki
8			= 1 Orang	S.1 = 1	Orang	Perempuan
9		Penata (III/c)	= 1 Orang	S.1 = 1	Orang	Laki-Laki
10	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	Penata Tingkat I (III/d)	= 1 Orang	S.2 = 1	Orang	Laki-Laki
11			= 3 Orang	S.2 = 3	Orang	Perempuan
12			= 1 Orang	S.2 = 1	Orang	Laki-Laki
13			= 2 Orang	S.1 = 2	Orang	Laki-Laki
14		Penata Muda Tingkat I (III/b)	= 1 Orang	D.3 = 1	Orang	Laki-Laki
15			= 1 Orang	D.3 = 1	Orang	Perempuan
16			= 1 Orang	SMU= 1	Orang	Laki-Laki
17		Penata Muda (III/a)	= 2 Orang	S.1 = 2	Orang	Laki-Laki
18			= 1 Orang	S.1 = 1	Orang	Perempuan
19		Pengatur (II/c)	= 1 Orang	SMU= 1	Orang	Laki-Laki
20			= 1 Orang	SMU= 1	Orang	Perempuan
		Jumlah.....	27 Orang	27	Orang	
21	PPPK Tahap I	Golongan IX	= 8 Orang	S.1 = 8	Orang	Laki-Laki
22			= 6 Orang	S.1 = 6	Orang	Perempuan
23		Golongan VII	= 1 Orang	D.3 = 1	Orang	Perempuan
24		Golongan V	= 3 Orang	SMU= 3	Orang	Laki-Laki
25		= 3 Orang	SMU= 3	Orang	Perempuan	
		Jumlah.....	21 Orang	21	Orang	
26	PPPK Tahap II	Golongan IX	= 1 Orang	S.1 = 1	Orang	Laki-Laki
27			= 1 Orang	S.1 = 1	Orang	Perempuan
28		Golongan V	= 1 Orang	SMU= 1	Orang	Perempuan
		Jumlah.....	3 Orang	3	Orang	
29	PPPK Tahap II Optimalisasi BKN		= 2 Orang	SMU= 2	Orang	Perempuan
		Jumlah.....	2 Orang	2	Orang	
30	PPPK Paruh Waktu (Tidak Lulus Tahap I)	Golongan V	= 1 Orang	SMU= 1	Orang	Laki-Laki
		Jumlah.....	1 Orang	1	Orang	
31	Ikut Test CPNS (Tidak Lulus)		= 1 Orang	S.1 = 1	Orang	Laki-Laki
			= 2 Orang	S.1 = 2	Orang	Perempuan
		Jumlah.....	3 Orang	3	Orang	

7. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN			PENDIDIKAN			JENIS KELAMIN
1	2	3			4			5
1	Kepala Biro	Pembhna Utama Madya (IV/d)	= 1	Orang	S.2 = 1	Orang	LakiLaki	
2	Kepala Bagian	Pembhna Tingkat I (IV/b)	= 2	Orang	S.2 = 2	Orang	LakiLaki	
3			= 1	Orang	S.2 = 1	Orang	Perempuan	
4	Kepala Sub Bagian	Pembhna (IV/a)	= 1	Orang	S.2 = 1	Orang	LakiLaki	
5			= 1	Orang	S.2 = 1	Orang	Perempuan	
6		Penata Thgkat I (III/d)	= 1	Orang	S.2 = 1	Orang	LakiLaki	
7			= 3	Orang	S.2 = 3	Orang	Perempuan	
8			= 1	Orang	S.1 = 1	Orang	LakiLaki	
9			= 2	Orang	S.1 = 2	Orang	Perempuan	
8	Analisis Kelembagaan	Pembhna Utama Muda (IV/c)	= 1	Orang	S.2 = 1	Orang	LakiLaki	
9		Pembhna (IV/a)	= 1	Orang	S.2 = 1	Orang	Perempuan	
10		Penata Muda (III/a)	= 1	Orang	S.1 = 1	Orang	Perempuan	
11		Penata Muda (III/a)	= 1	Orang	S.1 = 1	Orang	LakiLaki	
12	Analisis Kinerja	Pembhna Utama Muda (IV/c)	= 1	Orang	S.2 = 1	Orang	LakiLaki	
13	Analisis Tatalaksana Pemerintahan	Pembhna Tingkat I (IV/b)	= 1	Orang	S.2 = 1	Orang	Perempuan	
14		Pembhna (IV/a)	= 1	Orang	S.2 = 1	Orang	Perempuan	
15	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	Penata Thgkat I (III/d)	= 1	Orang	S.2 = 1	Orang	LakiLaki	
16	Analisis Jabatan	Penata Muda Tk. I (III/b)	= 1	Orang	S.1 = 1	Orang	Perempuan	
17	Analisis Tatalaksana Pelayanan Publik	Penata Muda (III/a)	= 1	Orang	S.1 = 1	Orang	LakiLaki	
18	Pengadministrasi Umum	Penata Muda (III/a)	= 1	Orang	S.1 = 1	Orang	Perempuan	
Jumlah			24	Orang		24	Orang	
19	PPPK Tahap I	Gobngan IX	= 2	Orang	S.1 = 2	Orang	LakiLaki	
20			= 5	Orang	S.1 = 5	Orang	Perempuan	
21		Gobngan VII	= 1	Orang	D.3 = 1	Orang	Perempuan	
22		Gobngan V	= 2	Orang	SMU = 2	Orang	LakiLaki	
Jumlah			10	Orang		10	Orang	
23	PPPK Tahap II	Gobngan IX	= 2	Orang	S.1 = 2	Orang	Perempuan	
24		Gobngan V	= 1	Orang	SMU = 1	Orang	Perempuan	
Jumlah			3	Orang		3	Orang	
25	PPPK Tahap II Optimalisasi BKN	Gobngan IX	= 2	Orang	S.1 = 2	Orang	LakiLaki	
			= 1	Orang	S.1 = 1	Orang	Perempuan	
		Gobngan V	= 3	Orang	SMU = 3	Orang	LakiLaki	
			= 5	Orang	SMU = 5	Orang	LakiLaki	
Jumlah			11	Orang		11	Orang	
31	NON ASN		= 1	Orang	S.1 = 1	Orang	LakiLaki	
Jumlah			1	Orang		1	Orang	
Jumlah Total			49	Orang		49	Orang	

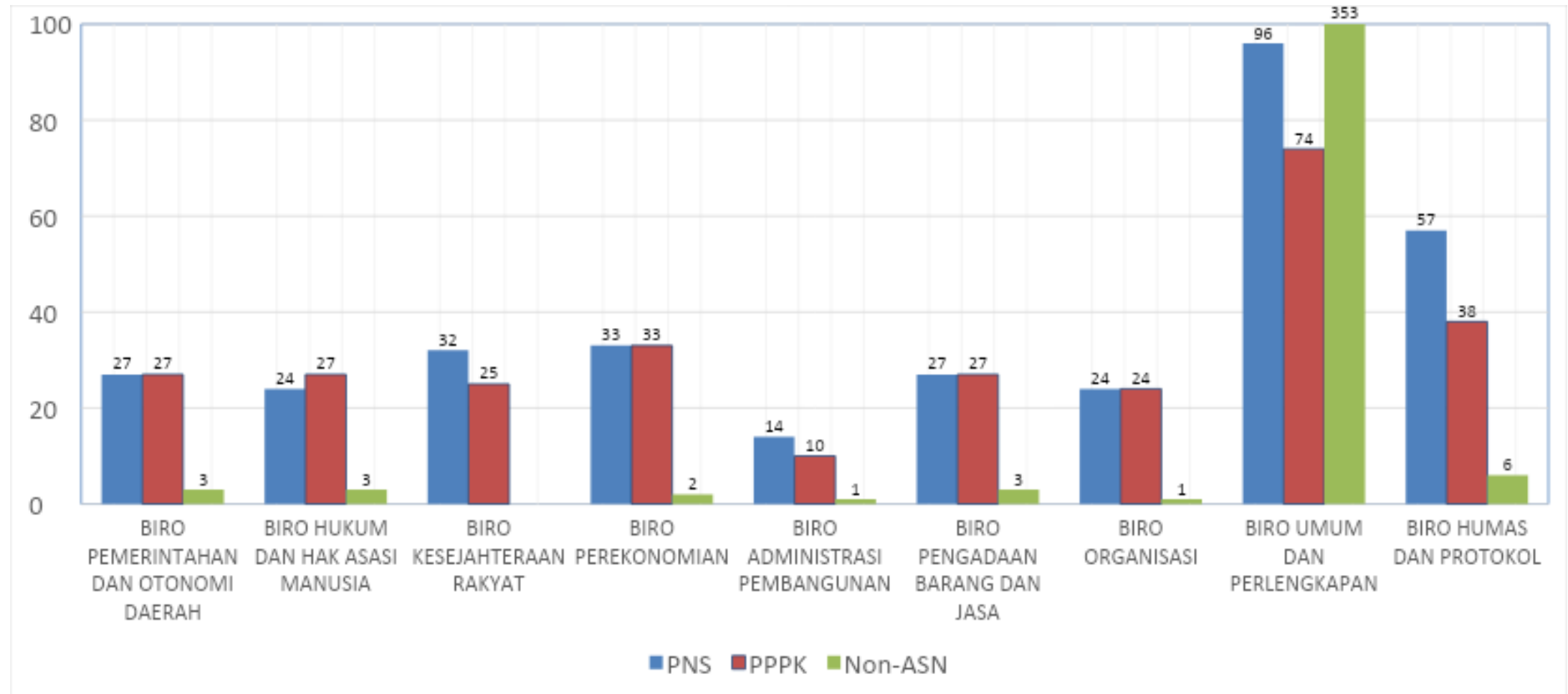
8. Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1.	Kepala Biro	Pembina (IV/a) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
2.	Kepala Bagian	Pembina Tk.I (IV/b) = 1 Org	S2 = 1 Org	Perempuan = 1 Org
		Pembina (IV/a) = 1 Org	S1 = 1 Org	Laki-Laki = 1 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 1 Org	S2 = 1 Org	Perempuan = 1 Org
3.	Kepala Subbagian	Pembina (IV/a) = 1 Org	S2 = 1 Org	Perempuan = 1 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 5 Org	S2 = 1 Org S1 = 4 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 3 Org
		Penata (III/c) = 4 Org	S2 = 1 Org S1 = 4 Org	Laki-laki = 3 Org Perempuan = 1 Org
4.	Staf	Pembina (IV/a) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 1 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 17 Org	S2 = 6 Org S1 = 11 Org	Laki-laki = 7 Org Perempuan = 10 Org
		Penata (III/c) = 12 Org	S2 = 2 Org S1 = 10 Org	Laki-laki = 6 Org Perempuan = 6 Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) = 14 Org	S1 = 11 Org SLTA = 3 Org	Laki-laki = 10 Org Perempuan = 4 Org
		Penata Muda (III/a) = 13 Org	S1 = 9 Org D III = 3 Org SLTA = 1 Org	Laki-laki = 10 Org Perempuan = 3 Org
		Pengatur Tk.I (II/d) = 13 Org	SLTA = 13 Org	Laki-laki = 8 Org Perempuan = 5 Org
		Pengatur (II/c) = 6 Org	SLTA = 6 Org	Laki-laki = 4 Org Perempuan = 2 Org
		Pengatur Muda Tk.I (II/b) = 2 Org	SLTA = 2 Org	Laki-laki = 2 Org
		Pengatur Muda (II/a) = 1 Org	SLTA = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Juru (I/c) = 2 Org	SLTP = 2 Org	Laki-laki = 2 Org
5.	PPPK	Penata Layanan Operasional = 29 Org	S1	Perempuan = 13 Org Laki-Laki = 16 Org
		Pengelola Layanan Operasional (VII) = 3 Org	D3	Perempuan = 1 Org Laki-Laki = 2 Org
		Pengadministrasi Perkantoran (VII) = 42 Org	SMA	Perempuan = 14 Org Laki-Laki = 28 Org
6.	NON ASN	Pegawai Non ASN = 353 Org		

9. Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	ASN	JABATAN	PANGKAT/GOL		PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	
1	PNS	Kepala Biro	Pembina TK.I (IV/b)	1 Org	S2	Laki-laki	1 Org
		Kepala Bagian	Pembina (IV/a)	2 Org	S2	Laki-laki	2 Org
		Kepala Subbagian	Penata Tk.I (III/d)	2 Org	S2	Laki-laki	3 Org
			Penata (III/c)	5 Org	S1	Laki-laki	4 Org
			Penata Muda Tk.I (III/b)	1 Org	S1	Perempuan	1 Org
		Staf	Penata Tk.I (III/d)	9 Org	S2	Laki-laki	4 Org
			Penata (III/c)	12 Org	S2	Perempuan	6 Org
			Penata Muda Tk.I (III/b)	10 Org	S1	Laki-laki	9 Org
			Penata Muda (III/a)	11 Org	S1	Perempuan	15 Org
			Pengatur Tk.I (II/d)	3 Org	D3	Laki-laki	2 Org
			Juru (I/c)	1 Org	D3	Perempuan	2 Org
					SLTA	Laki-laki	5 Org
					SLTA	Perempuan	2 Org
					SLTP	Laki-laki	1 Org
2	PPPK TAHAP I				S1	Laki-laki	Org
					S1	Perempuan	7 Org
					D3	Laki-laki	- Org
					D3	Perempuan	4 Org
					SLTA	Laki-laki	5 Org
					SLTA	Perempuan	4 Org
	PPPK TAHAP II				S1	Laki-laki	- Org
					S1	Perempuan	1 Org
					SLTA	Laki-laki	8 Org
					SLTA	Perempuan	- Org
	PPPK PARUH WAKTU				S1	Laki-laki	5 Org
					S1	Perempuan	3 Org
					SLTA	Laki-laki	- Org
					SLTA	Perempuan	1 Org
3	NON ASN		HONORER			Laki-laki	2 Org
						Perempuan	- Org
			TKPD			Laki-laki	- Org
						Perempuan	- Org
			TENAGA IT			Laki-laki	2 Org
						Perempuan	2 Org

Grafik 2.1.
DATA PEGAWAI TAHUN 2025



Jadi disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari beberapa biro saat ini masih terdapat kekurangan SDM, termasuk permasalahan gender di lingkungan kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi isu penting yang mempengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan dan optimalisasi kinerja pegawai. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam birokrasi, berbagai kondisi struktural, kultural, dan institusional masih menghadirkan kesenjangan nyata antara pegawai laki-laki dan perempuan.

Secara keseluruhan, permasalahan gender di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bukan hanya tentang jumlah atau representasi, melainkan juga menyangkut akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang belum sepenuhnya setara antara laki-laki dan perempuan. Isu ini perlu mendapat perhatian serius melalui penguatan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), penciptaan lingkungan kerja yang inklusif, serta mekanisme pembinaan karier yang lebih adil dan berbasis kompetensi.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

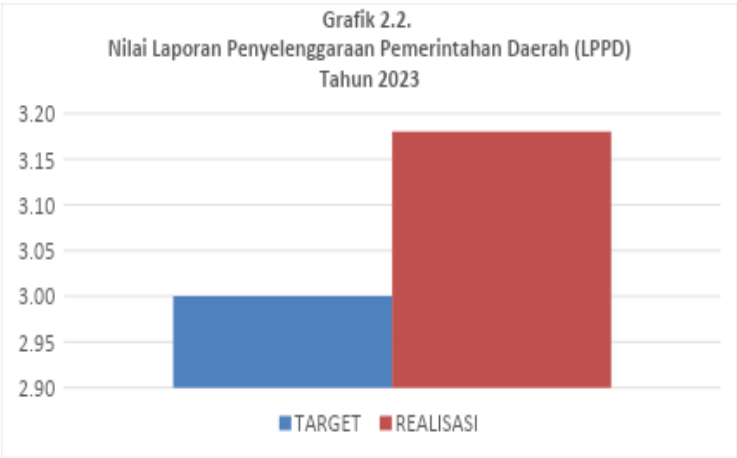
Di bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada periode Renstra sebelumnya. Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama. Dalam penetapan target selama 5 tahun terhitung dari

tahun 2025-2029.

Pencapaian Indikator Kinerja dari tahun 2025–2029 secara kuantitatif adalah sebagai berikut:

1. Capaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyampaian Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023 ditargetkan dengan nilai Sangat Tinggi (ST) dengan angka (3,0) dengan realisasi skor (3,18). dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



2. Capaian Produk Hukum Daerah Penanganan Perkara dan HAM Jumlah Peraturan Daerah yang diakses oleh Publik

Persentase Produk Hukum daerah, Penanganan Perkara dan HAM Pada Tahun 2024 ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 100%. Tercapainya persentase produk hukum 100% karena perhitungannya didapat dari Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Persentase gugatan menyangkut kepentingan hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut :

- 1) Jumlah Penertiban Penyusunan Peraturan Daerah, Target 5 Peraturan Daerah dan 9 Peraturan Daerah.
- 2) Jumlah Penertiban Penyusunan Peraturan Kepala Daerah, target 15 Peraturan Gubernur dan 31 Peraturan Gubernur.

- 3) Jumlah Penelitian dan Penelaahan Draft Keputusan Gubernur, Target 700 Keputusan Gubernur dan 1002 Keputusan Gubernur.
- 4) Jumlah Penertiban Penyusunan Peraturan Kepala Daerah, Target 5 Perda dan Realisasi Target 9 Perda.
- 5) Jumlah Penertiban Penyusunan Peraturan Kepala Daerah, Target 15 Pergub dan Realisasi Target 31 Pergub.
- 6) Jumlah Penelitian dan Penelaahan Draft Keputusan Gubernur, Target 700 kpts dan Realisasi Target 1000 kpts.
- 7) Jumlah Publikasi Produk Hukum Berupa Buku dan Media Cetak, Target 84 Buku dan 1 Kali Cetak serta Realisasi Target 121 Buku dan 1 Kali Cetak.
- 8) Jumlah Publikasi Produk Hukum dalam Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Target 110 Produk Hukum dan Realisasi Target 419 Produk Hukum.
- 9) Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang dapat di Evaluasi, Fasilitasi, dan Klarifikasi, Target 450 Produk Hukum dan Realisasi Target 681 Produk Hukum.
- 10) Jumlah Perkara yang Menyangkut Kepentingan Pemerintah Provinsi Sumsel, Target 8 Perkara dan Realisasi Target 30 Perkara.
- 11) Jumlah Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada Masyarakat Miskin, Target 20 Kasus dan Realisasi Target 52 Kasus.
- 12) Jumlah Rapat dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Hukum Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara (TUN) yang di selesaikan, Target 2 Kali dan Realisasi Target 2 kali.
- 13) Terbentuknya Keluarga Sadar Hukum di 17 (Tujuh Belas) kabupaten/kota, Target 1 Kegiatan dan Realisasi Target 1 Kegiatan.

- 14) Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyuluhan Hukum, Target 5 kab/kota dan Realisasi Target 5 Kab/Kota.
- 15) Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Program RANHAM Provinsi dan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM Kab/Kota, Target 3 Laporan dan Realisasi Target 3 Laporan.

3. Persentase Capaian Aksi HAM (Hak Asasi Manusia)

Indikator adanya Capaian Aksi HAM karena salah satu Tupoksi Biro Hukum dan HAM melaksanakan Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk diantaranya melaksanakan Pelaporan Rencana Aksi HAM Nasional Hak Asasi Manusia setiap tahunnya yang diselenggarakan oleh Kementerian HAM RI. Selain itu Pelaksanaan Rencana Aksi HAM (Ranham) mendukung Program Astha Cipta Presiden RI terkait HAM.

Penentuan Target Capaian Rencana Aksi HAM berdasarkan indikator ada beberapa aksi setiap tahunnya, yang harus dilaksanakan dan dinilai oleh Kementerian HAM RI selanjutnya disebut Capaian Rencana Aksi HAM Pemerintah Daerah Tahun N, oleh karena itu Laporan capaian aksi HAM disampaikan secara berkala oleh Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat setiap periode 4 bulanan yaitu periode B04, B08 dan B12. Capaian hasil pelaporan aksi HAM Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tahun	Periode			Rata-rata Nilai Capaian
2020	100	100	100	100
2021	88,89	75	89,14	84,34
2022	86	100	100	95,33
2023	96,88	100	100	98,96
2024	100	86,4	100	95,47

Nilai rata-rata Capaian Laporan Aksi HAM Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 2020-2024 mencapai angka 75,01% yang mengartikan bahwa rata-rata nilai capaian dalam kategori “mencapai target atau memuaskan.”

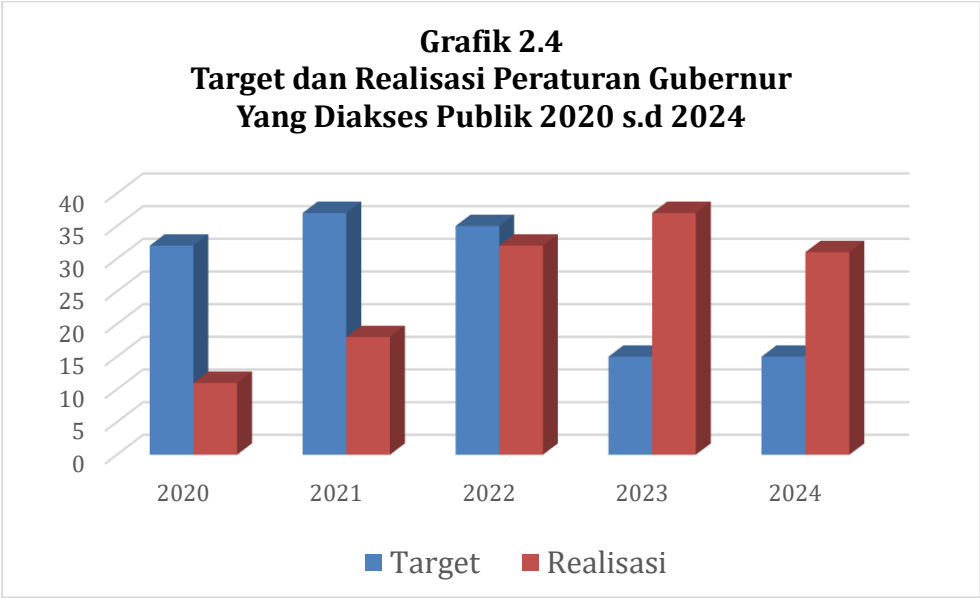
➤ **Jumlah Peraturan Daerah yang Diakses oleh Publik**

Jumlah Peraturan Daerah yang dapat diakses oleh publik pada pada Tahun 2020 target 10 (sepuluh) Peraturan Daerah terealisasi 11 (sebelas) Peraturan Daerah dengan angka persentase 1,1% sedangkan tahun 2021 target 11 (sebelas) Peraturan Daerah terealisasi 18 (delapan belas) Peraturan Daerah dengan angka persentase 1,63%, tahun 2022 target 10 (sepuluh) Peraturan Daerah realisasi 8 (delapan) Peraturan Daerah dengan angka persentase 0,8%, tahun 2023 target 13 (tiga belas) Peraturan Daerah dengan realisasi 5 (lima) Peraturan Daerah dengan angka persentase 0,38%, dan tahun 2024 target 7 (tujuh) Peraturan Daerah dengan realisasi 9 (sembilan) Peraturan Daerah, dengan angka persentase mencapai angka 1,28,% dari ke semua peraturan daerah dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website www.jdih.sumselprov.go.id. Berikut ini grafik target dan realisasi Peraturan Daerah dari tahun 2020 s.d 2024 :



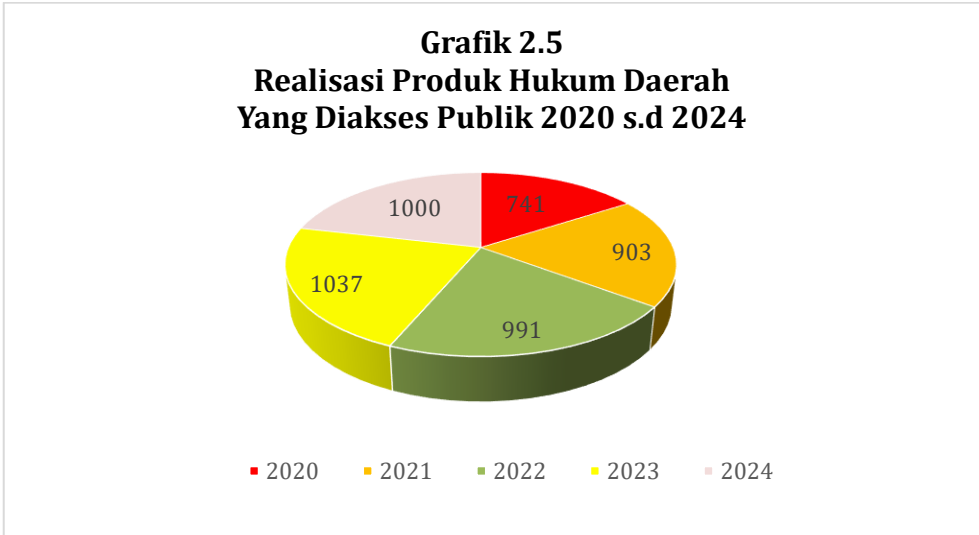
➤ **Jumlah Peraturan Gubernur yang Diakses oleh Publik**

Jumlah Peraturan Gubernur yang dapat diakses oleh publik pada pada Tahun 2020 target 32 (tiga puluh dua) Peraturan Gubernur terealisasi 11 (sebelas) Peraturan Gubernur dengan angka persentase 0,34% sedangkan tahun 2021 target 37 (tiga puluh tujuh) Peraturan Gubernur terealisasi 18 (delapan belas) Peraturan Gubernur dengan angka persentase 0,48%, tahun 2022 target 35 (tiga puluh lima) Peraturan Gubernur realisasi 32 (tiga puluh dua) Peraturan Gubernur dengan angka persentase 0,91%, tahun 2023 target 13 (tiga belas) Peraturan Gubernur dengan realisasi 37 (tiga puluh tujuh) Peraturan Gubernur dengan angka persentase 2,84% dan tahun 2024 target 15 (lima belas) Peraturan Daerah dengan realisasi 31 (tiga puluh satu) Peraturan Gubernur, dengan angka persentase mencapai angka 2,06,% dari ke semua Peraturan Gubernur dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website www.jdih.sumselprov.go.id. Berikut ini grafik target dan realisasi Peraturan Gubernur dari tahun 2020 s.d 2024 :



Capaian indikator untuk Produk Hukum Daerah pada tahun 2020 yaitu sebanyak 741 produk hukum daerah, tahun 2021 mencapai 903 produk hukum, tahun 2022 mencapai 991 produk hukum daerah, tahun 2023

sebanyak 1.037 produk hukum daerah sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 1.000 produk hukum daerah yang dapat diakses oleh publik melalui website www.jdih.sumselprov.go.id. Berikut ini grafik realisasi Produk Hukum Daerah dari tahun 2020 s.d 2024 :



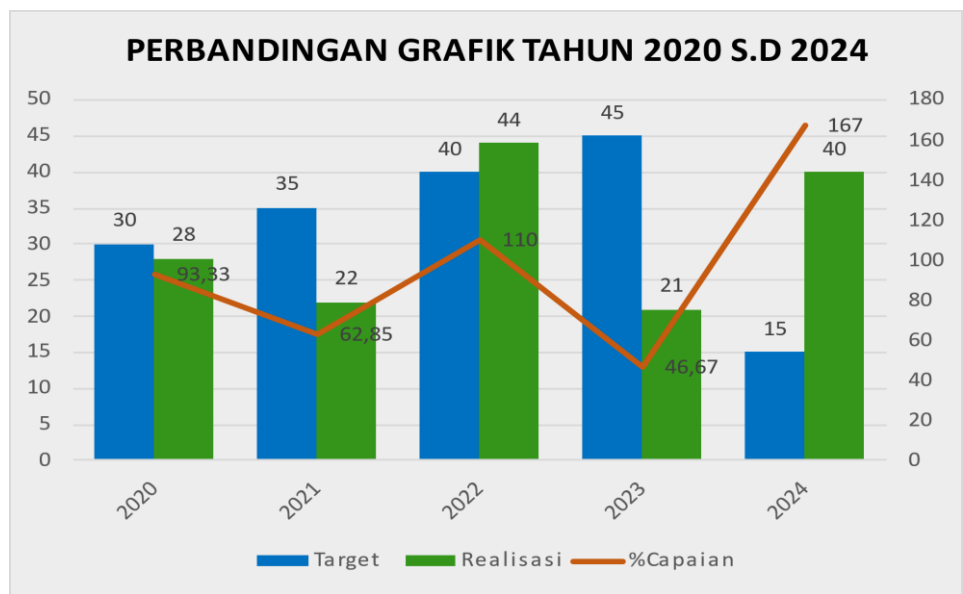
4. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kerjasama Daerah Antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMD Dan Lembaga Non Pemerintah

Pelaksanaan penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) telah berjalan dengan baik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga berkat kontribusi aktif dari Tim Kerja Sama Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta pihak-pihak lain yang terlibat sebagai mitra kerja sama Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk pencapaian hasil kinerja berupa target dan realisasi dari fasilitasi penyusunan memorandum of understanding (MoU) antara pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/swasta/BUMN/BUMD dan Lembaga Non Pemerintah bisa dilihat dari penjelasan grafik

di bawah ini beserta penjelasan hasil Mou dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Grafik 2.5



Fasilitasi penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 30 (tiga puluh) dokumen terealisasi sebanyak 28 dokumen di karenakan masih adanya pandemic *Covid-19* yang mana Pemerintah memperketat protokol kesehatan hingga menerapkan *Work From Home* (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non-Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghambat semakin meluasnya penularan *Covid-19* terutama di lingkungan perkantoran sehingga mengakibatkan proses koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lakukan secara daring/*online* dalam penyusunan *Memorandum of Understanding* (MoU), dengan rincian dokumen sebagai berikut :

1. Kesepakatan bersama tentang pelatihan keterampilan untuk warga binaan pemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan
2. Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan pengurus pusat Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (KAGAMA) tentang kerja sama pembangunan daerah.

3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Sriwijaya tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya.
4. Kesepakatan Bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pendampingan Pengelolaan Dana Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pendampingan Pengelolaan Dana Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tentang Pengamanan dalam rangka Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Disease 2019 (Covid -19) Di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penguatan Konektivitas Antar Wilayah.
8. Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis.
9. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas IBA tentang Pengembangan dan Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

10. Kesepakatan Bersama antara Pememerintan Provinsi Sumatera Selatan dengan PT.Argo Indutri Nasional tentang Optimalisasi Potensi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerjasama Pembangunan Daerah.
12. Nota kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan STKIP PGRI Lubuk Linggau tentang Peningkatan Kualifikasi Pendidikan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
13. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas PGRI Palembang tentang Peningkatan Kualifikasi Pendidikan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
14. Nota kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Muhammadiyah Palembang tentang peningkatan kualifikasi pendidikan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan
15. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Terbuka Palembang tentang Peningkatan Kualifikasi Pendidikan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
16. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT.Angkasa Pura II (Persero) tentang Sinergi Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 WORLD CUP Tahun 2021 di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II.
17. Nota kesepakatan bersama antara Pemerntah Provinsi Sumatera Selatan dan PT. ADHYA TIRTA SRIWIJAYA tentang Addendum atas Perjanjian Konsesi tanggal 13 juli 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih di Wilayah Talang Kelapa Kecamatan Sukarame.

18. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyalahgunaan Pemerintah Daerah.
19. Perjanjian Kerja Sama antar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerja Sama Perdagangan.
20. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerja Sama Perindustrian.
21. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penanaman Modal.
22. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
23. Perjanjian Kerja Sama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun.
24. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerjasama Pembangunan daerah.

Fasilitasi penyusunan memorandum of understanding (MoU) pada tahun 2021 di targetkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) dokumen terealisasi sebanyak 22 dokumen. Penyusunan draft kesepakatan bersama, nota kesepakatan, ataupun perjanjian kerja sama pada tahun 2021 belum dapat terlaksana dengan maksimal dikarenakan kondisi memasuki erapost-pandemic covid-19 yang mana penyelenggaraan pemerintahan daerah masih

beradaptasi dengan adanya New Norma, dengan rincian dokumen sebagai berikut :

1. Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi jambi dengan kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan PT. Angkasa Pura II KC Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tentang pengembangan budaya literasi masyarakat melalui layanan perpustakaan pojok baca digital (POCADI) di ruang publik Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
2. Nota kesepakatan antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerja Sama Perpustakaan, Peningkatan Gerakan Membaca dan Gerakan Literasi untuk kesejahteraan.
3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi sumatera selatan dengan pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan tentang Pemanfaatan Aplikasi Genta Informatif Wisata Andalan Yang Nyaman Dan Gempita (GIWANG) Sumsel.
4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Asosiasi Pariwisata, Akademis, Komunitas, dan media tentang GIWANG.
5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang tentang kerja sama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia bidang kesehatan.
6. Kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tentang pengelolaan, pembayaran retribusi tiket penyeberangan pelabuhan tanjung api-api-tanjung kelian.

7. Nota kesepakatan antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan kantor staf presiden tentang Pemanfaatan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi untuk Pelaksanaan Pemantauan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.
8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PATANI INDONESIA tentang kerja sama Bidang Pertanian dan Pemasaran Hasil Pertanian.
9. Kesepakatan Bersama antara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Kerja Sama tentang Pemanfaatan Layanan Pusat Data Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai Pusat Pemulihan Data.
11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Asosiasi Pariwisata, Akademisi, Komunitas, dan Media tentang Pemanfaatan Aplikasi Genta Informatif Wisata Andalan Yang Nyaman Dan Gempita (GIWANG) Sumsel.
12. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kab/Kota Se-Sumatera Selatan Tentang Pemanfaatan Aplikasi Genta Informatif Wisata Andalan Yang Nyaman Dan Gempita (GIWANG) Sumsel.
13. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Adhya Tirta Sriwijaya tentang pengelolaan Sementara Layanan Air Bersih di Wilayah Talang Kelapa Kecamatan Sukarami Kota Palembang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
14. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Prov. Sumsel.

15. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pengelolaan *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) dari PT. Pertamina Hulu Energi pada Wilayah Kerja Blok Jambi Merang di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
16. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat tentang Kerja Sama Kawasan Regional Manna-PagarAlam-Lahat (KERMAPALA).
17. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Batubara Mandiri tentang Pengelolaan Alur-Pelayaran Kelas II Sungai Lematang.
18. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Batubara Mandiri tentang Pengelolaan Alur-Pelayaran Kelas II Sungai Musi Bagian Hulu.
19. Nota Kesepahaman antara Universitas Singa perbangsa Karawang dan Pemprov Sumsel.
20. Nota Kesepahaman tentang Bentang Lahan Berkelanjutan untuk Ketahanan Penghidupan terhadap Perubahan Iklim di Indonesia antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan *International Center for Research and Agroforestry* (ICRAF).
21. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Adhya Tirta Sriwijaya tentang Pengelolaan Sementara Layanan Air Bersih di Wilayah Talang Kelapa Kecamatan Sukarami Kota Palembang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
22. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Distribusi dan Ketersediaan Pangan.

Fasilitasi penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 40 (empat puluh) dokumen terealisasi sebanyak 44 dokumen dengan rincian sebagai berikut :

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerja Sama antar Daerah.
2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Stiper Sriwigama Palembang.
3. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kantor Staf Kepresidenan tentang pemanfaatan aplikasi sistem monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan pemantauan rencana aksi daerah pengarusutamaan gender.
4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Palembang tentang pemberian bantuan hukum cuma-cumadari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Batu Bara Mandiri tentang Pengelolaan Alur Pelayaran Kelas II Sungai Musi Bagian Hulu dan Sungai Musi Bagian Lematang.
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan tentang pemberian bantuan hukum cuma-cuma dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kesepakatan Bersama antara Universitas Indo Global Mandiri dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang *Tri Dharma* Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

9. Kesepakatan Bersama antara Pemprov. Sumsel dengan PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara SMB II Palembang tentang pengembangan layanan informasi potensi peluang investasi di provinsi sumatera selatan melalui media informasi dan aplikasi *Sumsel Awareness Investment* (SAI) di ruang Publik Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
10. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Daerah dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang tentang Pengelolaan Sistem Rekam Medik Kesehatan Tahanan Terpadu di Lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Terintegrasi antar Penegak Hukum.
11. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pelaksanaan Pengamanan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (*Over Dimension* dan *Over Loading*) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
12. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengelolaan Sistem Aplikasi Pemetaan Kawasan Hutan, Perkebunan, Pertambangan, Agraria/ Pertanahan, dan Tata Ruang di Provinsi Sumatera Selatan.
13. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Komando Daerah Militer II Sriwijaya tentang Pelaksanaan Patroli Gabungan Terpadu di Provinsi Sumatera Selatan.

14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi di Daerah.
15. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Kerja Sama Antar Daerah.
16. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT.Angkasa Pura II Bandar Udara Sultan Mahmud BadaruddinII Palembang tentang Pengembangan Budaya Literasi Masyarakat melalui Layanan Perpustakaan Pojok Baca Digital (POCADI) di Ruang Publik Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
17. Kesepakatan Bersama antara Pemprov Sumsel dan Pemerintah Kabupaten PALI tentang Pengelolaan *Participating Interest* (10%) dari PT. PHE Raja Tempirai pada Wilayah Kerja Raja Pendopo di Kabupaten penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
18. Nota Kesepakatan antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Sinergitas dalam Bidang Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan di Provinsi Sumatera Selatan.
19. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik.
20. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten

Banyuasin tentang Pengelolaan *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) dari PT. Odira Energi Karang Agung pada Wilayah Kerja Blok Karang Agung di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

21. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Sriwijaya dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
22. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
23. Nota Kesepakatan antara BP2IM dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Prov. Sumsel.
24. Nota Kesepakatan antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Sinergitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan Inovasi dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi Sumatera Selatan.
25. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Sumatera Selatan tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
26. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan PT. Jasa Raharja tentang Pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Berbasis Teknologi Informasi dengan Aplikasi Sistem Pengecekan Keabsahan Kendaraan Prioritas Keamanan Masyarakat (KATPAKAM)
27. Nota Kesepakatan antara Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pendayagunaan Sistem Informasi *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kepolisian Berbasis Elektronik di Provinsi Sumatera Selatan.

28. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Tokopedia tentang Pengembangan dan pelatihan Ekonomi Digital serta Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Industri kecil Menengah (IKM) di Provinsi Sumatera Selatan.
29. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Institut Sumber Daya Dunia tentang Percepatan Pelaksanaan Restorasi, Komoditas Berkelanjutan, dan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan.
30. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Kerja Sama Pemanfaatan Aplikasi Genta Informasi Wisata Andalan yang Nyaman dan Gempita Sumatera Selatan (GIWANG SUMSEL) di Kabupaten Musi Banyuasin.
31. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sumatera Selatan tentang Peningkatan Perekonomian Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
32. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT.Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tentang layanan informasi potensi peluang investasi di Provinsi Sumatera Selatan melalui media informasi dan aplikasi *Sumsel Awareness Investment* (SAI) di ruang publik Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

33. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pelaksanaan transmigrasi di Satuan Permukiman Tempirai Selatan SP I Kawasan Transmigrasi Petata Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
34. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Pariwisata Kota Pagaralam tentang pemanfaatan Aplikasi Genta Informatif Wisata Andalan Yang Nyaman Dan Gempita (GIWANG) Sumatera Selatan.
35. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tentang Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Tempirai Selatan SP I Kawasan Transmigrasi PETATA Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
36. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Dinas Perhubungan Provinsi Aceh dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu dan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan Dinas Perhubungan Kepulauan Riau dan Dinas Perhubungan Kepulauan Bangka Belitung tentang Penertiban dan Pengendalian Kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) se-Sumatera.
37. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan UTP tentang Penyusunan Dokumen *Detail Engineering Design* (DED).

38. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dengan UPT tentang Pelaksanaan Program Pendampingan Kampung Iklim (PROKLIM).
39. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Angkasa PuraII Bandar Udara Sultan Mahdmud Badaruddin II Palembang tentang Pengembangan Budaya Literasi Masyarakat melalui Layanan Perpustakaan Pojok Baca Digital (POCADI) di Ruang Publik Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
40. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
41. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Sektor Industri di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jawa Barat.
42. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
43. Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non-PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Fasilitasi penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 45 (empat puluh lima) dokumen, terealisasi

sebanyak 21 (dua puluh satu) dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas Bandar Lampung tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan The International Center for Research in Agroforestry (ICRAF) Bentang Lahan Berkelanjutan untuk Penanganan Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan, dan Kesetaraan Gender Khususnya pada Ekosistem Gambut di Sumatera Selatan.
3. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Universitas PGRI Palembang tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan The International Center for Research in Agroforestry (ICRAF) tentang Bentang Lahan Berkelanjutan untuk Ketahanan Penghidupan terhadap Perubahan Iklim di Sumatera Selatan.
5. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum Palembang tentang Pemberian Bantuan Hukum Cuma-cuma dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Asosiasi Perempuan Indonesia tentang Pemberian Bantuan Hukum Cuma-cuma dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tentang

Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi antara Rekening Kas Umum Daerah dengan Aplikasi SIMDA-NG/Financial Management Information System (FMIS) yang terintegrasi dengan Bank Sumsel Babel dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

8. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Bantuan Hukum Geradin Baturaja tentang Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Jimmagro Inter Mulya tentang Pengembangan Inovasi Teknologi Produk Unggulan Daerah di Kawasan SSTP Sumatera Selatan.
10. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tentang Pengembangan Budaya Literasi Masyarakat melalui Layanan Perpustakaan Pojok Baca Digital (POCADI) di Ruang Publik Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Ladang Karya Husada (Toko Ladang) tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dengan Marketplace Lokal Toko Ladang di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
12. Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta.
13. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
14. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan dengan Ombudsman Republik Indonesia tentang Urusan pencegahan maladministrasi, percepatan penyelesaian laporan, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, pertukaran data dan/atau informasi tentang pelayanan publik, dan kegiatan lain yang disepakati.

15. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan tentang Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
16. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur tentang Urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah.
17. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
18. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
19. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian Wilayah III tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
20. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah.

21. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan.
22. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pemerintah kabupaten Enkerang Provinsi Sulawesi Selatan tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.

Fasilitasi penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 15 (lima belas) dokumen terealisasi sebanyak 40 dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

a. KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

1. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
2. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
3. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
4. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
5. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kota Pagaralam tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
6. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi

- Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kota Lubuklinggau tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
7. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kota Prabumulih tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
 8. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Pagaralam tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
 9. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
 10. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
 11. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
 12. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kota Palembang tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
 13. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
 14. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.

15. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
16. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
17. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
18. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tentang pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah.
19. Kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pemerintah Provinsi Lampung tentang kerja sama pengembangan perdagangan.
20. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pemerintah daerah Provinsi Lampung tentang pemberdayaan dan pengembangan sektor industri.
21. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pemerintah provinsi Sumatera Selatan tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.
22. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pemerintah kabupaten Enkerang Provinsi Sulawesi Selatan tentang kerja sama pembangunan dan pengembangan potensi daerah.

b. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

- 1.** Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan PT. Kilang Pertamina

Internasional Refinery Unit III Plaju tentang Revegetasi Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Selatan.

- 2.** Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Bukit Asam, Tbk tentang Revegetasi tentang Dukungan terhadap Program Prioritas Pembangunan dan Pengembangan Bisnis Badan Usaha Milik Daerah.
- 3.** Kesepakatan bersama antara RS Kanker Dharmas Jakarta dengan RSUP Mohammad Hoesin Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker.
- 4.** Kesepakatan bersama antara RSP Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta dan RSUP Mohammad Hoesin Palembang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Jejaring Pengampunan Pelayanan Stroke.
- 5.** Kesepakatan bersama antara RS Penyakit Infeksi Prof. Dr Sulianti Saroso dan RSUP Mohammad Hoesin Palembang dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Jejaring Pengampunan Pelayanan Penyakit Infeksi Imerging.
- 6.** Kesepakatan bersama antara RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dengan RSUP Mohammad Hoesin Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Jejaring Pengampunan Pelayanan Kardiovaskular.
- 7.** Kesepakatan bersama antara RSUP Persahabatan dengan RSUP Mohammad Hoesin Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang Jejaring Pengampunan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis.
- 8.** Kesepakatan bersama antara RS Anak dan Bunda Harapan Kita dengan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangkusumo dan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

tentang Jejaring Pengampunan Pelayanan di bidang kesehatan Ibu dan Anak.

9. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Perusahaan Umum Bulog Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tentang Pembelian dan Penyaluran Beras Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Bagian Selatan tentang Perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Sawit
11. Perjanjian Kerja Sama Tentang Perlindungan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian Bagi Pekerja Perkebunan Sawit Melalui Dana Bagi Hasil Sawit.
12. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Kerja Sama Penyiaran Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
13. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan Forum Pondok Pesantren Provinsi Sumatera Selatan tentang Penyelenggaraan Bantuan Hibah Pondok Pesantren di Provinsi Sumatera Selatan.

c. SINERGI ANTARA PEMERINTAHAN PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Nota kesepakatan antara Badan Informasi Geospasial dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data

dan informasi di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Nota kesepakatan antara Badan Informasi Geospasial dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Komando Daerah Militer II/Sriwijaya tentang kerja sama percepatan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Nota kesepakatan antara Pusat Investasi Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang sinergi pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah di provinsi sumatera selatan melalui pembiayaan ultra mikro.
4. Nota kesepahaman antara Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang penataan aset lahan kompleks perkantoran kehutanan.

5. Capaian Kinerja Makro Provinsi Sumatera Selatan

❖ Indikator Kinerja Makro

a. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Kinerja Tahun 2023 = 73,18 %

Capaian Kinerja Tahun 2024 = 73,84 %

Perubahan 0,902 %

b. Angka Kemiskinan

Capaian Kinerja Tahun 2023 = 73,18%

Capaian Kinerja Tahun 2024 = 10,97%

c. Angka Pengangguran

Capaian Kinerja Tahun 2023 = 4,11 %

Capaian Kinerja Tahun 2024 = 3,86 %

Perubahan -6,083 %

d. Pertumbuhan Ekonomi

Capaian Kinerja Tahun 2023 = 5,08 %

Capaian Kinerja Tahun 2024 = 5,03 %

Perubahan -0,984 %

e. Pendapatan Per Kapita (PDRB Per Kapita ADHB)

Capaian Kinerja Tahun 2023 = 71,96 %

Capaian Kinerja Tahun 2024 = 75,13 %

- Perubahan 4,405 %
- f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)
- Capaian Kinerja Tahun 2023 = 0,338 %
- Capaian Kinerja Tahun 2024 = 0,331 %
- Perubahan -2,071 %

6. Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

- ❖ Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi
 - a. Laju Pertumbuhan Ekonomi
 - Target Tahun 2024 = 5,74 %
 - Realisasi Tahun 2024 = 5,07 %
 - Capaian Tahun 2024 = 87,41 %
 - b. Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB
 - Target Tahun 2024 = Rp.71,67 Juta
 - Realisasi Tahun 2024 =Rp.75,13 Juta
 - Capaian Tahun 2024 = 104,83 %
 - c. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
 - Target Tahun 2024 = Indeks 6,00 %
 - Realisasi Tahun 2024 = Indeks 6,31 %
 - Capaian Tahun 2024 = Indeks 105,17 %
 - d. Indeks Entropi Theil
 - Target Tahun 2024 = Indeks 2,097 %
 - Realisasi Tahun 2024 = Indeks 2,331 %
 - Capaian Tahun 2024 = Indeks 111,16 %
- ❖ Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan
 - a. Nilai Tukar Petani
 - Target Tahun 2024 = 109,11%
 - Realisasi Tahun 2024 = 120,83%
 - Capaian Tahun 2024 = 110,74%
- ❖ Meningkatnya Ekosistem Inovasi
 - a. Indeks Ekosistem Inovasi
 - Target Tahun 2024 = Indeks 2,72%
 - Realisasi Tahun 2024 = Indeks 3,38%
 - Capaian Tahun 2024 = Indeks 124,26%

- ❖ Terkendali Laju Inflasi Daerah
 - a. Tingkat Inflasi Daerah
 - Target Tahun 2024 = 2,5±1%
 - Realisasi Tahun 2024 = 1,20%
 - Capaian Tahun 2024 = 100%
- ❖ Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan
 - a. Tingkat Kemiskinan
 - Target Tahun 2024 = 10,95%
 - Realisasi Tahun 2024 = 10,51%
 - Capaian Tahun 2024 = 104,02%
 - b. Gini Ratio
 - Target Tahun 2024 = Indeks 0,324%
 - Realisasi Tahun 2024 = Indeks 0,331%
 - Capaian Tahun 2024 = Indeks 102,16%
- ❖ Menurunnya Tingkat Pengangguran
 - a. Tingkat Pengangguran Terbuka
 - Target Tahun 2024 = 4,14%
 - Realisasi Tahun 2024 = 3,86%
 - Capaian Tahun 2024 = 106,67%
- ❖ Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
 - a. Indeks Pembangunan Manusia
 - Target Tahun 2024 = Indeks 71,63%
 - Realisasi Tahun 2024 = Indeks 73,84%
 - Capaian Tahun 2024 = Indeks 103,09%
 - b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - Target Tahun 2024 = Indeks 93,94%
 - Realisasi Tahun 2024 = Indeks 93,25%
 - Capaian Tahun 2024 = Indeks 99,27%
 - c. Indeks Pembangunan Pemuda
 - Target Tahun 2024 = Indeks 70%
 - Realisasi Tahun 2024 = Indeks 54%
 - Capaian Tahun 2024 = Indeks 77,14%

d. Prevalensi Stunting

Target Tahun 2024 = 14,3%

Realisasi Tahun 2024 = 1,20%

Capaian Tahun 2024 = 191,61%

❖ Meningkatkan Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Risiko Bencana

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Target Tahun 2024 = Indeks 71,93%

Realisasi Tahun 2024 = Indeks 72,69%

Capaian Tahun 2024 = Indeks 101,06

b. Persentase Penurunan Emisi GRK

Target Tahun 2024 = 8,04%

Realisasi Tahun 2024 = 20,20%

Capaian Tahun 2024 = 251,24%

c. Indeks Resiko Bencana Sumsel

Target Tahun 2024 = Indeks 136,53

Realisasi Tahun 2024 = Indeks 131,24

Capaian Tahun 2024 = Indeks 103,87

7. Capaian Kinerja Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Target Tahun 2024 = Indeks 75,00(BB)

Realisasi Tahun 2024 = Indeks 74,73

Capaian Tahun 2024 = Indeks 99,64%

2. Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan)

Target Tahun 2024 = Nilai 12,00

Realisasi Tahun 2024 = Nilai 10,23

Capaian Tahun 2024 = Nilai 85,25%

8. Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Target Tahun 2024 = Indeks A

Realisasi Tahun 2024 = Indeks 89,99

Capaian Tahun 2024 = Indeks 110,74

b. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Target: A (88,31) Indeks
Realisasi : A (89,99) Indeks
Capaian: A (101,90) %

9. Capaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

- Capaian Perangkat Daerah Yang Telah Menyampaikan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat: 35 Perangkat Daerah
- Capaian Perangkat Daerah yang belum menyampaikan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat : 15 Perangkat Daerah

Target : 50 OPD (Organisasi Perangkat Daerah)
Capaian : 70%

10. Hasil Rekap Perangkat Daerah (OPD)

No.	Biro	Jumlah Responden (%)	Nilai IKM (%)	Capaian Tindak Lanjut (%)
1	Pemerintahan	-	-	-
2	Hukum	-	-	-
3	Kesejahteraan Rakyat	-	-	-
4	Perekonomian	27	90,23	75
5	Administrasi Pembangunan	125	89,44	100
6	Pengadaan Barang dan Jasa	150	88,39	100
7	Organisasi	25	92,02	75
8	Umum dan Perlengkapan	30	89,91	100
9	Humas dan Protokol	25	57,31	100

11. Capaian Nilai SAKIP (Komponen Pelaporan 12)

SAKIP Sekretariat Daerah berisi laporan kinerja dan akuntabilitas, yaitu gambaran pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. LKJiP sendiri merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun fungsi sarana SAKIP yang diterapkan adalah sebagai berikut :

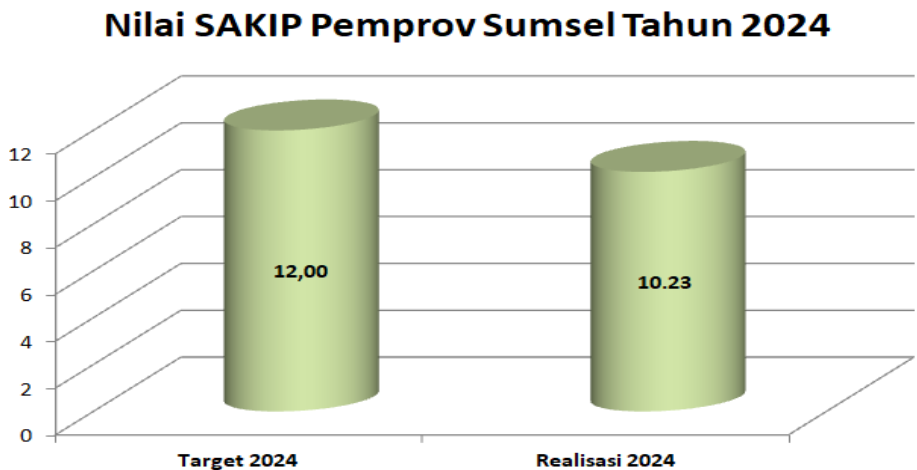
1. Sarana melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
2. Sarana meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan fungsi-fungsi manajemen modern secara taat asas.
3. Sarana pengelolaan dana dan sumber dana lainnya menjadi efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan secara terukur dan berkelanjutan.
4. Sarana mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari setiap pimpinan dalam menjalankan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.
5. Sarana penyempurnaan organisasi, kebijakan publik, sistem perencanaan dan penganggaran, ketatalaksanaan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat, mekanisme pelaporan serta pencegahan praktik-praktik KKN.
6. Sarana mendorong kreativitas, produktivitas, sensitivitas, disiplin dan tanggung jawab para pegawai dalam melaksanakan tugas/jabatan berdasarkan aturan/kebijakan, prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2024 Nilai SAKIP (komponen pelaporan) Sekretariat Daerah ditargetkan sebesar 12 Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah memperoleh komponen nilai pelaporan 10,23 Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah hampir sepenuhnya menunjukkan hasil yang baik, banyak yang harus diperbaiki dari sistem kinerja, capaian penyerapan kinerja

program dan kegiatan yang menunjang kinerja dari semua indikator kinerja dan sasaran tepat guna.

Berikut ini diagram perbandingan antara target dan realisasi capaian Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

Diagram 2.1



Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti dan memperbaiki laporan kinerja secara berkualitas sesuai dengan standar, namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Dokumen Laporan Kinerja LKJIP belum direviu secara internal.
2. Laporan Kinerja telah disusun,namun informasi yang disajikan belum menjadi perhatian utama pimpinan dan seluruh pegawai.

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja dan mewujudkan budaya kinerja langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Menyusun dokumen data kinerja, yang relevan untuk mengukur capaian kinerja serta melakukan pengukuran kinerja secara berkala (terus menerus dengan interval waktu yang relatif sama) yang dituangkan dalam Rencana Aksi atas kinerja.
2. Melakukan pengukuran kinerja yang disesuaikan dokumen

dengan aktivitas dan efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja.

3. Melakukan sosialisasi hasil pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai.
4. Melakukan reviu atas Laporan Kinerja LKjIP secara internal.
5. Memanfaatkan informasi pada laporan kinerja agar menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai.
6. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2022.
7. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, guna perbaikan perencanaan kinerja dimasa yang akan datang.

Nilai SAKIP dari sisi komponen penilaian sudah hampir memenuhi nilai target 2024 sebesar 12 dengan realisasi sebesar 10.23 tinggal 1,77 poin untuk mencapai target tapi masih perlu berupaya untuk bisa meningkatkan nilai sakip pada komponen pelaporan kinerja. Kedepannya Sekretariat Daerah berupaya untuk meningkatkan nilai SAKIP dari sisi komponen lebih baik. Upaya-upaya yang dilakukan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan nilai SAKIP tahun 2024 yaitu :

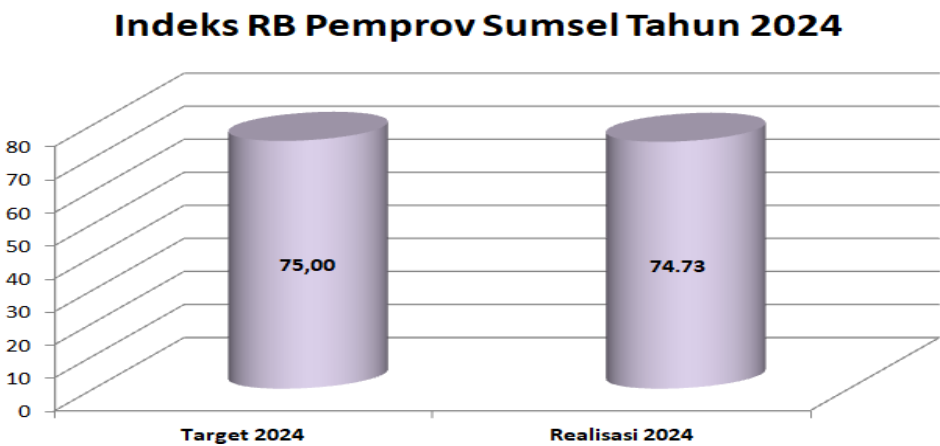
1. Melakukan Bimbingan Teknis kepada seluruh Kepala Biro untuk meningkatkan SAKIP.
2. Melakukan Bimbingan Teknis bagi petugas pengemban SAKIP.
3. Komitmen dan Ownership SAKIP, dari lebel pimpinan hingga ke level staf.
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja, penjelasan capaian kinerja secara komprehensif dan pemanfaatannya dalam pengambil kebijakan.
5. Membentuk SATGAS TIM SAKIP antara BAPPEDA, Inspektorat dan Biro Organisasi.
6. Optimalisasi system manajemen kinerja melalui dukungan teknologi (TIK).

Capaian Nilai SAKIP dari sisi komponen nilai dapat dicapai dengan adanya dukungan program penataan organisasi dengan kegiatan evaluasi dan monitoring evaluasi SAKIP serta kegiatan bimbingan teknis dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

12. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)

Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 menargetkan Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) yaitu 75,00 dengan kategori “BB” dengan realisasi yaitu 74,73 dengan kategori “BB”. Berikut ini diagram perbandingan antara target dan realisasi capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

Diagram 2.2



Peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 hasil evaluasinya “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

Hambatan yang masih dirasakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapatnya ASN yang belum paham terhadap arah kebijakan Reformasi Birokrasi.
2. Diperlukannya komitmen yang kuat seluruh ASN dan pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
3. Masih adanya belum kesesuaian antara program/kegiatan yang akan dicapai dengan indikator capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Perlu adanya rencana aksi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan BAPPEDA dan Perangkat Daerah terkait terhadap capaian Reformasi Birokrasi.
2. Menyusun dan finalisasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sambil menunggu arah kebijakan *Road Map* Nasional.

13. Capaian Indikator Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat di Fasilitas

1. Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi
 2. Pemberangkatkan Kafilah MTQ/STQ ke Tingkat Nasional.
- Daftar Penerima Hibah Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Berikut :

Tahun 2020		
Tahun 2021		
Tahun 2022		
1. BKPRMI		Rp. 8.850.000.000
2. LPTQ		Rp. 4.450.000.000
3.BAZNAS		<u>Rp. 883.000.000</u>
	Jumlah	Rp.14.233.000.000
Tahun 2023		
1. LPTQ		Rp. 4.450.000.000
2. MUI		Rp. 950.000.000
3. Muhammadiyah		<u>Rp. 500.000.000</u>
	Jumlah	Rp. 5.950.000.000

Tahun 2024		
1. BAZNAS		Rp. 600.000.000
2. BKPRMI		Rp. 2.000.000.000
3. Lembaga Pengembangan Pesparani		Rp. 500.000.000
4. Lembaga Pengembangan Pesparawi		Rp. 500.000.000
5. LPTQ		Rp. 4.600.000.000
6. MUI		Rp. 750.000.000
7. FORPESS		<u>Rp. 925.000.000</u>
	Jumlah	Rp. 9.875.000.000

Tahun 2025		
1. LPTQ		Rp. 7.000.000.000
2. BAZNAS		Rp. 500.000.000
3. Muslimat NU		Rp. 500.000.000
4. Lembaga Pengembangan Pesparawi		Rp. 500.000.000
5. MUI		<u>Rp. 500.000.000</u>
	Jumlah	Rp. 9.000.000.000

- Capaian Kegiatan MTQ/STQH Tingkat Nasional

TAHUN	TARGET	CAPAIAN
2021	Peringkat 10 Besar	Peringkat 9
2022	Peringkat 10 Besar	Peringkat 8
2023	Peringkat 10 Besar	Peringkat 3
2024	Peringkat 10 Besar	Peringkat 5

14. Capaian Indikator Kinerja Persentase Informasi Bidang Perekonomian Yang Dapat Di Akses Publik

Capaian Indikator jumlah informasi bidang perekonomian yang dapat diakses publik persentase data informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersedia pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 100% terealisasi 100% hal ini disebabkan adanya dukungan data informasi dari berbagai aspek yang telah disediakan untuk menunjang kegiatan terlaksana dengan baik. Data informasi pembangunan bidang ekonomi yang tersedia antara lain:

1. Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (100%).
2. Identifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Wilayah Sumatera Selatan (100%).
3. IdentifikasiPelaksanaanPenyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Wilayah Sumatera Selatan (100%).
4. Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera

Selatan (100%).

5. Promosi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Negeri(100%).

Dari keseluruhan data informasi yang disajikan hampir semua capaian kinerja terserap 100% dengan program perekonomian dan pembangunan yang mengarah pada 2 (dua) pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian yaitu fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro yang berorientasi kepada persentase data informasi pembangunan yang tersedia. Berikut ini Data Penyertaan Modal, Laba (Rugi), Deviden BUMD 2020-2024.

Data Penyertaan Modal, Laba, Dividen	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. PT. Bank Sumsel Babel (Perseroda)					
Penyertaan Modal	50.000.000.000	50.000.000.000	-	-	-
Laba (Rugi)	423.666.348.800	458.297.438.263	538.114.971.914	584.007.368.988	457.800.563.614
Dividen	-	56.866.949.483	71.318.740.435	91.983.475.608	80.188.171.852
2.PT.Bank Perekonomian Rakyat (Perseroda)					
Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
Laba (Rugi)	521.232.728	1.602.334.089	4.074.006.780	2.984.687.210	5.848.833.851
Dividen	-	-	-	-	-
3. PT Jamkrida Sumsel (Perseroda)					
Penyertaan Modal	40.000.000.000 dan inbreng 32.300.000.000	-	-	-	-
Laba (Rugi)	-	7.287.385.644	16.108.548.254	10.441.201.754	3.911.427.362
Dividen	-	-	3.643.692.822	8.054.274.127	5.220.600.873
4.PT.Sriwijaya Mandiri Sumsel					
Penyertaan Modal	-	16.000.000.000	-	-	-
Laba (Rugi)	(1.742.326.767)	7.997.858.101	6.338.320.459	2.897.632.318	(1.643.016.383)
Dividen	-	-	-	869.918.414	5.220.600.873
5. PT.Sumsel Energi Gemilang (Perseroda)					
Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
Laba (Rugi)	(2.526.463.269)	340.013.421	6.662.909.290	13.539.815.025	4.718.440.470
Dividen	4.738.328.468	-	-	2.300.000.000	6.769.907.513
6. PT tirta sriwijaya Maju (Perseroda)					
Penyertaan Modal	-	-	66.000.000.000	-	-
Laba (Rugi)	-	-	-	16.530.635.589	13.368.223.390
Dividen	-	-	-	3.168.015.427	3.454.902.834

7. PT. Swarna Dwipa Sumsel Gemilang					
Penyertaan Modal	-	5.000.000.000	-	-	-
Laba (Rugi)	(6.509.570.765)	(5.746.854.920)	(2.871.602.936)	(1.954.219.689)	(1.731.219.768)
Dividen	-	-	-	-	-
8. PT. Sriwijaya Agro Industri					
Penyertaan Modal	4.114.901.552	-	-	-	-
Laba (Rugi)	-	(3.784.511.411)	-	-	-
Dividen	-	-	-	-	-
9. PT. Syailendra Investasi Gemilang (Perseroda)					
Penyertaan Modal	1.000.000.000	-	-	-	-
Laba (Rugi)	-	(866.985.821)	-	-	-
Dividen	-	-	-	-	-
PT. Jakabaring Sport City					
Penyertaan Modal	9.000.000.000	15.000.000.000	-	-	-
Laba (Rugi)	(34.320.912.625)	(40.555.711.104)	(32.762.452.693)	(5.478.137.662)	(5.844.083.414)
Dividen	-	-	-	-	-
11. PD. PRODEXIM					
Penyertaan Modal	-	-	-	-	-
Laba (Rugi)	-	-	-	-	-
Dividen	-	-	-	-	-

15. Capaian Kinerja Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik
 APBD Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2020

Target Keuangan : Rp. 1.210.291.927
 Realisasi Keuangan : Rp. 1.056.892.500 (87,33%)
 Target Fisik : 100%
 Realisasi Fisik : 91,95%

Tahun 2021

Target Keuangan : Rp. 2.600.000.000
 Realisasi Keuangan : Rp. 2.317.845.877 (89,15%)
 Target Realisasi : 100%
 Realisasi Fisik : 94,34%

Tahun 2022

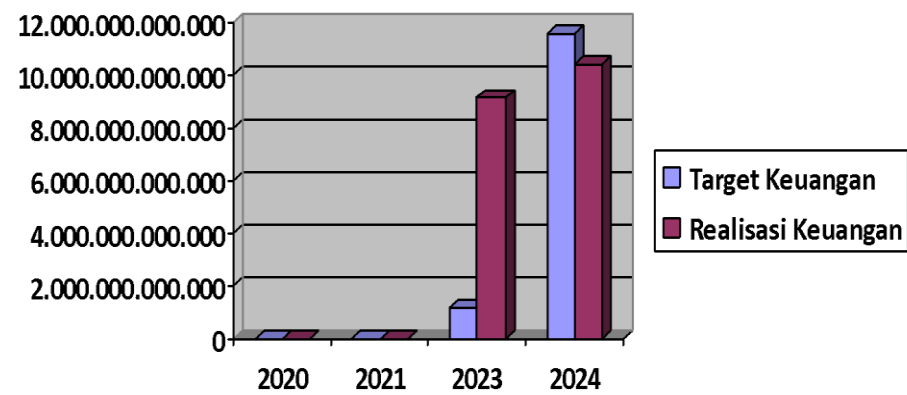
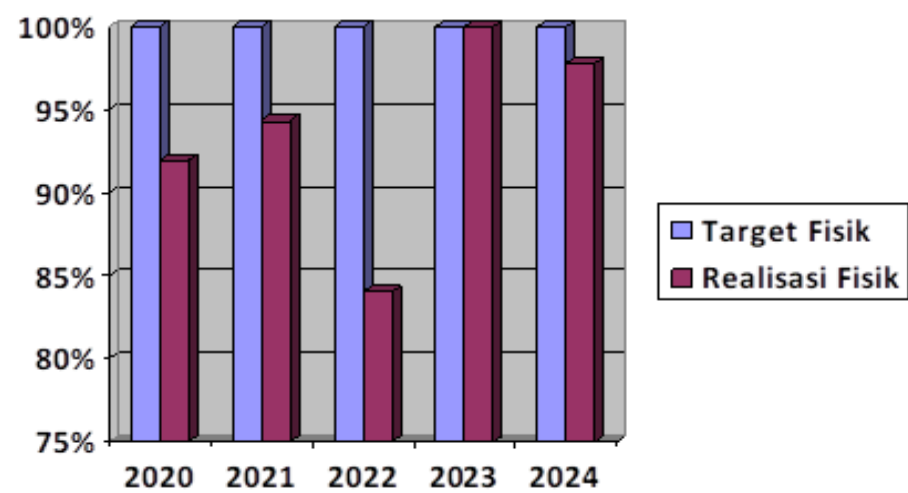
Target Keuangan : Rp. 1.948.361.750
 Realisasi Keuangan : Rp. 1.386.394.614 (71,16%)
 Target Fisik : 100%
 Realisasi Fisik : 84,00%

Tahun 2023

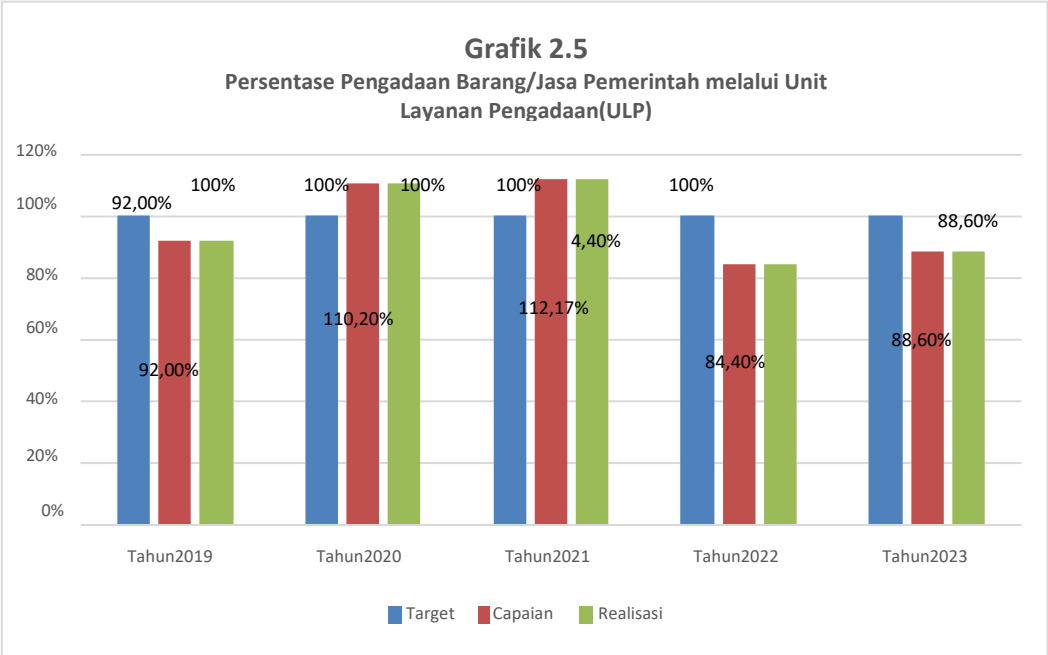
Target Keuangan	:Rp.11.496.794.185.917,5
Realisasi Keuangan	:Rp.9.128.638.662.792,41(79,40%)
Target Fisik	: 100%
Realisasi Fisik	: 100%

Tahun 2024

Target Keuangan	:Rp.11.597.662.841.485
Realisasi Keuangan	:Rp.10.410.097.190.553 (89,76%)
Target Fisik	: 100%
Realisasi Fisik	: 97,82%



16. Capaian Indikator Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)



Capaian Persentase Pengadaan Barang/Jasa dari Tahun 2020 s.d 2024. Pada Tahun 2020 adalah 500 (Lima ratus) kegiatan dan realisasinya 551 Kegiatan (Lima ratus lima puluh satu) kegiatan, jumlah tersebut mencapai angka 110,20% dari target yang ditetapkan.

Pada tahun 2021 persentase pengadaan barang/jasapemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) ditargetkan 100% dan terealisasi 134,6% atau dari 500 kegiatan terealisasi mencapai 673 kegiatan, jumlah tersebut mencapai angka yang telah ditentukan diatas 100%.

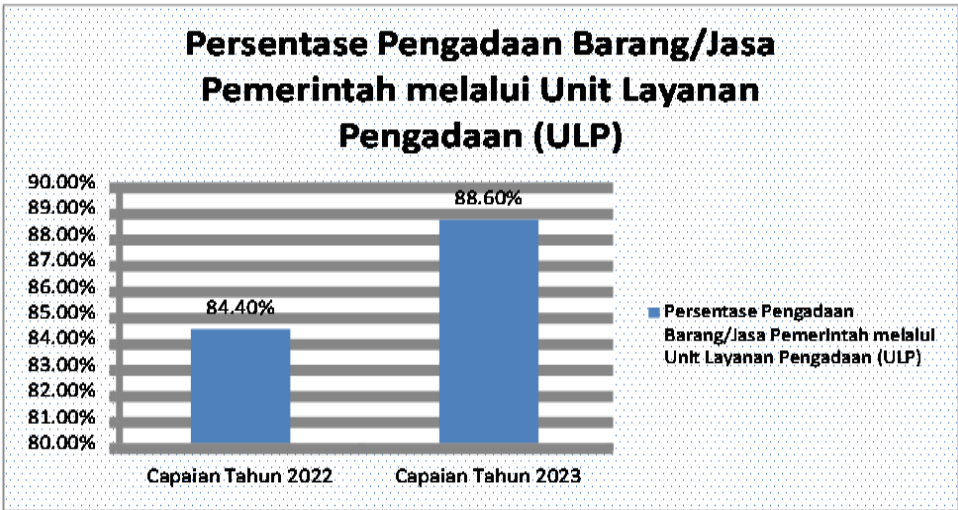
Pada tahun 2022 persentase pengadaan barang/jasapemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) ditargetkan 100% dan terealisasi 84,40% atau dari 500 kegiatan hanya terealisasi 422 kegiatan, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 27,77% di tahun 2022. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022, ada beberapa paket pada pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui *E- Purchasing* baik itu melalui E-Katalog ataupun Toko Daring (Mbizzmarket dan Bela Pengadaan).

Pada tahun 2023 persentase pengadaan barang/jasapemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) ditargetkan 100% dan terealisasi 88,60% atau dari 500 kegiatan hanya terealisasi 443 kegiatan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 4,20% dari tahun 2022. Hal ini disebabkan karena makin banyaknya paket yang sudah beralihMelalui E-Katalog local ataupun Toko Daring (Bela Pengadaan dan Mbizz market).

No.	Tahun	Target		Capaian	
		Persentase	Paket	Persentase	Paket
1	Tahun2020	100%	500	110,20%	551
2	Tahun2021	100%	500	134,6%	673
3	Tahun2022	100%	500	84,40%	422
4	Tahun2023	100%	500	88,60%	443
5	Tahun2024				

Tabel Capaian Indikator Kinerja dari Tahun 2020 s.d 2024
 Persentase Pengadaan Barang/Jasa Melalui ULP

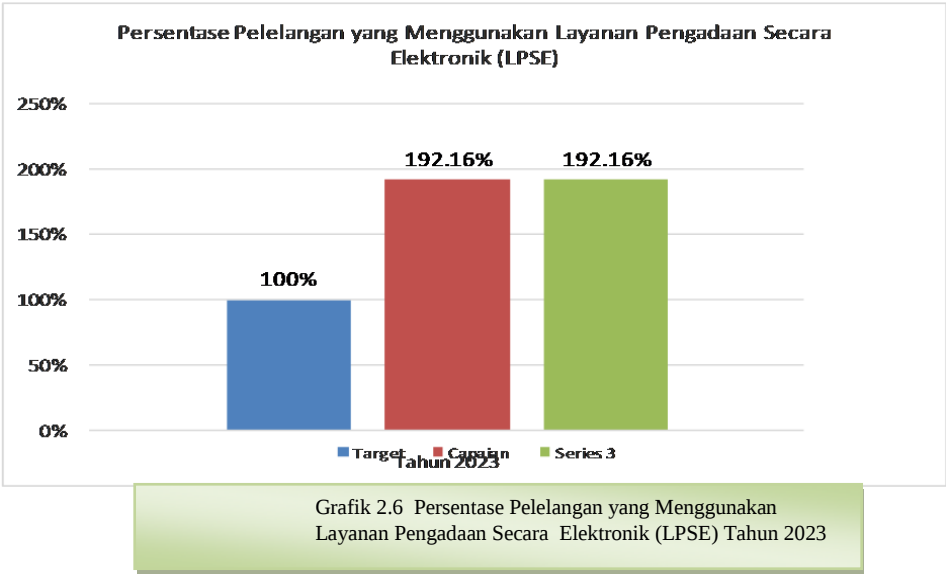
Sedangkan grafik capaian persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Dapat dilihat dari tahun 2023 Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan 4,2% dari tahun 2022, hal ini disebabkan karena ada beberapa paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui E-

Katalog lokal ataupun Toko Daring (Bela Pengadaan dan Mbizzmarket).

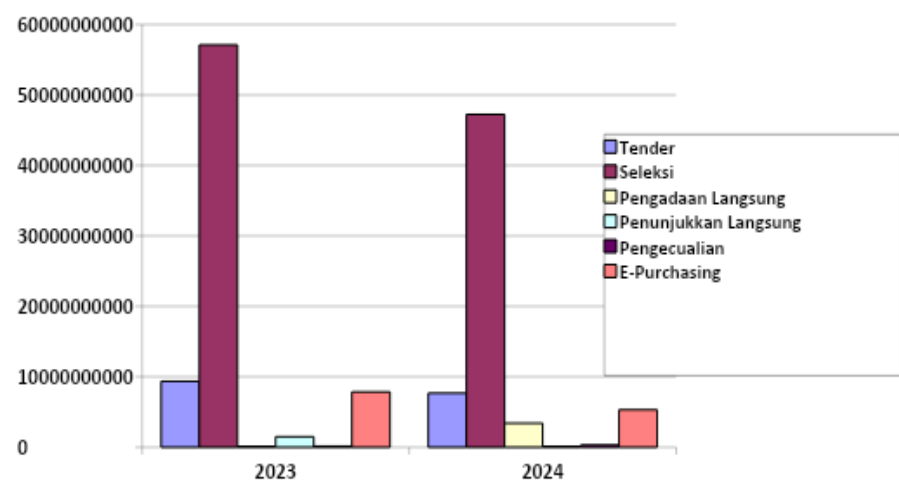
17. Persentase Pelelangan yang menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)



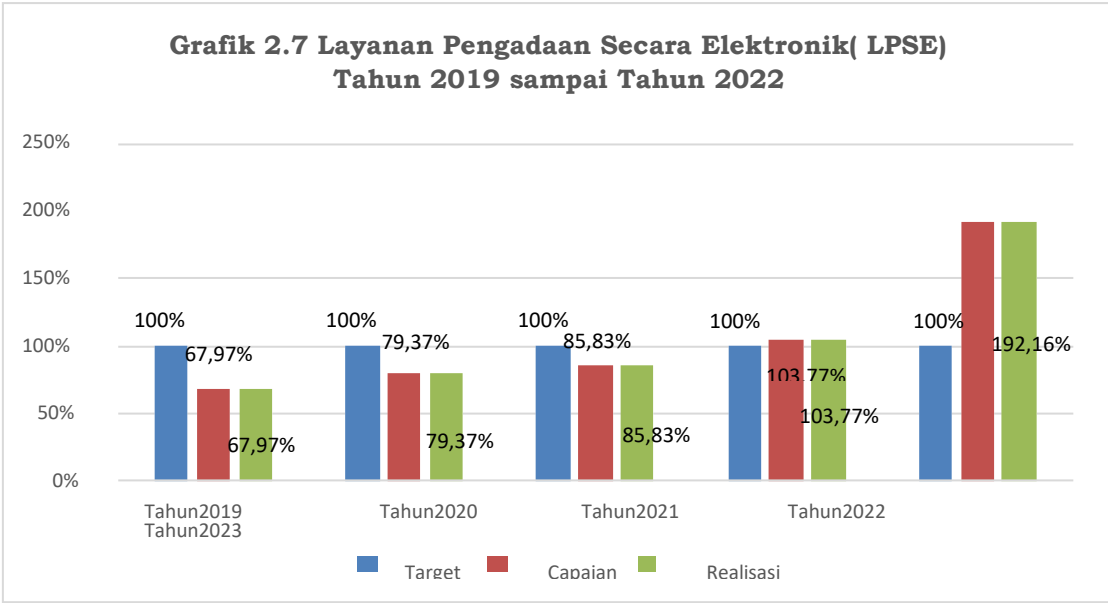
Pada tahun 2023 persentase pelelangan yang menggunakan Layanan Secara Elektronik (LPSE) ditargetkan sebesar 100% (3.000 kegiatan) dan terealisasi sebesar 192,16% (5.765 kegiatan). Semua data dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro>.

Dapat di lihat SIRUP dan Rekapitulasi Paket LPSE Report yaitu :

Paket Penyedia 2023-2024					
No.	Metode	Paket		Pagu	
		2023	2024	2023	2024
1	Tender	363	220	936.068.052.885	766.234.427.356
2	Seleksi	114	75	57.104.469.124	47.245.789.000
3	Pengadaan Langsung	109	351	11.993.992.824	34.048.444.283
4	Penunjukkan Langsung	1706	1	148.649.148.391	120.900.000
5	Pengecualian	79	1	14.589.499.400	309.000.000
6	E-Purchasing	3.394	2.432	784.751.032.390	533.301.546.425
Total		5.765	3.080	1.953.156.195.014	1.381.260.107.064



Dari grafik di bawah terlihat bahwa persentase pelelangan yang menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dari 2020-2024 terus mengalami peningkatan, sudah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100% pada tahun 2022 dan 2023. Target Pelelangan yang menggunakan LPSE pada Tahun 2019 adalah 3.000 (tiga ribu) kegiatan dan realisasinya 2.039 (dua ribu tiga ratus delapan puluh satu) kegiatan, jumlah tersebut mencapai angka 67,97% dari target yang ditetapkan. Ke semua data dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro>, agar target dapat tercapai dilakukan pelatihan dan pemahaman mengenai aplikasi SIRUP.



Pada tahun 2020 Target Pelelangan yang menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah 3.000 (tiga ribu) kegiatan dan realisasinya 2.381 Kegiatan (dua ribu tiga ratus delapan puluh satu kegiatan), jumlah tersebut mencapai angka 79,37%.

Pada tahun 2021 persentase pelelangan yang menggunakan Layanan Secara Elektronik (LPSE) ditargetkan sebesar 100% (3.000 kegiatan) tetapi hanya terealisasi sebesar 85,83% (2.575 kegiatan). Capaian kinerja terserap sebesar 85,83% disebabkan masih ada Perangkat Daerah yang belum melaporkan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada aplikasi Sirup yang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Pada tahun 2022 persentase pelelangan yang menggunakan Layanan Secara Elektronik (LPSE) telah melebihi target yang telah di tentukan yaitu sebesar 17,94 (3113 Kegiatan dengan presentase (103,77%) persen dari target yang ditetapkan sebesar 100% (3.000 kegiatan).

Pada tahun 2023 target mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 88,39 persen (5765 kegiatan dengan persentase 192,16%) dari target yang di ditetapkan 3000 kegiatan dengan persentase 100%, hal ini bisa dicapai dikarenakan telah dilakukan pembinaan pelatihan dan

pemahaman mengenai aplikasi SIRUP serta sudah mulai adanya tingkat kesadaran Perangkat Daerah untuk melaporkan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada aplikasi SIRUP yang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

No	Tahun	Target		Capaian	
		Persentase	Paket	Persentase	Paket
1	Tahun 2020	100%	3000	79,37%	2381
2	Tahun 2021	100%	3000	85,83%	2575
3	Tahun 2022	100%	3000	103,77%	3113
4	Tahun 2023	100%	3000	192,16%	5765
5	Tahun 2024	-	-	-	-

Tabel Capaian Indikator Kinerja dari Tahun 2019 s.d 2023
Persentase Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE

Untuk tahun 2024 target capaian indikator kinerja menggunakan penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang mengacu pada Surat Edaran Kepala Lemabaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai aspek indikator “Antara” dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

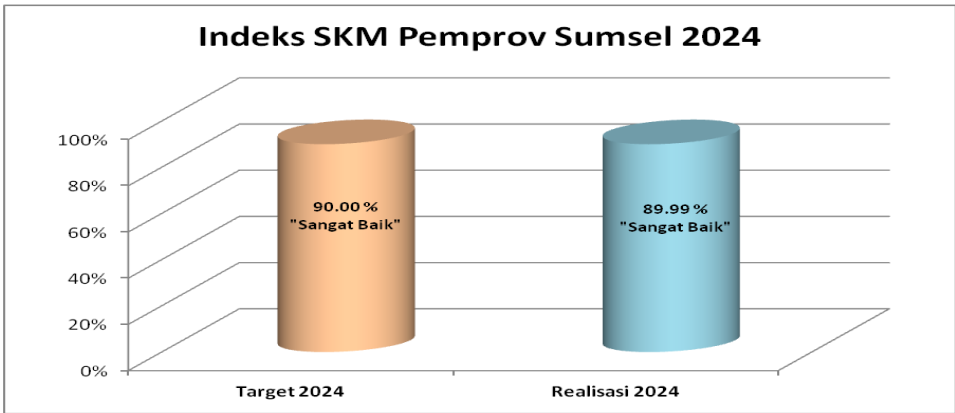
Indeks Tata Kelola Pengadaan minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan maupun dari sistem pengadaan. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target 2024 (Nilai ITKP)	Realisasi 2024 (Nilai ITKP)
1.	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	71 (Baik)	69.07 (Cukup) SIRUP : 6.10 E-tendering: 5.00 E-Katalog : 0.00 Non Tendering : 0.00 E-Kontrak : 3.90 Kualifikasi dan Kompetensi PBJ : 13.07 Tingkat Kematangan UKPBJ : 40.00

18. Capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 telah menargetkan nilai indeks kinerja SKPD/Unit pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan target “Sangat Baik” (90,00) dan realisasi “Sangat Baik” (89,99). Berikut ini diagram perbandingan antara target dan realisasi capaian Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

Diagram 2.3



Adanya program yang mendukung pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yaitu program penataan organisasi dengan kegiatan fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

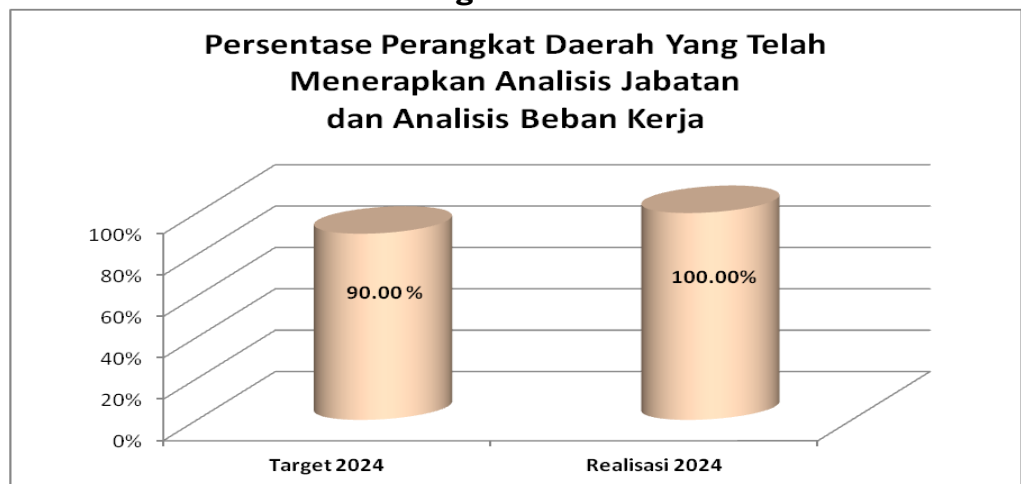
Survei Kepuasan Masyarakat dimaksud dilakukan dengan sampel 9 (sembilan) Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah;
2. Biro Hukum dan HAM;
3. Biro Kesejahteraan Rakyat;
4. Biro Perekonomian;
5. Biro Administrasi Pembangunan;
6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Biro Organisasi;
8. Biro Humas dan Protokol;
9. Biro Umum dan Perlengkapan.

19. Capaian Jumlah Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada tahun 2024 ditargetkan 90% dan terealisasi 100% sebesar (111,11%). Hal ini terdapat 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah plus 9 (Biro) dan 3 (tiga) Staf Ahli yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang harus dilakukan validasi Analisis Jabatan dan Analisi Beban Kerjanya. Berikut ini diagram perbandingan antara target dan realisasi capaian Penerapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

Diagram 2.4



Realisasi pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja tahun 2024 yang mencapai 100% hal ini terkait dengan telah diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah.

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 656 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3).

Oleh karena itu diperlukan Validasi Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang disesuaikan dengan nomenklatur susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah, adapun upaya yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi adalah sebagai berikut :

- ❖ Melaksanakan Asistensi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Simona Kemendagri bagi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- ❖ Asistensi atau pendampingan dengan cara fasilitasi (konsultasi) pada proses penyusunan Anjab dan ABK bagi Perangkat Daerah yang perlu pengarahan lebih lanjut.

20. Capaian indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal

Capaian persentase fasilitasi sarana dan prasarana yang optimal pada tahun 2023 ditargetkan 100% dan terealisasi 941%, hal ini dikarenakan waktu kegiatan yang terbatas.

Tabel 2.1 (T-C.23 PMDN 86/2017)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana yang profesional	Meningkatnya kinerja manajemen pemerintahan yang akuntabel, transparan dan dapat diakses oleh publik	Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LP PD)		ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)		ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)						
			Penyampaian LKPJ dan RLP PD Pemerintah Prov. SumSel yang tepat waktu		3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD		3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD		3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD				
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di bidang pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Pelayanan Kedinasan yang difasilitasi sesuai dengan SOP		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya koordinasi dan pelaksanaan perumusan kebijakan umum penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Pemekaran Kesamatan yang difasilitasi.		3 Kee	3 Kee	3 Kee	3 Kee		3 Kee	3 Kee	3 Kee	3 Kee		100%	100%	100%	100%	
			Jumlah Pilar Batas Daerah yang terpasang		60 Pilar	60 Pilar	60 Pilar												
2			Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Suasta/ BUM N/B UMD dan Lembaga Non Pemerintah		65 MoU	65 MoU				35 MoU					53%				
3	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana yang profesional	Meningkatnya kinerja manajemen pemerintahan yang akuntabel, transparan dan dapat diakses oleh publik	Jumlah Peraturan yang dapat diakses oleh publik		13 Pergub					8 Perda		8 Perda	8 Perda		61,54%		80%	61,54%	
			Jumlah Peraturan Gubernur yang dapat diakses oleh publik		13 Pergub					8 Pergub		32 Pergub	8 Pergub		61,54%		120%	61,54%	
			Jumlah perkara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selesai		8 Perkara					8 Perkara		9 Perkara	8 Perkara		100%		78%	100%	
4	Persentase Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi		Jumlah Kesejahteraan Rakyat yang difasilitasi		100%					100%		100%	100%		100%		100%	100%	

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang Perekonomian dan Pemukiman	Meningkatnya Koordinasi Bidang Perekonomian Daerah	Jumlah dokumen kebijakan pembinaan koperasi dan UMK M, Pertanian dan Sumber Daya Alam serta TPID																
			Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan kebijakan pembinaan LHK, serta monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Jumlah BUMD yang dikina dan dievaluasi																
6	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Jumlah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang tertangani	Jumlah dokumen informasi investasi daerah																
			Jumlah kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah																
7	Persentase Capaian Target Program Kegiatan APBD/APBN OPD Provinsi	Jumlah realisasi Kegiatan APBD/APBN	100%		100%	100%	100%	100%		100%		100%	100%		100%		100%	100%	
8	Persentase Laporan yang dikelola	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Komponen Pelaporan	Jumlah Dokumen LKIP Provinsi Sumatera Selatan		84		84	84											
		Persentase Penetapan Peraturan perundang-undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku			100%		100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
9	Persentase PD yang telah menyusun anjalo ABK	Jumlah PD yang telah membuat Anjalo ABK			85%		85%	85%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
10	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Setda Prov. Sum sel yang tertangani				100%		100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NS-PR	Target RKK	Target indikator Lainnya	Target Rencana Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	100%	100%	-	-	-	88,9%	-	-	-	-	98,0%	94,4%	-	-	-
2.	Persentase Kualitas Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	100%	100%	-	-	-	99,3%	-	-	-	-	96,1%	99,6%	-	-	-
3.	Persentase Kepuasan Aparatur	-	-	-	100%	100%	-	-	-	94,1%	-	-	-	-	96,7%	97,1%	-	-	-
4.	Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur	-	-	-	100%	100%	-	-	-	82,4%	-	-	-	-	96,7%	97,1%	-	-	-
5.	Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja PD	-	-	-	100%	100%	-	-	-	93,6%	-	-	-	-	99,7%	91,2%	-	-	-
6.	Persentase Kepuasan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketersediaan KDH/KDH	-	-	-	100%	100%	-	-	-	75,3%	-	-	-	-	96,5%	87,7%	-	-	-
7.	Program Dukungan Penguatan Peran dan Kompetensi Staf Ahli KDH dalam Mendukung Tugas dan Fungsi KDH	-	-	-	100%	100%	-	-	-	66,6%	-	-	-	-	78,8%	83,3%	-	-	-
Kepmen 050-S&S Tahun 2020 (Kegiatan)																			
Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah																			
8.	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	95,9%	92,2%	-	-	-	97,9%	96,1%	-
9.	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	96,3%	88,6%	-	-	-	98,1%	94,3%	-
10.	Persentase Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	93,0%	99,0%	-	-	-	96,5%	99,5%	-

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target KK	Target indikator Lainnya	Target Rencana Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
11	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	99,5%	97,5%	-	-	-	99,3%	99,5%	-
12	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	99,5%	97,5%	-	-	-	99,3%	99,5%	-
13	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	99,5%	94,4%	-	-	-	99,4%	97,2%	-
14	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	99,8%	99,6%	-	-	-	99,5%	99,5%	-
15	Persentase Peningkatan Penyerahan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	95,3%	96,2%	-	-	-	97,6%	97,1%	-
16	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	94,4%	99,5%	-	-	-	97,2%	99,1%	-
17	Persentase Peningkatan Fasilitas Kemahasiswaan Sekeloa Daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	99,3%	99,5%	-	-	-	99,4%	99,5%	-
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				80%	85%													
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5000 material	2000 material	-	-	-			-	-	-					
	Kegiatan Pemeliharaan dan Bahan Pembelian				20 Jenis	20 Jenis	-	-	-			-	-	-					
	Kegiatan Penyediaan Bahan Baku dan Pembelian Perundang-Undangan				20 Jenis	20 Jenis	-	-	-			-	-	-					
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis / Penerimaan				25 Orang Honorar	25 Orang Honorar	-	-	-			-	-	-					
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri				25 Kali	25 Kali	-	-	-			-	-	-					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				80%	80%	-	-	-			-	-	-					
2	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20 Jenis	20 Jenis	-	-	-			-	-	-					
	Kegiatan Penyerahan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10 Jenis	10 Jenis	-	-	-			-	-	-					
3	Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur				80%	80%	-	-	-			-	-	-					
	Kegiatan Pengadaan Pakan Dinas Bermanfaat Perlengkapannya				100 Orang/ 2 stel	100 Orang/ 2 stel	-	-	-			-	-	-					
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia				100%	100%	-	-	-			-	-	-					

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal				75 %	75%	-	-	-			-	-	-					
	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75 %	75%	-	-	-			-	-	-					
5	Program Pengembanan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				100%	100%	-	-	-			-	-	-					
	Dokumentasi dan Kliping				1000 Dokumen	1000 Dokumen	-	-	-			-	-	-					
	Penerbitan Informasi Pembangunan				5 Edisi	5 Edisi	-	-	-			-	-	-					
	Pembuatan dan Penayangan Informasi Layanan Masyarakat				3 Tema	3 Tema	-	-	-			-	-	-					
	Publikasi Media Cetak dan Media Elektronik				101 media	101 media	-	-	-			-	-	-					
	Peliputan Kunjungan Kerja K/DH/W/KDH dan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri dan Tamu Ampian				350 Kali	350 Kali	-	-	-			-	-	-					
	Pembuatan dan Penayangan Video Profil				1 Video	1 Video	-	-	-			-	-	-					
	Pengumpulan dan Penyerangan Informasi				3 Jenis Buku	3 Jenis Buku	-	-	-			-	-	-					
	Pengujian Kelembagaan PPD Pembantu SKPD				5 Jenis	5 Jenis	-	-	-			-	-	-					
	Pembinaan Kemitraan Media dan Pers				15 Kali	15 Kali	-	-	-			-	-	-					
6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/W/KDH				100%	100%	-	-	-			-	-	-					
	Penerimaan Kunjungan Kerja/Fasilitasi Tamu-Tamu Ampian				150 Kali	150 Kali	-	-	-			-	-	-					
	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				50 Kunter	50 Kunter	-	-	-			-	-	-					
	Pelaksanaan Silaturahmi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan				30 Kali	30 Kali	-	-	-			-	-	-					
	Rapat Koordinasi Bidang Keprotokolan se-Sumatera Selatan				85 Orang	85 Orang	-	-	-			-	-	-					
1	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang ditindatkan						100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	-				-	-								

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					/2020/	/2021/	/2022/	/2023/	/2024/	/2020/	/2021/	/2022/	/2023/	/2024/	/2020/	/2021/	/2022/	/2023/	/2024/
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				-	-				-	-								
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	-				-	-								
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				-	-	1 paket	1 paket	1 paket	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-	-	2 Orang	2 Orang	2 Orang	-	-	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang	-	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	-				-	-								
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	-	200 kali (dalam dan Luar Daerah)	200 kali (dalam dan Luar Daerah)	200 kali (dalam dan Luar Daerah)	-	-	200 kali (dalam dan Luar Daerah)	200 kali (dalam dan Luar Daerah)	200 kali (dalam dan Luar Daerah)	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				-	-				-	-				100%	100%	100%	100%	100%
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-	-				-	-				100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	-	10 Unit	10 Unit	10 Unit	-	-	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	-				-	-					100%	100%	100%	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	-				-	-					100%	100%	100%	100%
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-	-	25 Laporan Honorer, 10 Laporan TKPD	25 Laporan Honorer, 20 Laporan TKPD dan 5 laporan Tenaga Ahli	25 Laporan Honorer, 21 Laporan TKPD dan 5 laporan Tenaga Ahli	-	-	25 Laporan Honorer, 10 Laporan TKPD	25 Laporan Honorer, 20 Laporan TKPD dan 5 laporan Tenaga Ahli	25 Laporan Honorer, 21 Laporan TKPD dan 5 laporan Tenaga Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	-				-	-					100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2 (T-C.24 PMDN 86/2017)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Operasi	264.035.754.315,36	413.455.314.054,00	401.417.732.347,00	324.321.513.300,00	319.778.463.628,00	340.311.428.297,00	373.823.753.995,00	358.193.712.579,99	285.403.139.089,92	293.086.919.482,71	1,10	1,11	1,12	1,14	1,09	0,21	0,22
- Belanja Pegawai	107.155.622.455,36	68.573.456.000,00	76.709.576.850,00	74.278.391.000,00	75.110.948.810,00	99.657.440.868,00	63.956.835.983,00	67.523.615.376,00	65.548.547.887,00	71.228.972.718,00	1,00	1,08	1,14	1,13	1,10	-0,20	-0,29
- Belanja Barang Jasa	156.263.131.819,00	387.314.933.932,00	221.447.946.934,00	240.113.022.300,00	235.426.278.796,00	140.653.981.428,00	167.560.391.552,00	235.263.914.699,99	213.460.176.585,92	186.753.492.039,71	1,11	1,12	1,07	1,12	1,11	0,32	0,33
- Belanja Hibah	0,00	157.510.924.162,00	103.259.776.463,00	9.930.100.000,00	35.258.341.000,00		142.751.526.350,00	86.406.182.504,00	6.391.614.356,00	34.653.454.751,00	-	1,10	1,22	1,53	1,02	-0,70	-0,76
Belanja Modal	33.932.556.452,00	83.957.360.150,00	66.402.639.785,00	46.514.653.100	35.633.563.244,00	45.902.852.215,40	75.351.131.480,00	63.902.446.443,00	41.501.027.151,00	34.626.317.7854,00	1,14	1,11	1,04	1,12	1,04	-0,33	-0,26
TOTAL BELANJA	317.928.310.777,36	457.432.677.214,00	467.819.762.033,00	370.836.165.400,00	355.412.016.872,00	267.214.280.512,40	449.183.865.355,00	421.956.152.022,99	326.951.356.179,92	327.713.017.346,71	1,11	1,11	1,11	1,13	1,09	0,12	0,14

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

I. Biro Pemerintahan

- Bagian Tata Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan
- DPRD Kabupaten/Kota

II. Biro Hukum dan Hak Asasi manusia

- Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan
- Pejabat Pemerintah
- Masyarakat yang bermasalah hukum
- Organisasi Bantuan Hukum
- Lembaga / Instansi Pemerintah
- Akademisi

III. Biro Kesejahteraan Rakyat

- Masyarakat Umum
- Kelompok yang membutuhkan layanan bidang Kesehatan, Sosial dan Pendidikan
- Organisasi Kemasyarakatan di bidang keagamaan
- Melayani Bantuan Hibah organisasi keagamaan
- Memberi layanan informasi publik

IV. Biro Perekonomian

Kelompok Sasaran Biro Perekonomian Terdiri Dari :

- Bappeda
- Dinas Perdagangan Prov. Sumsel
- Kesbangpol
- BPKAD
- Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
- Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumsel
- Dinas Perindustrian Prov. Sumsel
- Dinas Perhubungan Prov. Sumsel

- Dinas ESDM Prov. Sumsel
- Dinas PU BM dan Tata Ruang Prov. Sumsel
- Dinas Sosial Prov. Sumsel
- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel
- Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel
- Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel.

V. Biro Administrasi Pembangunan

- Perangkat Daerah
- Layanan (Administratif, Koordinatif Dan Analitis)
- Tim Evaluasi Dan Pengawasan (TERPA Atau Sejenisnya)
- Unit Pelaksanaan Kegiatan/Proyek
- Penyedia Barang Dan Jasa (Kontraktor/Konsultan)
- Lembaga Pengawas (Seperti Inspektorat/Konsultan)
- Masyarakat Umum (Sebagai Penerima Manfaat Pembangunan)

VI. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

- Unit Kerja Pemerintah (Perangkat Daerah, Sekolah Dan Desa)
- Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Penyedia Barang dan Jasa
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Lembaga Pengawas (Inspektorat, BPK, KPK)
- Masyarakat Umum (Sebagai Pengguna Hasil Pengadaan)

VII. Biro Organisasi

- Perangkat Daerah
- Aparatur Sipil Negara
- Unit Pelayanan Publik (UPP)
- Tim Reformasi Birokrasi/Zona Integritas
- Pimpinan Perangkat Daerah

- Masyarakat Umum/Pengguna Layanan Publik

VIII. Biro Umum dan Perlengkapan

- Biro dilingkup Setda Prov. Sumsel
- PD dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- Organisasi kepemudaan
- Organisasi keagamaan
- Pemerintah kabupaten kota se Sumatera Selatan
- Perbankan
- Lembaga sosial kemasyarakatan
- Lembaga keuangan vertical
- Forum komunikasi perangkat daerah se-Sumatera Selatan
- BUMN / BUMD

IX. Biro Humas dan Protokol

- Pimpinan Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota Dan Wakilnya)
- Perangkat Daerah (OPD)
- Media Massa (Cetak, Elektronik Dan Online)
- Masyarakat Umum
- Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama
- Instansi Vertikal Dan Lembaga Mitra Pemerintah
- Delegasi Atau Tamu Resmi Pemerintahan
- Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah

2.1.5 Mitra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemberian Pelayanan

Sebagai unsur staf yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berperan penting dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Dalam menjalankan fungsi strategis tersebut, Setda melalui

9 Biro yang ada dalam strukturnya membangun jejaring kemitraan yang luas, baik dengan internal perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, maupun mitra non-pemerintah.

Berikut tabel mitra pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan :

No	Staf Ahli	Biro	Dinas/Badan/ Instansi Vertikal	Bentuk layanan/fasilitasi
1.	Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Prov. Sumsel	- Dinas PMD - Badan Kesbangpol - Bagian Pemerintahan Kab/Kota - Bappeda	- Koordinasi pemerintahan umum - Pembinaan otonomi daerah - Sinkronisasi penataan wilayah
		Biro Hukum dan HAM	- Seluruh OPD pengusul produk hukum - Bagian Hukum Kab/Kota - Kanwil Kemenhum - Bappeda	- Fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum - Bantuan hukum - Sinkronisasi regulasi dengan kebijakan pembangunan
		Biro Kesejahteraan Rakyat	- Dinas Pendidikan, Kesehatan, Sosial - Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan & Pariwisata - Kanwil Kemenag - Organisasi Sosial/Keagamaan	- Fasilitasi kegiatan keagamaan, sosial, budaya, kepemudaan - Dukungan koordinasi program layanan dasar publik
2.	Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan	Biro Perekonomian	- Dinas Perindag, Pertanian, Perkebunan - Dinas ESDM, Dinas Perhubungan - Bank Indonesia, OJK, BUMD	- Koordinasi stabilitas ekonomi - Fasilitasi TPID - Pengendalian harga dan distribusi logistik

		Biro Administrasi Pembangunan	- Bappeda - BPKAD - KPPN - OPD Sumsel	- Monitoring dan evaluasi pembangunan - Pelaporan realisasi fisik dan keuangan OPD terkait dana APBD dan APBN
		Biro Pengadaan Barang dan Jasa	- LKPP RI - Seluruh pengguna anggaran - UKPBJ Kab/Kota - Inspektorat - BPKAD	- Koordinasi - Pendampingan dan pembinaan pengadaan - Pengawasan proses pengadaan - Sinkronisasi anggaran pengadaan
3.	Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Biro Organisasi	- Seluruh OPD - BKD - Bappeda - KemenPAN-RB, BKN	- Pembinaan kelembagaan - Penyusunan struktur organisasi, ANJAB, ABK - Penguatan kapasitas organisasi
		Biro Umum dan Perlengkapan	- Seluruh OPD pengguna layanan perkantoran - BPKAD - BKD	- Penyediaan fasilitas, logistik, perlengkapan - Pengelolaan aset/barang - Layanan umum perkantoran dan dukungan kepegawaian
		Biro Humas dan Protokol	- Dinas Kominfo - Seluruh OPD penyelenggara kegiatan pimpinan - Media massa dan lembaga penyiaran - DPRD	- Layanan keprotokolan - Publikasi dan komunikasi publik - Dukungan hubungan media dan penyebaran informasi kebijakan pemerintah

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja

Sebagai lembaga yang mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Setda Sumsel) memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dukungan BUMD terhadap kinerja Setda Sumsel tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari kontribusi pada pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, partisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, peran dalam mendorong pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah, hingga memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi salah satu penopang utama pembiayaan pembangunan.

Aspek Dukungan	Bentuk Peran BUMD	Biro Terkait
Dukungan program/kegiatan	- Penyediaan logistik kegiatan resmi - Penyedia jasa transportasi dan akomodasi - Dukungan sponsor pada acara sosial, budaya, keagamaan	Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Kesra
Peningkatan pelayanan publik	- Inovasi layanan digital pembayaran/perizinan - Layanan publik dasar (air bersih, transportasi, energi, keuangan) berbasis teknologi	Biro Organisasi, Biro Umum dan Perlengkapan
Penguatan ekonomi daerah	- Mendorong investasi dan memperkuat rantai pasok lokal - Diversifikasi usaha sektor strategis	Biro Perekonomian
Kontribusi PAD	- Memberikan dividen dan bagi hasil kepada daerah - Menjadi sumber penerimaan pajak/retribusi	Biro Perekonomian, Biro Umum dan Perlengkapan

Kontribusi BUMD melalui dukungan program, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan struktur ekonomi daerah, dan juga terhadap PAD menjadi salah satu bentuk sinergi yang nyata dalam menunjang

pelaksanaan tugas dan fungsi Setda. Sinergi ini semakin diperkuat melalui forum koordinasi, penyelarasan rencana bisnis, dan pertukaran informasi strategis yang dikelola secara terintegrasi dengan arah kebijakan RPJMD dan sasaran Renstra Setda Sumsel.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Setda

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam memfasilitasi berbagai bentuk kerja sama daerah. Kerja sama ini menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas daerah, memperluas jaringan kemitraan, serta mempercepat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra. Tanggung jawab ini umumnya dikoordinasikan melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, namun pelaksanaannya bersifat lintas biro tergantung pada substansi kerja sama. Untuk lebih rincinya dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Jenis kerja sama	Peran Setda	Biro Penanggung Jawab	Mitra Utama
Kerja sama antar daerah (KSD)	Memfasilitasi penyusunan naskah kesepakatan bersama (MoU), koordinasi antar kepala daerah, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerja sama	Biro Pemerintahan Otonomi Daerah	Pemprov lain, Pemkab/Pemkot dalam/luar Sumsel
Kerja sama dengan pemerintah pusat	Mengoordinasikan persetujuan, harmonisasi substansi kerja sama, dan pengawalan implementasinya di tingkat daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (koordinator umum); Biro Administrasi Pembangunan (teknis)	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Pusat

Kerja sama dengan Badan Usaha (BUMN/BUMD/Swasta	Memfasilitasi proses negosiasi, telaah hukum, koordinasi dengan perangkat daerah teknis, dan persetujuan dari kepala daerah	Biro Perekonomian, Biro Pengadaan Barang/Jasa	BUMN, BUMD, Perusahaan swasta nasional/daerah
Kerja sama dengan lembaga non-pemerintah	Melakukan koordinasi lintas biro (misalnya Biro Kesra, Biro Organisasi) untuk mendukung proses administrasi dan pembiayaan kegiatan kerja sama	Biro Kesra, Biro Organisasi	Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Masyarakat, Lembaga Keagamaan

Melalui pengelolaan kerja sama yang terkoordinasi dan terintegrasi, Setda Sumsel mampu memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dijalankan benar-benar memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik. Sinergi antar pihak yang terbangun melalui kerja sama ini juga memperkuat daya dukung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

2.1 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

2.1.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel

Permasalahan dan Isu strategis merupakan dua hal yang saling berkaitan dan menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam dokumen perencanaan strategis. Permasalahan dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan (target), baik dari sisi kinerja kelembagaan, sumber daya, maupun capaian pelayanan. Sementara itu, isu strategis adalah hal-hal pokok, mendesak, berdampak besar, dan perlu segera ditangani atau ditindaklanjuti, yang berpengaruh terhadap

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah. Permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2025–2029 tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan dinamika global, arah pembangunan nasional, serta isu-isu strategis regional Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, konsultasi, fasilitasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Masih belum optimalnya kinerja Aparatur Pelaksana Kerja Sama dalam hal perencanaan dan eksekusi pelaksanaan kerja sama daerah.
- 3) Kekurangan regenerasi tokoh adat/agama; perbedaan pandangan di antara tokoh yang berpengaruh; keterbatasan dukungan fasilitas pembinaan sosial. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia (ASN), masih terdapat penempatan ASN yang belum sesuai dengan Kompetensi dan kemampuan yang dimiliki, serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam bekerja
- 4) Optimalisasi Penataan Perekonomian daerah masih belum tercapai secara maksimal akibat keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki Keahlian Sebagai Analis Ekonomi dan Masih Terkendalanya Keterlambatan Pengiriman data-ata yang dibutuhkan dari instansi terkait lainnya dalam penyusunan laporan triwulan dan laporan tahunan
- 5) Minimnya Kapasitas Regulasi dan Pengawasan Aktifitas Perekonomian dalam rangka mendorong adposisi ekonomi berkelanjutan
- 6) Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan, Akibat Kurangnya Pemahaman Para Pelaku Pengadaan
- 7) Belum Tersedianya alat ukur untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan dan peluang perbaikan untuk meningkatkan pelayanan terhadap proses Pengadaan

- Barang Jasa yang adil, Transparan dan Akuntabel
- 8) Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
 - 9) Belum Optimalnya Pelaksanaan dan Pengembangan data/Informasi Pembangunan
 - 10) Belum optimalnya pelayanan dalam fungsi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 11) Belum Optimalnya Capaian Reformasi Birokrasi
 - 12) Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perlu karena kurangnya Ketaatan Terhadap Standar Operasional Prosedur dan Budaya Kerja yang telah ditetapkan
 - 13) Belum Optimal nya Upaya Reformasi Hukum, Belum memadainya SDM di bidang regulasi dan belum optimalnya partisipasi pembentukan regulasi
 - 14) Belum optimalnya fasilitasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, administrasi kepegawaian serta Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta kualitas SDM yang belum sesuai
 - 15) Belum Optimalnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Serta Pemeliharaan kantor, yang berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan administrasi, serta belum optimalnya peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah serta kurangnya efektifitas penyampaian informasi dan pengaturan jadwal kegiatan pimpinan
 - 16) Penempatan ASN yang masih belum sesuai dengan Kompetensi dan Kemampuan yang dimilikinya.

Dengan demikian, permasalahan sekretariat daerah merupakan refleksi nyata dari tantangan global (digitalisasi, good governance, ekonomi berkelanjutan), tantangan nasional (reformasi birokrasi, integrasi data, pemerataan pembangunan), dan tantangan regional (kearifan lokal dan penguatan kelembagaan daerah) sebagaimana diuraikan dalam RPJMD 2025–2029. Hal ini memperkuat posisi Sekretariat Daerah sebagai garda

depan tata kelola pemerintahan daerah yang harus segera melakukan transformasi birokrasi, penguatan SDM, digitalisasi pelayanan, dan integrasi perencanaan untuk mendukung pencapaian visi misi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

2.1.2 Isu Strategis

Permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari arah kebijakan pembangunan nasional. Kelemahan birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta tantangan sosial dan ekonomi yang muncul di daerah, seluruhnya beririsan dengan Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029.

Sebagai bagian dari wilayah strategis Sumatera Selatan, menghadapi tantangan regional, diantaranya :

- Potensi konflik horizontal: Perbedaan kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam, pengaruh budaya luar, serta lemahnya regenerasi tokoh adat/agama menjadi faktor risiko yang perlu dimitigasi.
- Kelembagaan adat dan kearifan lokal: Sumatera Selatan memiliki basis sosial-budaya yang kuat, namun perlu diperkuat perannya dalam menjaga harmoni dan mencegah konflik sosial.
- Kapasitas tata kelola pemerintahan daerah: Masih terdapat kendala koordinasi lintas kabupaten/kota, pelaporan pembangunan yang belum optimal, serta keterbatasan dalam pengembangan data pembangunan.

Di samping itu juga, isu strategis Internal Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi :

- 1) Belum optimalnya koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pembinaan pemerintahan umum, serta rendahnya capaian Reformasi Birokrasi.
- 2) Penempatan ASN yang tidak sesuai dengan kompetensi,

keterbatasan keterampilan, serta lemahnya manajemen SDM Aparatur

- 3) Masih adanya potensi konflik sosial, lemahnya regenerasi tokoh adat/agama, dan keterbatasan fasilitas pembinaan sosial.
- 4) Belum optimalnya pelaporan dan pengendalian pembangunan, keterlambatan pengiriman data, serta lemahnya sistem informasi pembangunan.
- 5) Keterbatasan kapasitas analisis ekonomi daerah, lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi, serta belum optimalnya kerja sama daerah.
- 6) Sistem pengadaan barang/jasa belum optimal, minim pemahaman pelaku, serta belum adanya alat ukur kualitas dan akuntabilitas pengadaan.
- 7) Kurangnya efektivitas dukungan administrasi dan layanan pimpinan daerah, termasuk pemeliharaan sarpras, dokumentasi, dan penyampaian informasi kegiatan pimpinan.

Permasalahan ini memperlihatkan adanya kesenjangan kapasitas kelembagaan yang harus segera diatasi agar Sekretariat Daerah mampu menjadi penggerak reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

Semua Isu strategis di atas memiliki keterkaitan erat dengan misi pembangunan daerah :

- **Misi 2: Mewujudkan Ketahanan Ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka Ekonomi kerakyatan yang Berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat** → relevan dengan isu kapasitas ekonomi daerah, kerja sama regional, dan penguatan regulasi ekonomi berkelanjutan.
- **Misi 6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas** → relevan dengan mayoritas permasalahan Setda, termasuk reformasi birokrasi, penguatan pelayanan publik, optimalisasi

pengadaan, serta pengembangan data pembangunan

- **Misi 7: Mewujudkan kehidupan beragama, seni, dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal** → relevan dengan pengembangan toleransi kehidupan beragama.

Dengan demikian, Sekretariat Daerah memiliki peran sentral dalam mendukung pencapaian **VISI RPJMD 2025–2029: “Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”** khususnya melalui penguatan tata kelola pemerintahan, percepatan reformasi birokrasi, serta dukungan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 2.3
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Belum Optimalnya pelaksanaan koordinasi konsultasi, Fasilitasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan	Perencanaan pembangunan ramah lingkungan & partisipasi	Tata Kelola pemerintahan yang efektif dan transparan sebagai bagian dari Sustainable Development Goals (SDG 16 Peace Justice and Strong Institutions	Reformasi birokrasi peningkatan kapasitas, tata kelola pemerintahan yang efektif	Sinergi antarwilayah, koordinasi pembangunan regional konsistensi kebijakan antarprovinsi	Peningkatan efektivitas koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pelaksanaan RANHAM di Daerah, yaitu Masih lemahnya tindak lanjut OPD dalam Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM (RANHAM)	Masih lemahnya tindak lanjut OPD dalam Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM (RANHAM) Aksesibilitas atau sarana dan prasarana yang layak bagi Penyandang Disabilitas	Tidak ada keterkaitan yang relevan dengan Biro Hukum	RPJMN dan SDGs terkait HAM dan Pembangunan berkeadilan	Tidak ada keterkaitan yang relevan dengan Biro Hukum	Penguatan koordinasi dan Implementasi RANHAM lintas sektor di tingkat Provinsi
Biro Kesejahteraan Rakyat	Kekurangan regenerasi tokoh adat/agama, perbedaan pandangan di antara tokoh yang berpengaruh, keterbatasan dukungan fasilitas pembinaan sosial	Penguatan peran kelembagaan lokal, pelestarian nilai-nilai sosial budaya, peningkatan kualitas SDM berbasis kearifan lokal	Pengaruh ideologi transnasional, perubahan nilai akibat globalisasi menjadi isu intoleransi	Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pembinaan karakter serta pemajuan kebudayaan	Perubahan struktur sosial di pedesaan akibat masuknya pendatang dengan budaya yang berbeda	Memperkuat peran tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menjaga perdamaian
	Masih terdapat potensi konflik sosial akibat perbedaan kepentingan, kesenjangan pembangunan antar wilayah, pengaruh budaya luar yang dapat mengikis nilai lokal	Pelestarian adat budaya lokal, peningkatan kualitas kerukunan dan toleransi pembangunan dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal	Arus globalisasi dan modernisasi budaya serta pengaruh media digital terhadap nilai sosial menjadi isu toleransi	Pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan serta pemajuan kebudayaan	Perbedaan budaya yang memerlukan adaptasi sosial dan pemerataan pembangunan antar wilayah	Memperkuat kerukunan antar umat beragama dan melestarikan kearifan lokal serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial budaya
Biro Perekonomian	Belum optimalnya pengelolaan kebijakan perekonomian daerah yang sinergi antara hulu dan hilir	Belum optimalnya penyediaan perumusan kebijakan ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi, Inflasi, PDRB Perkapita, Investasi, Kemiskinan dan Pengangguran)	Laju pertumbuhan ekonomi yang merata	Tingkat Inflasi yang terkendali	Pengembangan Sektor Perekonomian berbasis lokal	Infrastruktur yang memadai untuk menunjang aktivitas ekonomi

	Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan perekonomian dalam merespon dinamika lingkungan strategis perekonomian global/ nasional/ regional/ lokal yang sangat VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity)	Belum optimalnya penyediaan perumusan kebijakan perekonomian yang mendasarkan sinergi data empiris yang handal (Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Pariwisata, Penanaman Modal dan Perhubungan).	-	-	-	-
	Kurang efektifnya BUMD dalam implementasi kebijakan daerah yang mendukung pengembangan ekonomi daerah.	Belum terdapat roadmap yang secara konsisten terkait penambahan penyertaan modal disetor kepada BUMD tiap tahunnya supaya tidak terjadi dilusi dan untuk pengembangan usaha.	-	Pertumbuhan ekonomi	100.000 Sultan Muda Sumsel	Kontribusi BUMD terhadap PAD
Biro Administrasi Pembangunan	Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Tidak ada keterkaitan KLHS yang relevan dengan Biro Administrasi Pembangunan	Tidak ada keterkaitan KLHS yang relevan dengan Biro Administrasi Pembangunan Secara Global	Tidak ada keterkaitan KLHS yang relevan dengan Biro Administrasi Pembangunan Secara Nasional	Tidak ada keterkaitan KLHS yang relevan dengan Biro Administrasi Pembangunan Secara Regional	Optimalisasi koordinasi antar OPD, peningkatan kualitas dan efektivitas pelaporan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Mewujudkan ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah berkelanjutan atau Suistanable Public Procurement Belum optimalnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa berkelanjutan pada Pemprov Sumsel	Belum optimalnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dengan memperbaiki sistem perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan partisipatif	Suistanable Public Procurement	Pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan dan inklusif	Rendahnya penggunaan teknologi tinggi pada industri	Menciptakan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik dan kondusif.
Biro Organisasi	Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Integrasi isu pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan kebijakan dengan memastikan organisasi dan tatalaksana birokrasi memungkinkan koordinasi antar instansi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.	Tatakelola perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan dan Sustainable Development Goals (SDGs)	Reformasi Birokrasi (efisiensi sumber daya dan "green office") dan tatakelola digital	Koordinasi lintas batas dan penataan kelembagaan	Tatalaksana Pemerintahan
	Meningkatkan jasa kelola pemerintahan yang efektif dan efisien yang mencakup Kualitas Pelayanan Publik, Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas	Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan merancang sistem akuntabilitas kinerja yang tidak hanya fokus pada target administratif, tetapi juga memasukkan indikator-indikator yang berkelanjutan.				
		Pemanfaatan teknologi dan tatalaksana digital dengan mendorong implementasi tatalaksana digital yang efisien.				

Biro Umum dan Perlengkapan	Belum optimalnya fasilitasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, administrasi kepegawaian serta belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta kualitas SDM yang belum selesai	Belum ada integrasi prinsip green building efisiensi energi dan ramah lingkungan dalam pengelolaan kantor	Kompetensi ASN perlu disesuaikan dengan perkembangan global	Road Map Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2025 dan RB tematik 2025-2029 menekankan efisiensi sarana prasarana dan kompetensi ASN serta UU ASN & manajemen Talenta Nasional menurut penempatan Asn berbasis kompetensi	Kesenjangan sarana dan prasarana antar wilayah memerlukan ebar disparitas pelayanan publik serta SDM Aparatur belum merata kualitasnya sehingga mempengaruhi pelayanan Administrasi dan koordinasi pembangunan lintas wilayah	Optimalisasi pemeliharaan kantor agar layak layanan administrasi tidak terganggu dan biaya jangka panjang efisiensi dan peningkatan kualitas SDm Aparatur melalui manajemen talenta. Pelatihan kompetensi digital dan green governance serta optimalisasi setda sebagai koordinator dalam penyediaan sarana prasarana & pengelolaan ASN lintas Biro
Biro Humas dan Protokol	Belum Optimalnya peliputan dan dokumentasi kegiatan Pimpinan Daerah serta kurangnya efektifitas penyampaian informasi dan pengaturan jadwal kegiatan pimpinan	Tidak Ada keterkaitan KLHS yang relevan dengan Biro Humas dan Protokol	Tidak Ada keterkaitan KLHS yang relevan dengan Biro Humas dan Protokol	Tidak Ada keterkaitan KLHS yang relevan dengan Biro Humas dan Protokol	Hubungan Media: Membangun Hubungan dengan Media untuk Meningkatkan Citra Pemerintah daerah dan menyebarkan informasi pembangunan daerah	Penguatan Sistem Dokumentasi dan kehumasan digital

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Setda

3.1.1 Tujuan Sekretariat Daerah

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, maka yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam visi dan misi Kepala Daerah. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Tujuan pembangunan dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan penjabaran langsung dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, Sekretariat Daerah memiliki tugas utama membantu menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintahan provinsi dan menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, tata laksana dan aparatur serta pelayanan administratif perangkat daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah tersebut, berdasarkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yaitu **“Sumsel Maju Terus Untuk Semua”** yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, maka Sekretariat Daerah memiliki tujuan strategis yaitu **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.**

Sebagai pusat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi, Sekretariat Daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh biro di dalamnya mampu menjalankan tugas secara efektif, efisien, serta akuntabel. Hal ini berarti Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berupaya membangun sistem

pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berperan penting sebagai motor penggerak birokrasi di daerah. Selain itu, penguatan koordinasi internal antar biro di lingkungan Setda juga menjadi prioritas agar fungsi kesekretariatan, administrasi pemerintahan, dan pelayanan pimpinan dapat berjalan sinergis dan terpadu.

Disamping itu juga, Sekretariat Daerah sebagai unsur pelaksana administratif utama memegang peran penting dalam menyediakan layanan administrasi yang mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu fokus utama Sekretariat Daerah adalah memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui perangkat daerah, berjalan dengan optimal. Tujuan ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyederhanaan proses birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan standar pelayanan minimal. Dengan begitu, masyarakat akan merasakan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan mereka, yang pada akhirnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

3.1.2 Sasaran Sekretariat Daerah

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, maka diperlukan arah pembangunan yang jelas melalui penetapan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra). Sasaran ini merupakan penjabaran lebih rinci dari tujuan yang ingin dicapai Sekretariat Daerah sebagai koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian kebijakan lintas sektor, serta sebagai pilar utama reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Sekretariat Daerah memiliki cakupan sasaran yang sangat luas untuk mewujudkan tujuan Renstra, tetapi di sini hanya difokuskan pada inti cakupan keseluruhan Setda saja, sehingga sasaran utama yang dimiliki Setda hanya dua sasaran meliputi: (1) meningkatnya kualitas

kebijakan Pemerintah Daerah, dan (2) meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas perangkat daerah.

Pada sasaran pertama memfokuskan pada kualitas kebijakan daerah, yang berarti kebijakan disusun berdasarkan bukti (evidence-based), responsif terhadap kebutuhan masyarakat, selaras dengan arah pembangunan daerah (RPJMD), dapat diimplementasikan oleh pelaksana teknis, dan mampu menghasilkan dampak terukur. Meningkatkan kualitas kebijakan bukan sekadar menambah jumlah regulasi, melainkan memperbaiki proses perumusan agar kebijakan lebih tepat sasaran, hemat biaya, berisiko terkendali, dan dapat dievaluasi.

Untuk sasaran ini, fokus kualitas kebijakan pada masing-masing biro berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Akan tetapi untuk pencapaian kebijakan yang berkualitas dapat dilakukan dengan cara bersama-sama melakukan: analisis masalah yang sistematis, kajian kebijakan, partisipasi publik dan multi stake-holder, sinkronisasi kebijakan, desain implementasi, dan kapabilitas teknis perumus kebijakan.

Sasaran yang kedua ini berfokus pada tata kelola dan akuntabilitas, dimana struktur pengambilan keputusan, pengendalian internal, manajemen keuangan, pengadaan, dan pelaporan kinerja berjalan transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan inspektorat. Sasaran ini menekankan pencegahan kesalahan dan penyalahgunaan, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional OPD.

Dalam mewujudkan tata kelola yang kuat, diperlukan kebijakan yang jelas, realistis dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, capaian yang akan dilakukan berfokus pada penguatan SPIP; keuangan dan pengadaan yang transparan; manajemen kinerja berbasis hasil; audit internal efektif; keterbukaan informasi publik; dan memberikan penghargaan untuk kinerja yang baik serta sanksi administrasi bagi pelanggaran tata kelola.

Sasaran ini hanya merupakan kegiatan rutin yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di



lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini, Biro Umum dan Perlengkapan berperan menyediakan sarana dan prasarana, layanan administrasi umum, dan penunjang operasional bagi pimpinan maupun seluruh perangkat daerah. Peningkatan kualitas biro ini berarti efisiensi logistik, pengelolaan aset, serta dukungan administrasi yang memperlancar roda pemerintahan.

Selain Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Humas dan Protokol juga bertugas membangun komunikasi publik, penyebarluasan informasi kebijakan, serta pengelolaan hubungan kelembagaan dan protokoler. Kualitas yang meningkat akan memperkuat citra pemerintah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dengan pemangku kepentingan.

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah yang berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 khususnya untuk prioritas Sekretariat Daerah dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Base line	TARGET TAHUN						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintahan provinsi dan menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, tata laksana dan aparatur, serta pelayanan administratif kepada Perangkat Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	BB (74,73)	BB (75-76)	BB (76-77)	BB (77-78)	BB (78-79)	BB (79-80)	BB (80-81)	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	80	80	81	82	83	84	85	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Hukum, Biro Kesra, Biro Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik	4,60	4,65	4,76	4,84	4,92	4,96	5,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Organisasi, Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Humas dan Protokol

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Setda

3.2.1 Strategi

Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks dan cepat berubah baik di tingkat Nasional maupun Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyusun strategi Renstra yang fokus pada optimalisasi sumber daya, tahapan implementasi yang terukur, penentuan fokus prioritas, serta penyusunan program dan kegiatan secara sistematis.

Strategi ini diarahkan untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), peningkatan kualitas pelayanan internal dan eksternal, serta memperkuat peran Setda sebagai motor penggerak birokrasi provinsi.

Langkah-langkah strategis Setda tersebut diantaranya :

a. Optimalisasi Sumber Daya

Sebagai penggerak utama roda birokrasi, ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus memiliki kapasitas dan karakter yang mumpuni. Oleh karena itu, strategi penguatan SDM difokuskan pada tiga aspek utama :

1) Peningkatan Kompetensi ASN

Aparatur Sipil Negara perlu terus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan agar mampu mengikuti perkembangan zaman dan dinamika tugas pemerintahan. Beberapa langkah yang dilakukan meliputi : Pelatihan Teknis (*Bimbingan Teknis*), diselenggarakan secara berkala untuk meningkatkan keahlian sesuai unit kerja masing-masing, seperti administrasi perkantoran, perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, pengarsipan, dan pelayanan publik.

Selanjutnya bagi pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan wajib mengikuti Pelatihan Kepemimpinan (*Diklat*) yang bertujuan agar para

pejabat memiliki kemampuan manajerial, pengambilan keputusan, serta ketangguhan dalam menghadapi perubahan.

Di sisi lain, literasi digital perlu diperkuat mengingat transformasi digital dalam sistem pemerintahan sudah tidak dapat dihindari, sehingga penguatan pemahaman ASN terhadap sistem informasi pemerintahan (seperti e-office, e-arsip, e-Sakip, e-Monev, e-Kinerja) harus menguasai penggunaan aplikasinya agar proses kerja lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik guna menunjang efektivitas kerja sehari-hari.

2) Penguatan Budaya Kerja

Dalam kondisi lingkungan kerja yang menuntut kolaborasi lintas bidang, budaya kerja ASN di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan harus diarahkan pada nilai-nilai kerja yang selaras dengan prinsip berAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif). Hal ini berarti setiap ASN tidak hanya bekerja secara individual, tetap mampu membangun sinergi dengan bagian lain untuk mencapai tujuan bersama.

3) Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Karier

Kondisi pengelolaan SDM di era sekarang mengharuskan adanya sistem evaluasi yang objektif, terukur, dan berkesinambungan. Evaluasi kinerja tidak hanya didasarkan pada kehadiran, tetapi lebih pada pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran kerja pegawai (SKP).

Hasil evaluasi kinerja dijadikan dasar dalam pengembangan karier, sehingga promosi jabatan maupun kesempatan mengikuti pelatihan didasarkan pada prestasi kerja, bukan semata-mata faktor senioritas. Setiap ASN dipetakan potensinya agar ditempatkan sesuai kompetensi,

dan diarahkan pada posisi yang bisa memaksimalkan kontribusinya.

b. Tahapan Implementasi Strategi

Secara umum tahapan implementasi meliputi analisis dan perencanaan, persiapan implementasi (termasuk sosialisasi dan pelatihan), pelaksanaan dan pemantauan, serta evaluasi dan tindak lanjut. Dalam hal ini, tahapan strategi Sekretariat Daerah dijalankan secara bertahap selama periode Renstra 5 (Lima) tahun dengan berfokus pada sasaran yang relevan saat ini, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis digital menuju pelayanan publik yang berkualitas.

Tahapan strategi Setda yang sesuai dengan sasaran di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

- ✓ Tahun I (tahap fondasi digital), fokusnya adalah penguatan regulasi, kelembagaan dan infrastruktur daerah.
- ✓ Tahun II (tahap integrasi layanan), berfokus pada interkoneksi sistem antar OPD dan penyederhanaan layanan.
- ✓ Tahun III (tahap optimalisasi), fokus pada perluasan akses dan efisiensi pelayanan publik.
- ✓ Tahun IV (tahap inovasi), berfokus terhadap pemanfaatan teknologi cerdas dan partisipasi publik.
- ✓ Tahun V (tahap maturitas), berfokus pada layanan publik digital yang inklusif, aman dan berkelanjutan.

Dari tahapan yang telah dijelaskan di atas, maka lebih lengkap secara detailnya akan diuraikan secara per tahun sesuai dengan periode Renstra untuk tahun yang dimulai dari 2026 hingga 2030. Untuk penjelasan penahapan pembangunan pelayanan publik berbasis digital 2026-2030 per masing-masing biro Setda, dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Sekretariat Daerah

Biro	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Regulasi percepatan digitalisasi	Integrasi layanan kependudukan, desa, pelayanan dasar ke Sumsel Satu Layanan	Dashboard monitoring Kab/Kota real time	Layanan konsultasi pemerintahan daerah berbasis digital (helpdesk daring)	Sistem pemerintahan end to end
Biro Hukum	Digitalisasi produk hukum daerah (Perda, Pergub, Kepgub)	Implementasi sistem e-harmonisasi peraturan daerah	Portal layanan informasi hukum online dan aplikasi mobile	Uji coba blockchain dokumen hukum untuk cegah pemalsuan	Layanan hukum digital cepat dan transparan
Biro Kesejahteraan Rakyat	Digitalisasi layanan hibah/bansos dan fasilitasi keagamaan	Integrasi Bansos dengan NIK dan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	Dashboard monitoring kesejahteraan rakyat untuk evaluasi	Aplikasi layanan aduan dan aspirasi masyarakat hidung kesejahteraan	Platform digital terpadu untuk pelayanan kesejahteraan masyarakat Sumsel
Biro Perekonomian	Regulasi pemanfaatan data ekonomi digital	Integrasi data ekonomi (UMKM, investasi, perdagangan, inflasi) ke portal provinsi	Dashboard ekonomi daerah berbasis Big Data	Implementasi e-marketplace daerah untuk UMKM binaan	Sistem kebijakan ekonomi digital berbasis data real time
Biro Administrasi Pembangunan	Digitalisasi dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	Integrasi sistem monitoring proyek pembangunan lintas Kab/Kota	e-Monev pembangunan (monitoring dan evaluasi digital)	Pemanfaatan GIS untuk pantau proyek fisik daerah	Sistem pembangunan digital berbasis evidence based planning
Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Digitalisasi dokumen pengadaan dan pelatihan e-procurement	Penerapan penuh sistem SPSE terintegrasi dengan LKPP	Dashboard transparansi pengadaan yang terbuka untuk publik	Implementasi e-katalog lokal Sumsel untuk UMKM lokal	Transparansi penuh pengadaan berbasis sistem digital dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi
Biro Organisasi	Menetapkan standar	Implementasi aplikasi penataan organisasi secara elektronik	Peningkatan kompetensi ASN: literasi digital, big data, keamanan siber	Penggunaan AI untuk tata laksana internal (absensi, mutasi, penilaian kinerja)	Smart organizations system yang adaptif, transparan dan terhubung dengan reformasi birokrasi digital
Biro Umum dan Perlengkapan	Digitalisasi arsip surat, inventaris barang, agenda pimpinan	Penerapan e-office dan e-di archive lingkungan Setda	Layanan administrasi umum berbasis aplikasi (logistik, kendaraan dinas, peminjaman ruangan)	Implementasi sistem paperless office	Pemanfaatan gresn ICT (hemat energi, rendah karbon)
Biro Humas dan Protokol	Digitalisasi agenda dan dokumentasi protokoler pimpinan	Portal informasi publik terintegrasi (website aplikasi)	Optimalisasi media sosial resmi dengan analitik kinerja komunikasi publik	Chatbot dan AI Humas untuk respon masyarakat 24/7	Command Center pelayanan publik digital-pusat informasi dan komunikasi terpadu

Dengan tahapan Renstra yang sistematis seperti ini, Sekretariat Daerah memastikan setiap langkah diambil secara terukur, tidak tergesa-gesa, dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya menjadi slogan, tetapi sebuah proses sistematis yang melibatkan setiap komponen organisasi, dari sumber daya manusia hingga teknologi, demi mencapai tujuan akhir; pelayanan publik yang lebih baik dan pemerintahan yang lebih efisien.

c. Fokus Strategis

Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, Sekretariat Daerah Sumatera Selatan menetapkan 3 (tiga) fokus utama yaitu :

1) Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Saat ini kondisi birokrasi Sekretariat Daerah masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih kewenangan, proses kerja yang panjang, dan koordinasi antarbagian yang belum optimal. Untuk memperkuat tata kelola OPD, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan perlu mengambil tiga langkah utama.

Pertama, melakukan reformasi birokrasi untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan melayani. Reformasi dalam hal ini juga mencakup pembenahan pola kerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan profesionalisme ASN.

Kedua, dilakukan penataan struktur dan fungsi organisasi agar lebih ramping, responsif dan sesuai dengan kebutuhan aktual pemerintahan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas antarbagian. Ketiga, dilakukan penyederhanaan proses bisnis, yaitu memangkas alur kerja yang terlalu panjang menjadi lebih ringkas, jelas dan berbasis teknologi informasi.

2) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah

Akuntabilitas kinerja dan keuangan menjadi hal yang sangat krusial di lingkungan Pemerintahan Sekretariat Daerah Sumatera Selatan, yang menuntut transparansi dan pertanggungjawaban publik. Untuk memperkuat hal tersebut, Setda Sumsel mendorong penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki keterkaitan jelas antara input, output, dan outcome.

Disamping itu juga, dilakukan audit internal dan eksternal secara berkala sebagai langkah pengawasan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari penyimpangan. Tak kalah penting, peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik juga dilakukan dengan membuka akses informasi publik secara luas, termasuk publikasi capaian kinerja dan laporan keuangan secara rutin.

3) Peningkatan Peran Strategis Sumsel di Tingkat Nasional

Saat ini, Sumatera Selatan memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan lumbung energi nasional, terus diperkuat dengan peran strategis yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah melalui peran dukungan koordinatif terhadap program strategis nasional, misalnya dengan memfasilitasi percepatan proyek-proyek prioritas yang didukung pemerintah pusat.

Selain itu, dilakukan advokasi dan komunikasi kebijakan pusat-daerah, yaitu memperkuat hubungan kelembagaan dan diplomasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan kementerian/lembaga agar kebijakan pusat selaras dengan kebutuhan daerah. Langkah lainnya adalah penguatan daya saing birokrasi di tingkat regional,

dengan meningkatkan kapasitas ASN, mempercepat pelayanan, dan membangun citra birokrasi Sumsel yang profesional dan kompetitif.

d. Penentuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terstruktur dan saling mendukung. Penentuan program dan kegiatan ini dilakukan secara terencana, dengan mempertimbangkan mandat kelembagaan, kebutuhan organisasi, serta tantangan lingkungan strategis yang dinamis.

Setiap program dirancang untuk mendukung fokus utama organisasi, kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan sebagai bentuk operasionalisasi strategi, dan dilanjutkan pada sub-kegiatan sebagai unit kerja teknis yang lebih rinci dan terukur.

Untuk mendukung pencapaian strategis tersebut, Sekretariat Daerah menetapkan :

- ✓ 8 Program Utama, antara lain :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Program Penataan Organisasi
 - Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - Program Kesejahteraan Rakyat
 - Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - Program Perekonomian dan Pembangunan
 - Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
- ✓ 30 Kegiatan Turunan, yang mencakup :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
- Fasilitasi Keprotokolan
- Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
- Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
- Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Fasilitasi Kerjasama Daerah
- Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
- Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
- Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
- Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
- Fasilitasi Bantuan Hukum

- Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- ✓ Lebih dari 100 Sub-Kegiatan, contohnya :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
- Penataan Analisis Jabatan
- Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
- Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
- Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
- Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
- Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesra Bidang Sosial
- Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
- Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
- Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
- Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.

Data lengkap mengenai program/kegiatan/sub kegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025-

2029 akan dijabarkan di Bab IV.

3.2.2 Arah Kebijakan

Dalam mewujudkan peran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai motor penggerak koordinasi, pembinaan dan pelayanan administrasi pemerintahan, diperlukan pemetaan yang jelas terhadap lokus tugas dan fungsi setiap biro yang berada di bawah Sekretariat Daerah. Lokus di sini berarti ruang lingkup tugas, fungsi, dan fokus pelayanan strategis yang menjadi tanggung jawab masing-masing biro.

Berikut tabel Lokus 9 Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Nama Biro	Lokus (Ruang Lingkup Tugas/Fokus)
1	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Tata kelola pemerintahan umum, administrasi kewilayahan, otonomi daerah, fasilitasi pilkada, hubungan antar pemerintah
2	Biro Hukum dan HAM	Penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah, penyuluhan hukum, fasilitasi perlindungan dan pemajuan HAM
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	Urusan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan kebudayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
4	Biro Perekonomian	Kebijakan ekonomi daerah, investasi, perdagangan, energi, pengelolaan sumber daya alam, serta koordinasi dunia usaha
5	Biro Administrasi Pembangunan	Perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah agar tepat sasaran dan akuntabel
6	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan sistem pengadaan, e-procurement, transparansi dan efisiensi belanja daerah
7	Biro Organisasi	Penataan organisasi perangkat daerah, analisis jabatan, tata laksanaan, reformasi birokrasi, peningkatan kinerja ASN
8	Biro Umum dan Perlengkapan	Administrasi Umum, pengelolaan aset, rumah tangga pemerintahan, sarana dan prasarana, dan pelayanan operasional
9	Biro Humas dan Protokol	Hubungan masyarakat, publikasi kebijakan, dokumentasi, komunikasi publik, serta tata protokol pimpinan daerah

Di samping itu juga, untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan sesuai ketentuan dan mencapai hasil yang terukur, maka arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan

mampu menjalankan fungsi koordinatif dan administratif secara profesional, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan nasional, sehingga berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam periode RPJMD.

Selanjutnya, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, Sekretariat Daerah merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan misi yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan
Renstra Setda

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Setda	Ket.
1.	Mengawal pengendalian inflasi daerah secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, sehingga stabilitas harga dan pasokan barang strategis dapat terjaga dan mendukung stabilitas ekonomi daerah	Peningkatan Efektivitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	1. Penguatan fungsi koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi vertikal dalam pengendalian inflasi daerah 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pendukung TPID	Misi 2; berfokus pada Biro Perekonomian Setda Prov. Sumsel

2.	Melakukan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan penyusunan roadmap transformasi digital pemerintahan	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital yang didukung oleh kualitas dan informasi	1. Penguatan koordinasi dan tata kelola implementasi SPBE di lingkungan Setda Prov. Sumsel 2. Pengembangan layanan pemerintahan digital yang terpadu dan mudah diakses	Misi 6; berfokus pada Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Administrasi pembangunan, Biro PBJ, Biro Organisasi, Biro Umum dan Perlengkapan, Biro Humas dan Protokol
3.	Menjunjung tinggi nilai budaya lokal dan mendorong kehidupan beragama yang toleran, harmonis dan inklusif	Penguatan identitas budaya dan moderasi keagamaan	1. Fasilitasi dan dukungan kegiatan seni, budaya, dan kearifan lokal 2. Pengembangan program edukasi nilai toleransi, kerukunan, dan kebhinekaan	Misi 7; berfokus pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel

Dari ketiga arah kebijakan RPJMD yaitu peningkatan efektivitas TPID, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital yang didukung oleh kualitas data dan informasi, serta penguatan identitas budaya dan moderasi keagamaan menegaskan peran strategis Setda sebagai penggerak utama koordinasi lintas perangkat daerah.

Melalui penurunan arah kebijakan tersebut ke dalam Renstra Setda, diharapkan :

- ✓ Stabilitas ekonomi daerah terjaga melalui penguatan peran TPID dalam pengendalian inflasi secara terkoordinasi, berbasis data, dan responsif terhadap gejolak harga.

- ✓ Kualitas tata kelola pemerintahan meningkat melalui percepatan transformasi digital, integrasi data dan informasi, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam budaya kerja digital.
- ✓ Kehidupan sosial masyarakat semakin harmonis melalui pelestarian budaya lokal, penguatan nilai toleransi, dan pembinaan moderasi beragama secara kolaboratif.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, Sekretariat Daerah melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi, serta memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Seluruh program dan kegiatan ini berfungsi

sebagai instrumen operasional dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintahan, mendukung koordinasi pembangunan lintas sektor, serta menunjang pelayanan administrasi pemerintahan yang efisien dan transparan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan program yang akan dikelola selama 5 (lima) tahun mendatang yaitu Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 mengacu kepada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya dalam periode waktu tersebut.

Selain itu, Renstra yang disusun juga akan menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Pemilihan kegiatan dari program prioritas tersebut dilaksanakan berdasarkan strategi dan kebijakan dalam mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan.

Data lengkap mengenai program/kegiatan/subkegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 2025-2029 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi dan menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, tata laksana, dan aparatur serta pelayanan administratif kepada perangkat daerah.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien.				Indek Reformasi Birokrasi		
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah			Indeks Kualitas Kebijakan		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		1. Efektifitas Kerjasama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
				Tersusunnya dokumen kebijakan pemerintahan daerah yang berkualitas	Persentase pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilaksanakan	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan	Pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi hasil pelaksanaan pemerintahan umum	Fasilitasi Pelaksanaan pemerintahan umum	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan wilayah	Fasilitasi penataan wilayah	
					Persentase pelaksanaan otonomi daerah yang difasilitasi	Pelaksanaan Otonomi Daerah	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD	

					Jumlah dokumen hasil pengembangan otonomi dan penataan urusan yang dilaksanakan	Pengembangan otonomi dan penataan urusan	
					Jumlah laporan hasil evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan	
					Persentase peningkatan MoU yang difasilitasi	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah kerja sama antar pemerintah yang difasilitasi	Fasilitasi kerja sama antar pemerintah	
					Jumlah kerja sama badan usaha/swasta yang difasilitasi	Fasilitasi kerja sama badan usaha/swasta	
					Jumlah kerja sama yang dievaluasi	Evaluasi pelaksanaan kerja sama	
			Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang Dihasilkan		Persentase produk hukum yang dihasilkan	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum dan HAM
				Tersusunnya produk hukum daerah yang sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan	Persentase penetapan peraturan perundang-undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku	Fasilitasi Penyusunan dan Perundang-Undangan	
					Jumlah produk hukum pengaturan yang disusun	Fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan	
					Jumlah produk hukum penetapan yang disusun	Fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan	
					Jumlah produk hukum yang didokumentasi dan dikelola informasi hukumnya	Pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya	
					Jumlah produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi	Fasilitasi dan evaluasi produk hukum kab/kota	

					Persentase bantuan hukum yang difasilitasi	Fasilitasi Bantuan Hukum	
					Jumlah masalah hukum yang diselesaikan	Fasilitasi penyelesaian masalah hukum	
					Jumlah masalah non litigasi dan HAM yang diselesaikan	Fasilitasi penyelesaian masalah non litigasi dan HAM	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
				Tersusunnya dokumen kebijakan dan regulasi di bidang kesejahteraan rakyat	Persentase fasilitasi pembinaan mental spritual	Fasilitasi pembinaan mental spritual	
					Jumlah sarana dan prasarana spiritual yang dikelola	Pengelolaan sarana dan prasarana spiritual	
					Jumlah lembaga bina spiritual yang difasilitasi	Fasilitasi kelembagaan bina spiritual	
					Persentase fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan	Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesehatan	Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesehatan	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang sosial	Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang sosial	

					Persentase fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan perhubungan	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan perhubungan	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengeloaan Perekonomian dan Pembangunan		Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Biro Perekonomian
				Tersusunnya dokumen kebijakan perekonomian dan pembangunan yang selaras dengan RPJMD	Persentase data informasi pembangunan ekonomi yang tersedia	Pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian	

					Jumlah dokumen hasil pengelolaan kebijakan ekonomi makro	Fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan kebijakan ekonomi mikro	Fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro	
					Persentase koordinasi sektor sumber daya alam yang terselenggara dengan baik	Pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	
					Persentase BUMD yang memberikan kontribusi kepada PAD	Pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD jasa keuangan dan aneka usaha	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah jasa keuangan dan aneka usaha	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi	

					Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BLUD	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BLUD	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan		Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Biro Administrasi Pembangunan
				Tersusunnya dokumen kebijakan administrasi pembangunan yang sesuai dengan standar perencanaan dan regulasi nasional maupun daerah	Persentase peningkatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	
					Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	
					Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah	Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah	
					Persentase peningkatan pelaporan administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	

					Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang disediakan	Analisis capaian kinerja pembangunan daerah	
					Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	Fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	
		Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Perangkat Daerah			Indeks Pelayanan Publik		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
				Tersedianya layanan pendampingan dan fasilitasi bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	
					Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	Pengelolaan Strategi pengadaan barang dan jasa	
					Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	
					Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	
					Persentase pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	
					Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	Pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	

					Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	Pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	
					Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	Pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	
					Persentase pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	
					Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	Pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	
					Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	Pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	
					Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	Pendampingan, konsultasi, dan/atau Bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah		Indeks Kematangan Organisasi	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
				Terlaksananya implementasi reformasi birokrasi	Persentase peningkatan fasilitas kelembagaan dan analisis jabatan	Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan Provinsi	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota	Fasilitasi penataan kelembagaan Kabupaten/kota	

					Jumlah dokumen hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan	Penataan analisis jabatan	
					Persentase peningkatan fasilitas reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja	Fasilitasi Reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja	
					Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi	Pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi	
					Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja	Monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja	
					Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan budaya kerja	Evaluasi pelaksanaan budaya kerja	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan tata laksana pemerintahan	Pengelolaan tata laksana pemerintahan	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik	Fasilitasi peningkatan pelayanan publik	
			Meningkatnya Pelayanan Publik		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Biro Umum dan Perlengkapan
				Tersedianya kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Persentase peningkatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

					Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Persentase Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	
					Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

					Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
					Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Alat besar yang disediakan	Pengadaan Alat Besar	
					Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah unit sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

					Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah mebel dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

					Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah orang yang mengikuti Medical Chek Up KDH dan WKDH	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH yang disediakan	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Persentase Peningkatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	

			Meningkatnya Pelayanan Publik		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Biro Humas dan Protokol
				Tersedianya Inovasi Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Kegiatan Materi dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Dokumen Materi Pimpinan Yang Disiapkan	Sub Penyiapan Materi pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Sub Fasilitas Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Sub Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	
					Persentase Peningkatan Fasilitas Keprotokolan	Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Sub Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Sub Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Sub Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah ke depan bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan. Apabila dilihat dari nilai anggaran, maka terdapat peningkatan anggaran dari tahun ke tahun. Peningkatan ini diharapkan mampu membantu pencapaian target yang telah ditetapkan dalam program-program yang telah disusun, sehingga peningkatan anggaran akan diiringi dengan peningkatan kinerja.

Dalam rangka menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terstruktur dan saling mendukung. Penentuan program dan kegiatan ini dilakukan secara terencana, dengan mempertimbangkan mandat kelembagaan, kebutuhan organisasi, serta tantangan lingkungan strategis yang dinamis.

Setiap program dirancang untuk mendukung fokus utama organisasi, kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan sebagai bentuk operasionalisasi strategi, dan dilanjutkan pada sub-kegiatan sebagai unit kerja teknis yang lebih rinci dan terukur.

Untuk uraian lengkap mengenai rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2025-2030 yang mengacu pada 12 Program Strategis HDCU dan Program Strategis Nasional (ProSN), disajikan pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCO ME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024													KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																
Sekretariat Daerah																
1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah																
Program Penunjang UrusanPemerintah Daerah Provinsi	Prosentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	1,548,386,577	90%	871,078,016	90%	760,084,000	90%	783,067,511	90%	814,749,742	90%	857,469,629	90%	912,580,313		
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dilaksanakan	161,760,000		135,480,000		192,480,000		156,840,000		156,840,000		156,840,000		156,840,000		
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161,760,000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	135,480,000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	192,480,000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	156,840,000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	156,840,000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	156,840,000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	156,840,000		
	Jumlah Honorarium KPA selama 12 (dua belas) bulan	41,040,000	1 (satu) Orang KPA	31,080,000	1 (satu) Orang KPA	57,240,000	1 (satu) Orang KPA	57,240,000	1 (satu) Orang KPA	57,240,000	1 (satu) Orang KPA	57,240,000	1 (satu) Orang KPA	57,240,000		
	Jumlah Honorarium PPTK selama 12 (dua belas) bulan	120,720,000	5 (lima) Orang PPTK	104,400,000	5 (lima) Orang PPTK	135,240,000	5 (lima) Orang PPTK	99,600,000	5 (lima) Orang PPTK	99,600,000	5 (lima) Orang PPTK	99,600,000	5 (lima) Orang PPTK	99,600,000		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Daerah	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data Statistik Daerah						1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah						1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fomal	-	-	-	-	-	-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	-		
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	-	1 (satu) Orang	20,000,000	1 (satu) Orang	20,000,000	1 (satu) Orang	20,000,000	-	-		
	Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	-	1 (satu) Orang	20,000,000	1 (satu) Orang	20,000,000	1 (satu) Orang	20,000,000	-	-		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	547,398,577		260,000,000		260,492,000		399,115,511		490,797,742		383,517,629		510,000,000		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	15,080,000	32 (tiga puluh dua) item	10,000,000	18 (tiga puluh dua) item	10,000,000	18 (tiga puluh dua) item	10,000,000	18 (tiga puluh dua) item	10,000,000	18 (tiga puluh dua) item	10,000,000	18 (tiga puluh dua) item	10,000,000		
	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang tersedia	15,080,000	32 (tiga puluh dua) item	10,000,000	18 (tiga puluh dua) item	10,000,000	18 (tiga puluh dua) item	10,000,000	18 (tiga puluh dua) item	10,000,000	18 (tiga puluh dua) item	10,000,000	18 (tiga puluh dua) item	10,000,000		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	532,318,577	40 Kali	250,000,000	40 Kali	250,492,000	60 Kali	389,115,511	75 Kali	480,797,742	81 Kali	373,517,629	81 Kali	500,000,000		
	Jumlah Perjalanan Dinas yang Dilaksanakan	532,318,577	40 Kali	250,000,000	40 Kali	250,492,000	60 Kali	389,115,511	75 Kali	480,797,742	81 Kali	373,517,629	81 Kali	500,000,000		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	-	-	-	-	160,000,000	-	60,000,000	-	-	-	150,000,000	-	98,628,313		

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan yang tersedia	-		-				60,000,000		-		-		98,628,313		
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Mobil (R4)	-	Unit	-		-		-	-	-	-	-	-	-		
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Motorl (R2)	-	Unit	-		2 Unit	60,000,000	-	-	-	-	2 Unit	98,628,313			
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang disediakan	-		-		160,000,000	Unit	-	Unit	-		150,000,000	-	-		
	Jumlah Komputer, Printer , Laptop yang tersedia	-			6 (enam) unit komputer, 6 (enam) unit printer, 6 (enam) unit laptop	160,000,000		-			3 (tiga) unit komputer, 3 (tiga) unit printer, 3 (tiga) unit laptop	150,000,000				
Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Pelayanan Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	839,228,000.00		475,598,016		147,112,000		97,112,000		97,112,000		97,112,000		97,112,000		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Kantor Yang disediakan	839,228,000	29 Orang	475,598,016	4 Orang	147,112,000	4 Orang	97,112,000	4 Orang	97,112,000	4 Orang	97,112,000	4 Orang	97,112,000		
	Jumlah Orang Tenaga Administrasi Pelayanan Umum Kantor	839,228,000	29 Orang	475,598,016	4 Orang	147,112,000	4 Orang	97,112,000	4 Orang	97,112,000	4 Orang	97,112,000	4 Orang	97,112,000		
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pembangunan Bidang Urusan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Yang difasilitasi dan dikoordinasikan	22,362,646,423	90%	63,998,707,550	90%	89,087,147,507	90%	5,191,299,952	90%	5,230,839,314	90%	5,271,168,917	90%	5,271,168,912		
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Prosentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Yang Dilaksanakan	1,250,000,000		902,768,000		1,700,000,000		2,591,299,952		2,150,000,000		2,000,000,000		2,000,000,000		
Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	650,000,000	77 (tujuh puluh tujuh) Dokumen	443,600,000	77 (tujuh puluh tujuh) Dokumen	500,000,000	67 (enam puluh tujuh) Dokumen	900,000,000	67 (enam puluh tujuh) Dokumen	900,000,000	67 (enam puluh tujuh) Dokumen	750,000,000	67 (enam puluh tujuh) Dokumen	750,000,000		
	Jumlah Kecamatan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	430,000,000	75 Kecamatan	221,800,000	75 Kecamatan	250,000,000	65 Kecamatan	300,000,000	65 Kecamatan	300,000,000	65 Kecamatan	250,000,000	65 Kecamatan	250,000,000		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan	220,000,000	1 (satu) Laporan	221,800,000	1 (satu) Laporan	250,000,000	1 (satu) Laporan	300,000,000	1 (satu) Laporan	300,000,000	1 (satu) Laporan	250,000,000	1 (satu) Laporan	250,000,000		
	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	-	1 (satu) Laporan	-	1 (satu) Laporan	-	1 (satu) Laporan	300,000,000	1 (satu) Laporan	300,000,000	1 (satu) Laporan	250,000,000	1 (satu) Laporan	250,000,000		
Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Daerah	600,000,000	322 Dokumen	459,168,000	322 Dokumen	1,200,000,000	322 Dokumen	1,691,299,952	322 Dokumen	1,250,000,000	322 Dokumen	1,250,000,000	322 Dokumen	1,250,000,000		
	Jumlah Pembentukan Pemekaran Kecamatan yg di fasilitasi	50,000,000	2 Kecamatan	81,370,000	2 Kecamatan	200,000,000	2 Kecamatan	400,000,000	2 Kecamatan	300,000,000	2 Kecamatan	300,000,000	2 Kecamatan	300,000,000		
	Jumlah Penyelesaian Batas Wilayah yang difasilitasi	200,000,000	5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan Batas dan Rekon struksi Batas	143,665,000	5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan Batas dan Rekon struksi Batas	500,000,000	5 Batas Bermasalah, 5 Pelacakan Batas dan Rekon struksi Batas	441,299,952	4 Batas Bermasalah, 4 Pelacakan Batas dan Rekon struksi Batas	300,000,000	4 Batas Bermasalah, 4 Pelacakan Batas dan Rekon struksi Batas	300,000,000	4 Batas Bermasalah, 4 Pelacakan Batas dan Rekon struksi Batas	300,000,000		
	Jumlah Lokasi Penamaan Rupa Bumi yang teridentifikasi	150,000,000	3 Lokasi	81,944,000	3 Lokasi	300,000,000	3 Lokasi	400,000,000	2 Lokasi	350,000,000	2 Lokasi	350,000,000	2 Lokasi	350,000,000		
	Jumlah Pilar Permanen yang terpasang	200,000,000	10 Pilar	152,189,000	10 Pilar	200,000,000	10 Pilar	450,000,000	8 Pilar	300,000,000	8 Pilar	300,000,000	8 Pilar	300,000,000		
Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Prosentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Difasilitasi	2,751,232,000		2,585,939,550		1,700,000,000		1,900,000,000		2,280,839,314		2,471,168,917		2,471,168,912		
Sub Kegiatan Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1,050,000,000	100 Dokumen	1,586,699,550	100 Dokumen	550,000,000	106 Dokumen	700,000,000	114 Dokumen	880,839,314	120 Dokumen	1,100,000,000	120 Dokumen	1,100,000,000		
	Jumlah Dokumen Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang terverifikasi	340,600,000	30 Dokumen	160,000,000	30 Dokumen	150,000,000	32 Dokumen	200,000,000	30 Dokumen	280,839,314	36 Dokumen	300,000,000	36 Dokumen	300,000,000		
	Jumlah Kunjungan Kerja DPR RI, DPD RI, DPRD Prov/Kab/Kota yang difasilitasi	18,400,000	40 kali	115,000,000	40 kali	250,000,000	42 kali	150,000,000	46 kali	300,000,000	48 kali	400,000,000	48 kali	400,000,000		
	Jumlah Izin yang diterbitkan	130,000,000	30 Surat Izin	132,000,000	30 Surat Izin	150,000,000	32 Surat Izin	350,000,000	34 Surat Izin	300,000,000	36 Surat Izin	400,000,000	36 Surat Izin	400,000,000		
	Jumlah Pembinaan dan Desk Pilkada Yg dilaksanakan	561,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Jumlah Kepala Daerah yang dilantik	-		1,179,699,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1,701,232,000	61 Dokumen	999,240,000	61 Dokumen	1,150,000,000	61 Dokumen	1,200,000,000	61 Dokumen	1,400,000,000	61 Dokumen	1,371,168,917	61 Dokumen	1,371,168,912	Program Strategis (Sumsei Berintegrasi dan Melayani)	
	Jumlah Dokumen RLPPD Prov. Sumsei	235,916,400	55 Buku	120,000,000	55 Buku	100,000,000	55 Buku	200,000,000	55 Buku	300,000,000	55 Buku	271,168,917	55 Buku	271,168,912		
	Jumlah Dokumen LPPD Prov. Sumsei	874,090,750	2 Dokumen (120 buku)	359,240,000	2 Dokumen (120 buku)	500,000,000	2 Dokumen (120 buku)	300,000,000	2 Dokumen (120 buku)	300,000,000	2 Dokumen (120 buku)	300,000,000	2 Dokumen (120 buku)	300,000,000		
	Jumlah Dokumen LKPU Gubernur Sumsei Akhir Tahun Anggaran	337,666,600	3 dokumen	400,000,000	3 dokumen	450,000,000	3 dokumen	300,000,000	3 dokumen	300,000,000	3 dokumen	300,000,000	3 dokumen	300,000,000		
	Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten/Kota	253,558,250	1 (satu) Laporan	120,000,000	1 (satu) Laporan	100,000,000	1 (satu) Laporan	200,000,000	1 (satu) Laporan	300,000,000	1 (satu) Laporan	300,000,000	1 (satu) Laporan	300,000,000		
Sub Kegiatan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	100,000,000	Perangkat Daerah	100,000,000	Perangkat Daerah	100,000,000	Perangkat Daerah	100,000,000		
Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	100,000,000	Perangkat Daerah	100,000,000	Perangkat Daerah	100,000,000	Perangkat Daerah	100,000,000		
Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Peningkatan Mou yang difasilitasi	18,361,414,423	62 Dokumen	60,510,000,000	62 Dokumen	85,687,147,507	72 Dokumen	700,000,000	82 Dokumen	800,000,000	92 Dokumen	800,000,000	102 Dokumen	800,000,000		
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah Yang Di Fasilitasi	21 Dokumen	31 Dokumem	26 Dokumen	31 Dokumem	85,687,147,507	36 Dokumem	700,000,000	41 Dokumem	800,000,000	46 Dokumem	800,000,000	48 Dokumem	800,000,000		
	Jumlah Partisipasi Aktif dalam APPSI	494,916,401	6 Kali Rapat/Pertemu an APPSI	215,000,000	6 Kali Rapat/Pertemu an APPSI	300,000,000	6 Kali Rapat/Pertemu an APPSI	350,000,000	6 Kali Rapat/Pertemu an APPSI	400,000,000	6 Kali Rapat/Pertemu an APPSI	400,000,000	5 Kali Rapat/Pertemu an APPSI	400,000,000		
	Jumlah Dokumen Kerjasama/MoU yang difasilitasi	332,157,022	25 Dokumen	295,000,000	25 Dokumen	387,147,507	30 Dokumen	350,000,000	35 Dokumen	400,000,000	40 Dokumen	400,000,000	43 Dokumen	400,000,000		
	Hibah Kepada Pusatput Kodiklat-AD	6,034,341,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Hibah Kepada Kodam II Sriwijaya (Pembangunan Kolam Renang Jasdarn II Sriwijaya Palembang)	9,000,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Hibah Kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan	2,500,000,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Hibah Kepada Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan (Pembangunan Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan)	-		10,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Hibah Kepada Kejaksaan Tinggi Sumsei (Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Pintu)	-		50,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Hibah Kepada Kodam II/SWJ (Pembangunan Lanjutan Kolam Renang Jasdarn II/SWJ, Tribun Kolam, Kolam Renang Anak-Anak, Ruang Bilas/Lobi, Pengaspalan Komplek Jasdarn II/SWJ)					11,490,604,470										
	Hibah Kepada Kodam II/SWJ (Pembangunan RS. Tingkat II dr. A.K. Gani Gedung Poliklinik, Rawat Inap dan Prasarana RS. Tingkat II dr. A.K. Gani)					53,509,395,530										
	Hibah Kepada Kodam II/SWJ (Pembangunan Rumah Dinas As-Ops, As-Intel,As-Ter, Dokter,Ka. Pemand, Ka. Infohtadarn, Ka. Bintaldarn dan Pengaspalan Jalan Komplek Sintraman					10,000,000,000										
	Hibah Kepada Badan Pusat Statistik Sumsei (Pembelian/Pembebasan Lahan Kantor BPS Sumsei)					4,000,000,000										
	Hibah Kepada Universitas Sriwijaya (Pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/FISIP)					6,000,000,000										
Jumlah 1		23,911,033,000		64,869,785,566		89,847,231,507		5,974,367,463		6,045,589,056		6,128,638,546		6,183,749,225		

2. Biro Hukum																
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	2,030,060,440	100%	1,248,754,646	100%	1,360,945,612	100%	1,541,637,559	100%	1,607,241,940	100%	1,695,701,992	100%	1,809,819,662		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	189,292,000	100%	189,392,000	100%	188,892,000	100%	188,892,000	100%	188,892,000	100%	188,892,000	100%	188,892,000		
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	189,292,000	6 Laporan	189,392,000	6 Laporan	188,292,000	6 Laporan	188,892,000	6 Laporan	188,892,000	6 Laporan	188,892,000	6 Laporan	188,892,000		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	778,948,440	100%	549,054,076	100%	672,483,612	100%	670,075,559	100%	670,075,559	100%	690,075,559	100%	789,193,229		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,000,000	10 paket	94,944,994	10 paket	121,000,000	10 paket	121,000,000	10 paket	121,000,000	10 paket	131,000,000	10 paket	136,000,000		
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	42,548,440	6 Paket	44,559,082	6 Paket	51,483,612	6 Paket	51,483,612	6 Paket	51,483,612	6 Paket	61,483,612	6 Paket	61,483,612		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	636,400,000	150 Laporan	409,550,000	150 Laporan	500,000,000	150 Laporan	497,591,947	150 Laporan	497,591,947	150 Laporan	497,591,947	150 Laporan	591,709,617		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	716,820,000	100%	291,402,234	100%	116,820,000	100%	116,820,000	100%	116,820,000	100%	116,820,000	100%	116,820,000		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	716,820,000	24 Laporan	291,402,234	1 Laporan	116,820,000	1 Laporan	116,820,000	1 Laporan	116,820,000	1 Laporan	116,820,000	1 Laporan	116,820,000		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Daerah	87,865,360	100%	67,656,336	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000		
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	87,865,360	3 Orang	67,656,336	3 Orang	50,000,000	3 Orang	50,000,000	3 Orang	50,000,000	3 Orang	60,000,000	3 Orang	60,000,000		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	345,000,000	100%	151,250,000	100%	332,750,000	100%	332,750,000	100%	371,454,381	100%	394,914,433	100%	394,914,433		
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	70,000,000	2 Unit	-	-	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-		
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	275,000,000	15 Unit	151,250,000	15 Unit	332,750,000	15 Unit	332,750,000	15 Unit	371,454,381	15 Unit	394,914,433	15 Unit	394,914,433		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110,000,000		62,647,000		133,100,000		183,100,000	100%	210,000,000	100%	245,000,000	100%	260,000,000		
Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	40,000,000		
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110,000,000	4 Laporan	62,647,000	4 Laporan	133,100,000	4 Laporan	133,100,000	4 Laporan	150,000,000	4 Laporan	175,000,000	4 Laporan	180,000,000		
Sub-Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	40,000,000		
Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	1,591,364,000	100%	1,617,598,061	100%	2,259,162,840	100%	2,080,537,266	100%	2,164,713,994	100%	2,278,216,746	100%	2,424,640,689		
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Persentase Penetapan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku	641,214,805	100%	540,794,866	100%	811,766,544	100%	763,791,696	100%	795,000,000	100%	808,030,000	100%	874,640,689		
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	217,015,210	34 Dokumen	175,544,866	36 Dokumen	215,000,000	43 Dokumen	230,000,000	46 Dokumen	245,000,000	48 Dokumen	250,000,000	50 Dokumen	265,000,000	Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani)	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	70,000,000	780 Dokumen	53,000,000	825 Dokumen	113,826,719	828 Dokumen	150,791,696	831 Dokumen	140,000,000	834 Dokumen	145,000,000	837 Dokumen	155,692,000	Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani)	

Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya	95,000,000	110 Dokumen	107,250,000	75 Dokumen	267,250,000	78 Dokumen	143,000,000	81 Dokumen	150,000,000	84 Dokumen	153,030,000	87 Dokumen	173,948,689	Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani)	
Sub Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	259,199,595	510 Dokumen	205,000,000	530 Dokumen	215,689,825	540 Dokumen	240,000,000	550 Dokumen	260,000,000	560 Dokumen	260,000,000	570 Dokumen	280,000,000	Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani)	
Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	950,149,195	100%	1,076,803,195	100%	1,447,396,296	100%	1,316,745,570	100%	1,369,713,994	100%	1,470,186,746	100%	1,550,000,000		
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	868,149,195	53 Kasus	976,325,295	60 Kasus	1,336,300,496	65 Kasus	1,191,745,570	70 Kasus	1,237,713,994	75 Kasus	1,335,186,746	80 Kasus	1,400,000,000	Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani)	
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	82,000,000	3 kasus	100,477,900	4 Kasus	111,095,800	4 Kasus	125,000,000	4 Kasus	132,000,000	4 Kasus	135,000,000	4 Kasus	150,000,000	Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani)	
Jumlah 2		3,621,424,440		2,866,352,707		3,620,108,452		3,622,174,825		3,771,955,934		3,973,918,738		4,234,460,351		
3. Biro Kesejahteraan Rakyat																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang ditindaklanjuti	2,293,925,800		1,384,001,646		1,573,905,612		1,621,497,559		1,687,101,940		1,775,561,992		1,889,679,662		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110,000,000		62,647,000		133,100,000		183,100,000		210,000,000		245,000,000		260,000,000		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	40,000,000		
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110,000,000	4 Laporan	62,647,000	4 Laporan	133,100,000	4 Laporan	133,100,000	4 Laporan	150,000,000	4 Laporan	175,000,000	4 Laporan	180,000,000		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral Daerah						1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	40,000,000		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	189,292,000		189,392,000		188,892,000		188,892,000		188,892,000		188,892,000		188,892,000		
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	189,292,000	6 Laporan	189,392,000	6 Laporan	188,892,000	6 Laporan	188,892,000	6 Laporan	188,892,000	6 Laporan	188,892,000	6 Laporan	188,892,000		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87,865,360		67,656,336		50,000,000		50,000,000		50,000,000		60,000,000		60,000,000		
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	87,865,360	3 Orang	67,656,336	3 Orang	50,000,000	3 Orang	50,000,000	3 Orang	50,000,000	3 Orang	60,000,000	3 Orang	60,000,000		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	778,948,440		549,054,076		672,483,612		670,075,559		670,075,559		690,075,559		789,193,229		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100,000,000	10 paket	94,944,994	10 paket	121,000,000	10 paket	121,000,000	10 paket	121,000,000	10 paket	131,000,000	10 paket	136,000,000		
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	42,548,440	6 Paket	44,559,082	6 Paket	51,483,612	6 Paket	51,483,612	6 Paket	51,483,612	6 Paket	61,483,612	6 Paket	61,483,612		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	636,400,000	150 Laporan	409,550,000	150 Laporan	500,000,000	150 Laporan	497,591,947	150 Laporan	497,591,947	150 Laporan	497,591,947	150 Laporan	591,709,617		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	345,000,000		151,250,000		332,750,000		332,750,000		371,454,381		394,914,433		394,914,433		
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	70,000,000	2 Unit	-	-	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-		
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	275,000,000	15 Unit	151,250,000	15 Unit	332,750,000	15 Unit	332,750,000	15 Unit	371,454,381	15 Unit	394,914,433	15 Unit	394,914,433		

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	716,820,000		291,402,234		116,820,000		116,820,000		116,820,000		116,820,000			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	716,820,000	24 Laporan	291,402,234	1 Laporan	116,820,000	1 Laporan	116,820,000	1 Laporan	116,820,000	1 Laporan	116,820,000	1 Laporan	116,820,000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66,000,000		72,600,000		79,860,000		79,860,000		79,860,000		79,860,000		79,860,000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	66,000,000	10 Unit	72,600,000	10 Unit	79,860,000	10 Unit	79,860,000	10 Unit	79,860,000	10 Unit	79,860,000	10 Unit	79,860,000	
Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitas pembinaan mental spiritual,pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	37,257,934,200		35,603,937,210		43,353,268,244		44,664,189,579		46,471,263,847		48,907,898,125		52,051,272,120	
Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Fasilitas Pembinaan Mental Spritual	36,361,934,200		35,023,181,410		42,497,653,244		43,808,574,579		45,615,648,847		48,052,283,125		51,195,657,120	
Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	17,405,000,000	10 unit	18,149,350,000	10 unit	25,973,050,000	10 unit	25,973,050,000	10 unit	25,973,050,000	10 unit	25,973,050,000	10 unit	25,973,050,000	Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya
Sub Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	18,956,934,200	7 lembaga	16,873,831,410	7 lembaga	16,524,603,244	7 lembaga	17,835,524,579	7 lembaga	19,642,598,847	7 lembaga	22,079,233,125	7 lembaga	25,222,607,120	Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya
Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang di Tindaklanjuti	437,000,000		221,272,500		291,865,000		291,865,000		291,865,000		291,865,000		291,865,000	
Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	77,000,000	1 Dokumen	40,622,500	1 Dokumen	68,170,000	1 Dokumen	68,170,000	1 Dokumen	68,170,000	1 Dokumen	68,170,000	1 Dokumen	68,170,000	
Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	165,000,000	1 Dokumen	91,650,000	1 Dokumen	109,195,000	1 Dokumen	109,195,000	1 Dokumen	109,195,000	1 Dokumen	109,195,000	1 Dokumen	109,195,000	
Sub Kegiatan Fasilitas Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	195,000,000	1 Dokumen	89,000,000	1 Dokumen	114,500,000	1 Dokumen	114,500,000	1 Dokumen	114,500,000	1 Dokumen	114,500,000	1 Dokumen	114,500,000	
Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang di Tindaklanjuti	459,000,000		359,483,300		563,750,000		563,750,000		563,750,000		563,750,000		563,750,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	275,000,000	1 Dokumen	258,360,800	1 Dokumen	332,750,000	1 Dokumen	332,750,000	1 Dokumen	332,750,000	1 Dokumen	332,750,000	1 Dokumen	332,750,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	77,000,000	1 Dokumen	32,850,000	1 Dokumen	102,000,000	1 Dokumen	102,000,000	1 Dokumen	102,000,000	1 Dokumen	102,000,000	1 Dokumen	102,000,000	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi Informatika, Statistik, Persandian , dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi Informatika, Statistik, Persandian , dan Perhubungan	107,000,000	1 Dokumen	68,272,500	1 Dokumen	129,000,000	1 Dokumen	129,000,000	1 Dokumen	129,000,000	1 Dokumen	129,000,000	1 Dokumen	129,000,000	
Jumlah 3		39,551,860,000		36,987,938,856		44,927,173,856		46,285,687,138		48,158,365,787		50,683,460,117		53,940,951,782	

4. Biro Perekonomian																
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah															
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100%	50,000,000	100%	151,427,645	100%	155,000,000	100%	200,000,000		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral Daerah						10 data	50,000,000	10 data	151,427,645	10 data	155,000,000	10 data	200,000,000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	174,886,000	100%	169,886,000	100%	169,886,000	100%	169,886,000	100%	169,886,000	100%	169,886,000		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 166,142,500	1 tahun	174,886,000	12 dokumen	169,886,000	12 dokumen	169,886,000	12 dokumen	169,886,000	12 dokumen	169,886,000	12 dokumen	169,886,000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	297,793,000	100%	297,793,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	522,134,505	100%	599,861,955		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Rp 103,947,500	1 paket	112,000,000	1 paket	112,000,000	1 paket	150,000,000	1 paket	150,000,000	1 paket	172,134,505	1 paket	172,134,505		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 296,600,000	1 laporan	185,793,000	1 laporan	185,793,000	1 laporan	350,000,000	1 laporan	350,000,000	1 laporan	350,000,000	100%	427,727,450		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	77,818,000	100%	188,561,144	100%	1,500,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,550,000,000	100%	1,550,000,000		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan						5 unit	1,100,000,000	5 unit	1,100,000,000	5 unit	1,100,000,000	5 unit	1,100,000,000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Rp 150,092,150	6 unit	77,818,000	6 unit	188,561,144	10 unit	400,000,000	10 unit	400,000,000	10 unit	450,000,000	10 unit	450,000,000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	185,743,144	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Rp 375,661,000	12 orang	185,743,144	2 orang	75,000,000	2 orang	75,000,000	2 orang	75,000,000	2 orang	75,000,000	2 orang	75,000,000		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	164,136,450	100%	164,136,450	100%	200,000,000	100%	200,000,000		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pelatihan		5 orang	100,000,000	5 orang	100,000,000	7 orang	164,136,450	7 orang	164,136,450	10 orang	200,000,000	10 orang	200,000,000		
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Koordinasi sektor pembangunan Bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang terlaksana															
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Data Informasi Pembangunan Ekonomi yang tersedia		100%	820,481,900	100%	820,481,900	100%	1,289,984,084	100%	1,289,984,084	100%	1,289,984,084	100%	1,333,818,684		
1. Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Rp 557,924,000	2 Dokumen	489,313,500	2 Dokumen	489,313,500	2 Dokumen	958,815,684	2 Dokumen	958,815,684	2 Dokumen	958,815,684	2 Dokumen	958,818,684	Program Strategis (Sumsei Berintegrasi dan Melayani)	
2. Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Rp 305,500,000	2 Dokumen	331,168,400	2 Dokumen	331,168,400	2 Dokumen	331,168,400	2 Dokumen	331,168,400	2 Dokumen	331,168,400	100%	375,000,000	Program Strategis (Sumsei Berintegrasi dan Melayani)	
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi sektor sumberdaya alam yang Terselenggara Dengan Baik		100%	902,069,575	100%	907,069,575	100%	907,069,575	100%	1,007,069,575	100%	1,007,069,575	100%	1,035,000,000		
1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Rp 177,469,250	2 Dokumen	224,786,000	2 Dokumen	229,786,000	2 Dokumen	229,786,000	2 Dokumen	329,786,000	2 Dokumen	329,786,000	100%	350,000,000		
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp 270,100,000	1 Dokumen	318,779,125	1 Dokumen	318,779,125	1 Dokumen	318,779,125	1 Dokumen	318,779,125	1 Dokumen	318,779,125	100%	320,000,000		
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp 98,984,250	1 Dokumen	358,504,450	1 Dokumen	358,504,450	1 Dokumen	358,504,450	1 Dokumen	358,504,450	1 Dokumen	358,504,450	100%	365,000,000	Program Strategis (Sumsei Berintegrasi dan Melayani)	

Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi kepada PAD		100%	900,870,000	100%	900,870,000	100%	1,157,099,500	100%	1,337,753,329	100%	1,428,623,504	100%	1,450,000,408		
1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Rp 157,600,000	1 Dokumen	128,068,350	1 Dokumen	128,068,350	1 Dokumen	128,068,350	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	200,000,000	100%	200,000,000	Program Strategis (100.000 Sultan Muda)	
2. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	-	1 Dokumen	103,412,500	1 Dokumen	103,412,500	1 Dokumen	103,412,500	1 Dokumen	175,000,000	1 Dokumen	168,623,504	100%	175,000,000	Program Strategis (100.000 Sultan Muda)	
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendirian BUMD	Rp 571,485,000	2 Dokumen	493,770,500	2 Dokumen	493,770,500	2 Dokumen	750,000,000	2 Dokumen	750,000,000	2 Dokumen	750,000,000	100%	750,000,000	Program Strategis (100.000 Sultan Muda)	
4. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	-	1 Dokumen	101,694,650	1 Dokumen	101,694,650	1 Dokumen	101,694,650	1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	150,000,000	100%	165,000,408		
5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendirian BLUD	Rp 149,400,000	2 Dokumen	73,924,000	2 Dokumen	73,924,000	2 Dokumen	73,924,000	2 Dokumen	137,753,329	2 Dokumen	160,000,000	100%	160,000,000		
Jumlah 4		3,380,905,650		3,459,661,619		3,459,661,619		5,813,175,609		6,195,257,083		6,397,697,668		6,613,567,047		
5. Biro administrasi Pembangunan																
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	823,404,926	100%	1,134,877,269	100%	1,126,127,269	100%	1,567,712,266	100%	1,624,965,244	100%	1,734,255,684	100%	1,901,835,467	-	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,559,300	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	90,000,000	100%	100,000,000	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,559,300	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	50,000,000	-	-
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	111,160,000	100%	111,160,000	dokumen	111,160,000	100%	111,160,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	-	-
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	111,160,000	1 Dokumen	111,160,000	1 Dokumen	111,160,000	1 Dokumen	111,160,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81,186,000	100%	81,000,000	100%	56,000,000	100%	120,000,000	100%	90,000,000	100%	185,000,000	100%	275,000,000	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	51,900,000	30 paket	25,000,000			30 Paket	40,000,000			30 paket	60,000,000	30 paket	75,000,000	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29,286,000	1 Orang	26,000,000	3 Orang	36,000,000	3 Orang	50,000,000	2 Orang	50,000,000	3 Orang	75,000,000	4 Orang	100,000,000	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	5 Orang	30,000,000	8 Orang	20,000,000	10 Orang	30,000,000	5 orang	40,000,000	10 orang	50,000,000	10 orang	100,000,000	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	335,406,626	100%	279,051,257	100%	233,967,269	100%	271,552,266	100%	350,000,000	100%	469,255,684	100%	525,000,000	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	63,235,900	1 Paket	31,551,257	1 Paket	33,967,269	1 Paket	41,552,266	1 Paket	75,000,000	1 Paket	139,255,684	1 Paket	175,000,000	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272,170,726	1 laporan	247,500,000	1 laporan	200,000,000	1 laporan	230,000,000	1 laporan	275,000,000	1 laporan	330,000,000	1 laporan	350,000,000	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,520,000	100%	420,000,000	100%	510,000,000	100%	785,000,000	100%	634,965,244	100%	450,000,000	100%	461,835,467	-	-

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	R 4 =1 unit	420,000,000	R 4 =1 unit	450,000,000	R4 = 1 unit	470,000,000	R4 = 1 unit	460,000,000	R2 = 3 unit	90,000,000	R2 = 3 unit	90,000,000	-	-
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang disediakan	-	-				1 (Satu) unit	200,000,000						-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	85,520,000	-		5 unit	60,000,000	5 unit	115,000,000	12 unit	174,965,244	12 unit	360,000,000	12 unit	371,835,467	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192,573,000	100%	223,666,012	100%	195,000,000	100%	205,000,000	100%	250,000,000	100%	300,000,000	100%	300,000,000	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	192,573,000	1 Laporan	223,666,012	1 Laporan	195,000,000	1 Laporan	205,000,000	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	300,000,000	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	100%	75,000,000	100%	90,000,000	100%	90,000,000	100%	90,000,000	-	-
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	1 Unit	75,000,000	1 Unit	90,000,000	1 Unit	90,000,000	1 Unit	90,000,000	-	-
KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Efektivitas Administrasi Pembangunan Daerah	576,075,167	100%	675,750,000	100%	684,500,000	100%	1,300,000,000	100%	1,445,000,000	100%	1,585,000,000	100%	1,720,000,000	-	-
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	330,066,933	100%	391,750,000	100%	396,500,000	100%	675,000,000	100%	745,000,000	100%	810,000,000	100%	885,000,000	-	-
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah laporan hasil pengendalian adminitrasi pembangunan APBD	139,494,595	1 laporan	176,250,000	1 laporan	205,000,000	1 laporan	250,000,000	1 laporan	270,000,000	1 laporan	285,000,000	1 laporan	325,000,000	Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani)	-
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah laporan hasil pengendalian adminitrasi pembangunan APBN	89,888,601	1 laporan	91,500,000	1 laporan	91,500,000	1 laporan	225,000,000	1 laporan	250,000,000	1 laporan	250,000,000	1 laporan	275,000,000	Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani)	-
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah laporan hasil pengendalian adminitrasi pembangunan Wilayah	100,683,737	1 laporan	124,000,000	1 laporan	100,000,000	1 laporan	200,000,000	1 laporan	225,000,000	1 laporan	275,000,000	1 laporan	285,000,000	-	-
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Pelaporan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	246,008,234	100%	284,000,000	100%	288,000,000	100%	625,000,000	100%	700,000,000	100%	775,000,000	100%	835,000,000	-	-
Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah	59,167,570	1 dokumen	91,500,000	1 dokumen	91,500,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	225,000,000	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	275,000,000	-	-
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan daerah	83,661,780	1 laporan	101,000,000	1 laporan	105,000,000	1 laporan	225,000,000	1 laporan	250,000,000	1 laporan	275,000,000	1 laporan	285,000,000	Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani)	-
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	103,178,884	1 dokumen	91,500,000	1 dokumen	91,500,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	225,000,000	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	275,000,000	-	-
Jumlah 5		1,399,480,093		1,810,627,269		1,810,627,269		2,867,712,266		3,069,965,244		3,319,255,684		3,621,835,467	-	-
6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	1,529,400,000	100%	1,561,682,354	100%	776,000,000	100%	1,970,440,289	100%	2,167,484,318	100%	2,384,232,750	100%	2,622,656,025		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000		
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah						1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	25,000,000		
2. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah						12 data	25,000,000	12 data	25,000,000	12 data	25,000,000	12 data	25,000,000		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	250,400,000	100%	251,000,000	100%	251,000,000	100%	232,275,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	450,000,000		
1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250,400,000	12 Dokumen	251,000,000	12 Dokumen	251,000,000	12 Dokumen	232,275,000	12 Dokumen	350,000,000	12 Dokumen	350,000,000	12 Dokumen	450,000,000		

Kegiatan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur yang Terlaksana	75,000,000	100%	50,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	100,000,000	100%	94,232,750	100%	100,000,000		
1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang ikut pelatihan kepemimpinan		3 orang	50,000,000	5 orang	75,000,000	5 orang	75,000,000	5 orang	100,000,000	5 orang	94,232,750	5 orang	100,000,000		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani	75,000,000	100%	20,000,000	100%	80,000,000	100%	213,165,289	100%	750,000,000	100%	450,000,000	100%	850,000,000		
1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		24 paket	-	24 paket	20,000,000	24 paket	21,000,000	24 paket	250,000,000	24 paket	150,000,000	24 paket	250,000,000		
2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75,000,000	30 laporan	20,000,000	30 laporan	60,000,000	30 laporan	192,165,289	30 laporan	500,000,000	30 laporan	300,000,000	30 laporan	600,000,000		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	420,000,000	100%	957,000,000	100%	200,000,000	100%	1,200,000,000	100%	400,000,000	100%	1,200,000,000	100%	600,000,000		
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan		-	-	-	-	8 unit	900,000,000	-		-	900,000,000	-	-		
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	420,000,000	20 unit	957,000,000	20 unit	200,000,000	20 unit	300,000,000	20 unit	400,000,000	20 unit	300,000,000	20 unit	600,000,000		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	784,000,000	100%	283,682,354	100%	170,000,000	100%	200,000,000	100%	517,484,318	100%	240,000,000	100%	572,656,025		
1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	784,000,000	13 laporan	283,682,354	13 laporan	170,000,000	13 laporan	200,000,000	13 laporan	517,484,318	13 laporan	240,000,000	13 laporan	572,656,025		
PROGRAM KEBLIKAHAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	Tingkat Kematangan UKPBJ	4,265,000,000	Level 3	5,171,035,850	Level 3	5,991,345,204	Level 3 Pusat Unggulan Pengadaan	6,890,046,985	Level 3 Pusat Unggulan Pengadaan	7,923,554,032	Level 4	9,112,087,137	Level 4	10,478,900,208		
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	1,130,000,000	100%	1,504,041,000	100%	2,100,000,000	100%	2,615,046,985	100%	2,973,554,032	100%	3,500,000,000	100%	4,150,000,000		
1. Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	185,000,000	4 laporan	320,340,500	4 laporan	300,000,000	4 laporan	350,000,000	4 laporan	450,000,000	4 laporan	500,000,000	4 laporan	750,000,000		
2. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	780,000,000	12 laporan	894,000,000	12 laporan	1,500,000,000	12 laporan	1,815,046,985	12 laporan	2,023,554,032	12 laporan	2,500,000,000	12 laporan	2,750,000,000		
3. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa	165,000,000	12 laporan	289,700,500	12 laporan	300,000,000	12 laporan	450,000,000	12 laporan	500,000,000	12 laporan	500,000,000	12 laporan	650,000,000		
Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1,125,000,000	100%	1,179,700,000	100%	1,400,000,000	100%	1,550,000,000	100%	1,750,000,000	100%	1,900,000,000	100%	2,250,000,000		
1. Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	720,000,000	4 laporan	707,000,000	4 laporan	700,000,000	4 laporan	750,000,000	4 laporan	850,000,000	4 laporan	850,000,000	4 laporan	900,000,000	Program Strategis (Sumkel Berintegrasi dan Melayani)	
2. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	195,000,000	4 laporan	320,000,000	4 laporan	400,000,000	4 laporan	450,000,000	4 laporan	500,000,000	4 laporan	550,000,000	4 laporan	700,000,000		
3. Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	210,000,000	4 laporan	152,700,000	4 laporan	300,000,000	4 laporan	350,000,000	4 laporan	400,000,000	4 laporan	500,000,000	4 laporan	650,000,000		
Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2,010,000,000	100%	2,487,294,850	100%	2,491,345,204	100%	2,725,000,000	100%	3,200,000,000	100%	3,712,087,137	100%	4,078,900,208		
1. Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	720,000,000	45 orang	1,379,294,850	45 orang	941,345,204	45 orang	950,000,000	45 orang	1,200,000,000	45 orang	1,400,000,000	45 orang	1,400,000,000		
2. Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	275,000,000	5 dokumen	325,000,000	5 dokumen	850,000,000	5 dokumen	875,000,000	5 dokumen	900,000,000	5 dokumen	1,100,000,000	5 dokumen	1,300,000,000		
3. Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	1,015,000,000	4 dokumen	783,000,000	4 dokumen	700,000,000	4 dokumen	900,000,000	4 dokumen	1,100,000,000	4 dokumen	1,212,087,137	4 dokumen	1,378,900,208		
JUMLAH 6		5,794,400,000		6,732,718,204		6,767,345,204		8,860,487,274		10,091,038,350		11,496,319,887		13,101,556,233		

7. Biro Organisasi																
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kerja Perangkat Daerah	1,668,609,790	100%	1,129,078,800	100%	1,180,518,800	100%	1,216,215,469	100%	1,265,422,490	100%	1,331,772,564	100%	1,417,367,313		
I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,000,000	100%	20,500,000	100%	20,500,000	100%	46,000,000	100%	47,500,000	100%	49,000,000	100%	51,000,000		
1. Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,000,000	1 Dok.	20,500,000	1 Dok.	20,500,000	1 Dok.	21,000,000	1 Dok.	21,500,000	1 Dok.	22,000,000	1 Dok.	23,000,000		
2. Sub-Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	26,000,000	1 Dokumen	27,000,000	1 Dokumen	28,000,000		
II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	160,400,000	100%	170,000,000	100%	170,000,000	100%	175,000,000	100%	178,000,000	100%	182,000,000	100%	185,000,000		
3. Sub-Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160,400,000	1 Dok.	170,000,000	1 Dok.	170,000,000	1 Dok.	175,000,000	1 Dok.	178,000,000	1 Dok.	182,000,000	1 Dok.	185,000,000		
III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	227,000,000	100%	130,333,200	100%	192,800,000	100%	202,000,000	100%	211,500,000	100%	222,000,000	100%	231,000,000		
4. Sub-Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21,000,000	n/a	n/a	49 orang	10,000,000	49 orang	11,000,000	53 orang	11,500,000	55 orang	12,000,000	57 orang	13,000,000		
5. Sub-Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100,000,000	1 Dok.	91,373,200	1 Dok.	100,000,000	1 Dok.	105,000,000	1 Dok.	110,000,000	1 Dok.	115,000,000	1 Dok.	120,000,000		
6. Sub-Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	n/a	1 Dok.	30,960,000	1 Dok.	30,960,000	1 Dok.	32,000,000	1 Dok.	33,000,000	1 Dok.	35,000,000	1 Dok.	36,000,000		
7. Sub-Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	n/a	n/a	n/a	1 Dok.	31,840,000	1 Dok.	32,000,000	1 Dok.	33,000,000	1 Dok.	35,000,000	1 Dok.	36,000,000		
8. Sub-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85,000,000	n/a	n/a	2 orang	10,000,000	2 orang	11,000,000	2 orang	12,000,000	2 orang	12,500,000	2 orang	13,000,000		
9. Sub-Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21,000,000	2 Orang	8,000,000	3 Orang	10,000,000	3 Orang	11,000,000	3 Orang	12,000,000	3 Orang	12,500,000	3 Orang	13,000,000		
IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	602,549,790	100%	344,700,000	100%	391,368,800	100%	399,000,000	100%	407,500,000	100%	418,000,000	100%	473,124,313		
10. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100,000,000	1 Paket	91,000,000	1 Paket	91,000,000	1 Paket	93,000,000	1 Paket	95,000,000	1 Paket	98,000,000	1 Paket	100,000,000		
11. Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	502,549,790	1 Laporan	226,500,000	1 Laporan	250,368,800	1 Laporan	256,000,000	1 Laporan	260,000,000	1 Laporan	265,000,000	1 Laporan	317,124,313		
12. Sub-Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	n/a	1 Dok.	27,200,000	1 Dok.	50,000,000	1 Dok.	50,000,000	1 Dok.	52,500,000	1 Dok.	55,000,000	1 Dok.	56,000,000	Program Strategis (Sumsei Berintegrasi dan Melayani)	
V. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	170,000,000	100%	80,000,000	100%	177,350,000	100%	235,476,000	100%	244,049,000	100%	246,727,000	100%	254,243,000		

13. Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	n/a	n/a	n/a	n	27,350,000	1 Unit R2 (Motor)	80,476,000	3 Unit R2 (Motor)	86,049,000	3 Unit R2 (Motor)	86,727,000	3 Unit R2 (Motor)	92,243,000		
14. Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	170,000,000	10 Unit	80,000,000	10 Unit	150,000,000	10 Unit	155,000,000	10 Unit	158,000,000	10 Unit	160,000,000	10 Unit	162,000,000		
VI. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431,660,000	100%	205,045,600	100%	100,000,000	100%	30,239,469	100%	42,873,490	100%	77,045,564	100%	82,000,000		
15. Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	431,660,000	1 Dok.	205,045,600	1 Dok.	100,000,000	1 Dok.	30,239,469	1 Dok.	42,873,490	1 Dok.	77,045,564	1 Dok.	82,000,000		
VII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65,000,000	100%	178,500,000	100%	128,500,000	100%	128,500,000	100%	134,000,000	100%	137,000,000	100%	141,000,000		
16. Sub-Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	40,000,000	5 Aplikasi	120,000,000	5 Aplikasi	70,000,000	5 Aplikasi	70,000,000	5 Aplikasi	73,000,000	5 Aplikasi	75,000,000	5 Aplikasi	76,000,000		
17. Sub-Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	25,000,000	1 Paket	58,500,000	1 Paket	58,500,000	1 Paket	58,500,000	1 Paket	61,000,000	1 Paket	62,000,000	1 Paket	65,000,000		
Program Penataan Organisasi	INDEKS KEMATANGAN ORGANISASI	1,081,860,000	30	888,884,600	37	918,544,600	40	1,056,326,290	42	1,099,064,333	45	1,156,691,727	46	1,231,033,803		
VIII. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Peningkatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	330,000,000	100%	302,460,000	100%	317,460,000	100%	433,326,290	100%	454,064,333	100%	489,691,727	100%	542,033,803		
18. Sub-Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	80,000,000	1 Dok.	75,560,000	1 Dok.	80,560,000	1 Dok.	191,326,290	1 Dok.	204,064,333	1 Dok.	232,691,727	1 Dok.	278,033,803		
19. Sub-Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab./Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab./Kota	80,000,000	1 Dok.	66,900,000	1 Dok.	76,900,000	1 Dok.	78,000,000	1 Dok.	80,000,000	1 Dok.	82,000,000	1 Dok.	84,000,000		
20. Sub-Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	170,000,000	2 Dok.	160,000,000	2 Dok.	160,000,000	2 Dok.	164,000,000	2 Dok.	170,000,000	2 Dok.	175,000,000	2 Dok.	180,000,000		
IX. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Peningkatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	751,860,000	100%	586,424,600	100%	601,084,600	100%	623,000,000	100%	645,000,000	100%	667,000,000	100%	689,000,000		
21. Sub-Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	110,000,000	2 Dok.	135,070,000	2 Dok.	142,070,000	2 Dok.	145,000,000	2 Dok.	150,000,000	2 Dok.	155,000,000	2 Dok.	160,000,000	Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani)	
22. Sub-Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	321,860,000	2 Dok.	164,019,600	2 Dok.	167,019,600	2 Dok.	170,000,000	2 Dok.	175,000,000	2 Dok.	180,000,000	2 Dok.	182,000,000	Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani)	
23. Sub-Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Budaya Kerja	100,000,000	1 Dok.	77,860,000	1 Dok.	77,860,000	1 Dok.	90,000,000	1 Dok.	95,000,000	1 Dok.	100,000,000	1 Dok.	110,000,000		
24. Sub-Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	120,000,000	2 Dok.	123,475,000	2 Dok.	128,135,000	2 Dok.	130,000,000	2 Dok.	135,000,000	2 Dok.	140,000,000	2 Dok.	143,000,000		
25. Sub-Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	100,000,000	1 Dok.	86,000,000	1 Dok.	86,000,000	1 Dok.	88,000,000	1 Dok.	90,000,000	1 Dok.	92,000,000	1 Dok.	94,000,000	Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani)	
Jumlah 7		2,750,469,790		2,017,963,400		2,099,063,400		2,272,541,759		2,364,486,823		2,488,464,291		2,648,401,116		

8. Biro Umum dan Perlengkapan															
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	385,800,000		385,800,000		327,728,496		319,800,000		319,800,000		319,800,000		351,513,980	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	93,800,000	1 Dokumen	93,800,000	1 Dokumen	93,800,000	1 Dokumen	93,800,000	1 Dokumen	93,800,000	1 Dokumen	93,800,000	1 Dokumen	93,800,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	46,428,495	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	46,428,496	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	46,428,495	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	46,428,495	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	38,500,000	2 Dokumen	46,428,495	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66,000,000	2 Laporan	66,000,000	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72,000,000	1 Laporan	72,000,000	1 Laporan	72,000,000	1 Laporan	72,000,000	1 Laporan	72,000,000	1 Laporan	72,000,000	1 Laporan	72,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68,217,811,532	-	68,859,918,000	-	94,426,162,000		94,426,162,000		94,426,162,000	-	94,926,162,000	-	97,011,162,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67,032,811,532	475 orang	67,674,918,000	480 orang	93,448,162,000	487 orang	93,448,162,000	511 orang	93,448,162,000	515 orang	93,948,162,000	515 orang	95,948,162,000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,100,000,000	12 Dokumen	1,100,000,000	12 Dokumen	850,000,000	12 Dokumen	850,000,000	12 Dokumen	850,000,000	12 Dokumen	850,000,000	12 Dokumen	925,000,000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	25,000,000	5 Dokumen	25,000,000	5 Dokumen	25,000,000	5 Dokumen	25,000,000	5 Dokumen	25,000,000	5 Dokumen	25,000,000	5 Dokumen	30,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	73,000,000	1 Laporan	73,000,000	1 Laporan	73,000,000	1 Laporan	73,000,000	1 Laporan	73,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30,000,000	2 Laporan	30,000,000	2 Laporan	30,000,000	2 Laporan	30,000,000	2 Laporan	30,000,000	2 Laporan	30,000,000	2 Laporan	35,000,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,880,000,000		2,080,000,000		2,080,000,000		2,080,000,000		2,080,000,000		2,080,000,000		2,140,000,000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,650,000,000	1 Dokumen	1,650,000,000	1 Dokumen	1,650,000,000	1 Dokumen	1,650,000,000	1 Dokumen	1,650,000,000	1 Dokumen	1,650,000,000	1 Dokumen	1,650,000,000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	130,000,000	4 Laporan	130,000,000	4 Laporan	130,000,000	4 Laporan	130,000,000	4 Laporan	130,000,000	4 Laporan	130,000,000	4 Laporan	140,000,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,000,000	1 laporan	300,000,000	1 laporan	300,000,000	1 laporan	300,000,000	1 laporan	300,000,000	1 laporan	300,000,000	1 laporan	350,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,362,451,626		2,921,435,580		285,900,000		285,900,000		285,900,000		285,900,000		2,785,900,000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1,176,551,626	1 Paket	2,535,535,580	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	2,500,000,000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85,900,000	4 Orang	185,900,000	5 Orang	185,900,000	4 Orang	185,900,000	4 Orang	185,900,000	3 Orang	185,900,000	3 Orang	185,900,000	
Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	15 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100,000,000	25 Orang	200,000,000	25 Orang	100,000,000	40 Orang	100,000,000	20 orang	100,000,000	20 orang	100,000,000	20 orang	100,000,000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	27,839,001,100		36,571,000,000		38,621,000,000		34,371,000,000		34,371,000,000		34,371,000,000		41,671,000,000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	900,000,000	15 Paket	800,000,000	10 Paket	350,000,000	7 Paket	400,000,000	7 Paket	400,000,000	7 Paket	400,000,000	7 Paket	500,000,000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2,571,000,000	12 Paket	3,871,000,000	12 Paket	2,871,000,000	12 Paket	2,571,000,000	12 Paket	2,571,000,000	12 Paket	2,571,000,000	12 Paket	3,571,000,000		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	500,000,000	12 Paket	500,000,000	12 Paket	200,000,000	12 Paket	200,000,000	15 Paket	200,000,000	15 Paket	200,000,000	15 Paket	300,000,000		
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	14,449,200,000	12 Laporan	22,000,000,000	12 Laporan	28,000,000,000	12 Laporan	24,000,000,000	12 Laporan	24,000,000,000	12 Laporan	24,000,000,000	12 Laporan	28,000,000,000	Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani)	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8,920,000,000	3 Laporan	9,000,000,000	3 Laporan	7,000,000,000	3 Laporan	7,000,000,000	3 Laporan	7,000,000,000	3 Laporan	7,000,000,000	3 Laporan	9,000,000,000		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	400,000,000	6 Dokumen	400,000,000	6 Dokumen	200,000,000	6 Dokumen	200,000,000	6 Dokumen	200,000,000	6 Dokumen	200,000,000	6 Dokumen	300,000,000		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	98,801,100	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19,410,000,000		22,328,279,700		12,751,866,251		13,907,145,950		13,985,803,175		14,428,803,175		20,598,279,500		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	4,880,000,000	R4 = 20 unit, R2 = 10 unit	7,798,279,700	R4 = 4 unit	3,600,000,000	R4 = 4 unit	4,755,279,700	R4 = 5 unit	4,833,936,925	R4 = 7 unit	5,276,936,925	R4 = 7 unit	7,598,279,500		
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat besar yang disediakan	-	1 (Satu) unit	-	1 (Satu) unit	-	1 (Satu) unit	-	1 (Satu) unit	-	1 (Satu) unit	-	1 (Satu) unit	-		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2,530,000,000	4 Paket	2,530,000,000	4 Paket	2,000,000,000	4 Paket	2,000,000,000	4 Paket	2,000,000,000	4 Paket	2,000,000,000	4 Paket	3,000,000,000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	12,000,000,000	50 unit	12,000,000,000	50 unit	7,151,866,251	50 unit	7,151,866,250	50 unit	7,151,866,250	50 unit	7,151,866,250	50 unit	10,000,000,000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42,410,000,000		53,928,646,000		52,928,646,000		50,928,646,000		50,928,646,000		51,428,646,000		51,428,646,000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200,000,000	4 Laporan	220,000,000	4 Laporan	220,000,000	4 Laporan	220,000,000	4 Laporan	220,000,000	4 Laporan	220,000,000	4 Laporan	220,000,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	11,450,000,000	50 Laporan	13,000,000,000	50 Laporan	10,000,000,000	50 Laporan	10,000,000,000	50 Laporan	10,000,000,000	50 Laporan	10,000,000,000	50 Laporan	10,000,000,000		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	17,700,000,000	36 Laporan	26,000,000,000	36 Laporan	28,000,000,000	36 Laporan	26,000,000,000	36 Laporan	26,000,000,000	36 Laporan	26,500,000,000	36 Laporan	26,500,000,000	Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani)	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13,060,000,000	36 Laporan	14,708,646,000	36 Laporan	14,708,646,000	36 Laporan	14,708,646,000	36 Laporan	14,708,646,000	36 Laporan	14,708,646,000	36 Laporan	14,708,646,000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48,244,020,374		63,830,394,252		69,329,683,753		41,597,685,150		42,597,685,150		43,226,659,835		44,251,185,684		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	284,000,000	2 unit	1,000,000,000	2 unit	802,000,000	2 unit	850,000,000	2 unit	850,000,000	2 unit	850,000,000	2 unit	850,000,000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11,983,074,300	210 unit	12,983,074,300	210 unit	9,638,258,441	210 unit	9,638,258,400	210 unit	9,638,258,400	220 unit	9,638,258,400	220 unit	9,839,258,400		
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel dipelihara	800,000,000	50 unit	800,000,000	50 unit	600,000,000	50 unit	800,000,000	50 unit	800,000,000	50 unit	800,000,000	50 unit	800,000,000		
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	33,105,126,122	18 aset bangunan dan gedung kantor	46,975,500,000	18 aset bangunan dan gedung kantor	57,017,605,360	18 aset bangunan dan gedung kantor	29,037,606,800	18 aset bangunan dan gedung kantor	30,037,606,800	18 aset bangunan dan gedung kantor	30,366,581,485	18 aset bangunan dan gedung kantor	31,190,107,334		

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2,071,819,952	200 Unit	2,071,819,952	200 Unit	1,271,819,952	200 Unit	1,271,819,950	200 Unit	1,271,819,950	200 Unit	1,571,819,950	200 Unit	1,571,819,950		
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10,687,175,800		12,675,898,000		14,244,409,000		14,244,409,000		14,244,409,000		14,244,409,000		14,244,409,000		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	253,933,000	2 orang	2,171,437,000	2 orang	2,171,437,000	2 orang	2,171,437,000	2 orang	2,171,437,000	2 orang	2,171,437,000	2 orang	2,171,437,000		
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up KDH dan WKDH	11,025,000	4 Orang	15,000,000	4 Orang	15,000,000	2 orang	15,000,000	2 orang	15,000,000	4 Orang	15,000,000	4 Orang	15,000,000		
Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH yang disediakan	2,100,000,000	2 Orang	3,000,000,000	2 Orang	3,000,000,000	2 Orang	3,000,000,000	2 orang	3,000,000,000	2 Orang	3,000,000,000	2 Orang	3,000,000,000		
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	8,322,217,800	2 Orang	7,489,461,000	2 Orang	9,057,972,000	2 Orang	9,057,972,000	2 Orang	9,057,972,000	2 Orang	9,057,972,000	2 Orang	9,057,972,000		
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Peningkatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	11,450,800,000		15,750,000,000		15,750,000,000		15,000,000,000		15,000,000,000		16,600,000,000		16,600,000,000		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	10,250,800,000	30 Paket	11,000,000,000	30 Paket	10,000,000,000	50 Paket	10,000,000,000	50 Paket	10,000,000,000	50 Paket	11,000,000,000	50 Paket	11,000,000,000		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	-	30 Paket	3,250,000,000	30 Paket	4,250,000,000	30 Paket	3,500,000,000	30 Paket	3,500,000,000	30 Paket	4,000,000,000	30 Paket	4,000,000,000		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	1,200,000,000	15 Paket	1,500,000,000	15 Paket	1,500,000,000	15 Paket	1,500,000,000	15 Paket	1,500,000,000	15 Paket	1,600,000,000	15 Paket	1,600,000,000		
Jumlah 8		231,887,060,432		279,331,371,532		300,745,395,500		267,160,748,100		268,239,405,325		271,911,380,010		291,082,096,164		
9. Biro Humas dan Protokol																
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah															
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000		25,000,000		25,000,000		50,000,000		75,000,000		75,000,000		75,000,000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000		
Penyediaan Administrasi Keuangan	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	251,047,000		229,000,000		229,000,000		229,000,000		229,000,000		235,000,000	100%	235,000,000		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	251,047,000	1 Dokumen	229,000,000	1 Dokumen	229,000,000	1 Dokumen	229,000,000	1 Dokumen	229,000,000	1 Dokumen	235,000,000	1 Dokumen	235,000,000		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	190,000,000		400,000,000		272,000,000		402,000,000		272,000,000		400,000,000	100%	280,000,000		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	170,000,000	2 paket	320,000,000	1 paket	192,000,000	2 paket	322,000,000	1 paket	192,000,000	2 paket	320,000,000	1 paket	190,000,000		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20,000,000	2 Orang	50,000,000	2 Orang	40,000,000	2 Orang	40,000,000	2 Orang	40,000,000	2 Orang	40,000,000	2 Orang	50,000,000		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	10 Orang	30,000,000	10 Orang	40,000,000	10 Orang	40,000,000	10 Orang	40,000,000	10 Orang	40,000,000	10 Orang	40,000,000		

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,193,000,000		2,150,000,000		2,150,000,000	100%	2,150,000,000	100%	2,200,000,000		2,200,000,000		2,200,000,000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,000,000,000	1 Dokumen	2,000,000,000	1 Dokumen	2,000,000,000	1 Dokumen	2,000,000,000	1 Dokumen	2,000,000,000	1 Dokumen	2,000,000,000	1 Dokumen	2,000,000,000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300,000,000		600,000,000		400,000,000		750,000,000		400,000,000	100%	800,000,000	100%	450,000,000		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	R4 = 1 Unit	320,000,000	-	-	R4 = 1 Unit	350,000,000	-	-	R4 = 1 Unit	400,000,000	-	-		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	300,000,000	10 Unit	280,000,000	10 Unit	400,000,000	10 Unit	400,000,000	10 Unit	400,000,000	10 Unit	400,000,000	10 Unit	450,000,000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,189,000,000		663,386,000		390,050,000		365,050,000		365,050,000		365,050,000		365,050,000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80,000,000	1 Laporan	80,000,000	1 Laporan	80,000,000	1 Laporan	80,000,000	1 Laporan	80,000,000	1 Laporan	80,000,000	1 Laporan	80,000,000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1,109,000,000	1 Laporan	583,386,000	1 Laporan	310,050,000	1 Laporan	285,050,000	1 Laporan	285,050,000	1 Laporan	285,050,000	1 Laporan	285,050,000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,000,000		110,000,000	100%	110,000,000	100%	110,000,000		110,000,000	100%	110,000,000		110,000,000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	50,000,000	25 Jenis	50,000,000	25 Jenis	50,000,000	25 Jenis	50,000,000	25 Jenis	50,000,000	25 Jenis	50,000,000	25 Jenis	50,000,000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	50,000,000	10Unit	60,000,000	10Unit	60,000,000	10Unit	60,000,000	10Unit	60,000,000	10Unit	60,000,000	10Unit	60,000,000		
Kegiatan Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Peningkatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	30,775,953,000		30,263,005,233		30,164,914,858		30,448,487,974		32,414,217,659		33,521,780,852		36,741,513,382		
Sub Penyajian Materi pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan Yang Disiapkan	2,525,000,000	5 Dokumen	3,645,858,137	5 Dokumen	3,800,000,000	5 Dokumen	3,900,000,000	5 Dokumen	4,000,000,000	5 Dokumen	4,200,000,000	5 Dokumen	4,500,000,000		
Sub Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	3,237,000,000	1 Laporan	2,677,696,872	1 Laporan	2,700,000,000	1 Laporan	2,800,000,000	1 Laporan	2,900,000,000	1 Laporan	3,000,000,000	1 Laporan	3,500,000,000		
Sub Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	25,013,953,000	1 Laporan	23,939,450,224	1 Laporan	23,664,914,858	1 Laporan	23,748,487,974	1 Laporan	25,514,217,659	1 Laporan	26,321,780,852	1 Laporan	28,741,513,382	Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani)	
Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Persentase Peningkatan Fasilitas Keprotokolan	8,425,000,000		9,000,573,625		9,700,000,000		10,250,000,000		10,500,000,000		11,300,000,000		11,700,000,000		
Sub Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	5,200,000,000	1 Laporan	5,280,573,625	1 Laporan	5,500,000,000	1 Laporan	5,800,000,000	1 Laporan	5,900,000,000	1 Laporan	6,500,000,000	1 Laporan	6,600,000,000		
Sub Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	2,725,000,000	1 Laporan	3,000,000,000	1 Laporan	3,500,000,000	1 Laporan	3,700,000,000	1 Laporan	3,800,000,000	1 Laporan	4,000,000,000	1 Laporan	4,300,000,000		
Sub Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	500,000,000	1 Laporan	720,000,000	1 Laporan	700,000,000	1 Laporan	750,000,000	1 Laporan	800,000,000	1 Laporan	800,000,000	1 Laporan	800,000,000		
Jumlah 9		43,449,000,000		43,440,964,858		43,440,964,858		44,754,537,974		46,565,267,659		49,006,830,852		52,156,563,382		
JUMLAH 1 s.d 9		355,745,633,405		434,784,665,807		489,950,226,461		378,750,945,134		384,410,292,911		393,909,645,906		420,481,624,534		

4.2. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, dimana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun.

Program Prioritas Pembangunan Daerah secara tidak langsung memiliki fungsi yaitu menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Menjadi tolak ukur keberhasilan kepala daerah, Mengarahkan program/kegiatan di Organisasi Perintahan Daerah agar terintegrasi dan fokus serta Menjadi bahan evaluasi kinerja untuk setiap tahunnya. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak langsung ke masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 12 Program Strategis sebagai landasan utama pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah untuk periode 2025-2029. Adapun 12 Program Strategis tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat
2. Melanjutkan Program Berkat (Berobat Grtais Ber-KTP)
3. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan
4. Pendidikan Yang Berkeadilan
5. Infrastruktur Tuntas Merata
6. Sumsel Interkoneksi
7. 100.000 Sultan Muda Sumsel
8. Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya
9. Sumsel Wonderful 2030
10. Sumsel Berintegritas dan Melayani
11. Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak
12. Revitalisasi Pasar Tradisional

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi program-program prioritas daerah yang bersifat lintas sektor dan membutuhkan koordinasi menyeluruh. Dari 12 Program Strategis Provinsi Sumatera Selatan, Sekretariat Daerah secara langsung berkontribusi terhadap pelaksanaan tiga program utama yaitu :

1. Sumsel Berintegritas dan Melayani;
2. Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya;dan
3. 100.000 Sultan Muda Sumsel

Secara rinci Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang terkait di kegiatan/sub kegiatan Sekretariat Daerah disajikan pada Tabel 4.3. berikut:

Tabel 4.3
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Melanjutkan dan Meningkatkan Upaya Menciptakan Pemerintahan yang Bersih (Good and Clean Governance), Responsive dan Melayani	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	
		Melanjutkan dan Meningkatkan Upaya Menciptakan Pemerintahan yang Bersih (Good and Clean Governance), Responsive dan Melayani	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Biro Hukum dan HAM
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	
			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Bantuan Hukum	
			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	
			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	
2.	Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya	Melanjutkan Program Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD) dan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Kelurahan (P2UKK)	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	
3.	100.000 Sultan Muda Sumsel	Memberikan bantuan dan memfasilitasi Moda Usaha dengan StartUp dan UMKM yang menggandeng Perbankan dan BUMN/BUMD	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Biro Perekonomian
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
4.	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Melanjutkan dan Meningkatkan Upaya Menciptakan Pemerintahan yang Bersih (Good and Clean Governance), Responsive dan Melayani	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Biro Administrasi Pembangunan
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
		Melanjutkan dan Meningkatkan Upaya Menciptakan Pemerintahan yang Bersih (Good and Clean Governance), Responsive dan Melayani	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	
		Melanjutkan dan Meningkatkan Upaya Menciptakan Pemerintahan yang Bersih (Good and Clean Governance), Responsive dan Melayani	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Organisasi
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	
			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	
		Melanjutkan dan Meningkatkan Upaya Menciptakan Pemerintahan yang Bersih (Good and Clean Governance), Responsive dan Melayani	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Umum dan Perlengkapan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Melanjutkan dan Meningkatkan Upaya Menciptakan Pemerintahan yang Bersih (Good and Clean Governance), Responsive dan Melayani	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Humas dan Protokol
			Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	
			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	

4.3. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja adalah sebagai berikut : 1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi; 2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama; 3. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan; 4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak, serta proses; 5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan /penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan; 6. Efektif, data / informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) adalah Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Perumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dilakukan dengan langkah –langkah sebagai berikut : a. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD (Rencana Jangka

Menengah Daerah); b. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah); c. Identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dirancang untuk mencerminkan kontribusi strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD bertujuan untuk memberi gambaran tentang sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya dalam urusan perencanaan pembangunan daerah.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator hasil (outcome) program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Selatan (2029) dapat dicapai. Pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, indikator kinerja daerah dibagi atas tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Dari ketiga aspek tersebut, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan fokus pada pelaksanaan indikator kinerja pada aspek pelayanan umum terdiri atas sektor pembangunan yang menjadi Penunjang urusan pemerintahan. Penunjang urusan Pemerintahan dimaksud terdiri atas penelitian dan pengembangan. Adapun capaian dari setiap indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Setda Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (75-75)	BB (76-77)	BB (77-78)	BB (78-79)	BB (79-80)	BB (80-81)	-

Dengan capaian IKU ini, Sekretariat Daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan langsung dalam mengawal keberhasilan RPJMD 2025-2029, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

4.4. Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah telah berjalan secara efektif, efisien, dan berdampak nyata terhadap masyarakat. Indikator Kinerja Kunci disusun untuk masing-masing urusan pemerintahan dan mencerminkan hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci digunakan sebagai instrumen evaluatif untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan strategis, memberikan dasar pengambilan keputusan berbasis kinerja, serta memperkuat akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Setiap indikator dirancang secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu (SMART), serta disertai dengan target tahunan selama periode perencanaan 2025–2029 guna memastikan ketercapaian sasaran pembangunan daerah secara terarah dan terukur. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen utama untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta kebermanfaatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator Kinerja Kunci dirumuskan untuk setiap urusan pemerintahan dan mencerminkan capaian hasil yang diharapkan dari kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah.

Dalam periode perencanaan tahun 2026–2030, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan indikator kinerja kunci yang mencerminkan fungsi strategis dalam mendukung koordinasi, perumusan kebijakan, serta pengendalian pembangunan daerah. Setiap indikator dirancang dengan target capaian tahunan yang realistis, progresif, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029. Bisa dilihat pada tabel 4.5 berikut dibawah ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai SAKIP	Nilai	BB (78,00)	BB (78,75)	BB (79,33)	BB (79,87)	A (80,07)	A (80,38)	
2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A (4,60)	A (4,65)	A (4,70)	A (4,75)	A (4,80)	A (4,85)	
3	Return on Asset (ROA) BUMD	%	1,82	2,1	2,2	2,3	2,35	2,4	
4	Indeks Reformasi Hukum	Angka	80,5	81,5	83	84,5	86	86,5	
5	Persentase Capaian Aksi HAM	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	%	80%	82%	85%	87%	90%	90%	
8	Indeks Tata Kelola Kelola Pengadaan	Angka	70	72	74	76	80	81	
9	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	30	37	40	42	45	46	
10	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	85%	85%	90%	90%	90%	90%	
11	Efektivitas Kerja sama Daerah	Jumlah	26	31	36	41	46	51	
12	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai	3,30 (Sedang)	3,30 (Sedang)	3,30 (Sedang)	3,30 (Sedang)	3,30 (Sedang)	3,30 (Sedang)	
13	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bukan hanya sekedar rencana kerja, tetapi juga merupakan arah kebijakan dan pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah selama periode 2025-2029. RENSTRA ini bukan hanya menjadi panduan teknokratis bagi perangkat daerah, tetapi juga sebagai komitmen moral untuk menghadirkan pembangunan yang lebih bermakna bagi seluruh lapisan masyarakat.

Setiap kebijakan dan program diarahkan agar tidak hanya menjawab tantangan saat ini, tetapi juga mempersiapkan daerah untuk masa depan yang lebih inklusif, adil dan berkelanjutan. Melalui penetapan tujuan, sasaran, kinerja serta arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan, RENSTRA ini merefleksikan komitmen kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan perlu memasukkan pengarusutamaan pembangunan, sebagai kaidah pelaksanaan yang melekat dalam setiap langkah pembangunan daerah. Hal ini mencakup pengarusutamaan pembangunan, sebagai kaidah pelaksanaan yang melekat dalam setiap langkah pembangunan daerah. Hal ini mencakup pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, serta pembangunan berketahanan iklim. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, pembangunan daerah diharapkan tidak hanya menghasilkan capaian fisik dan angka statistik, melainkan juga menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat serta diwariskan bagi generasi yang akan datang.

Demikian RENSTRA Sekretariat Daerah ini disusun, semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.